

**PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERWAWASAN GENDER**  
**(Studi Pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya

**DWI KURNIAWATI**

**NIM. 0510310036**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

**MALANG**

**2009**

## MOTTO

*“Lakukan Yang Terbaik Sampai Akhirnya Kita Tahu  
Bagaimana Takdir Kita”*

*“Keberanian Tidak Akan Memperpendek Umur Dan  
Ketakutan Tidak Akan Memperpanjang Umur”*

**- Ali Bin Abi Thalib -**



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya/pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip oleh naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)



Malang, Oktober 2009

DWI KURNIAWATI  
NIM.0510310036

## RINGKASAN

Dwi Kurniawati. 2009. **PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERWAWASAN GENDER (Studi Pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)**. Dosen Pembimbing: (1) Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsudin Indradi. (2) Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si.

---

Pembangunan sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam proses pembangunan suatu negara dimana sumber daya manusia merupakan investasi masa depan didalam melangsungkan keberlanjutan pembangunan yang berkualitas tinggi didalam suatu negara. Sehingga strategi pembangunan sumber daya manusia dilaksanakan melalui pembangunan sumber daya manusia yang berwawasan gender. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Oleh karena itu perlunya peran dan upaya dari pihak pemerintah, swasta, serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berwawasan gender. Demikian juga dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang sebagai upaya dan usahanya sebagai lembaga pemerintah dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berwawasan gender.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pembangunan sumber daya manusia berwawasan gender yang dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, mengetahui dan mendeskripsikan kendala apa saja yang dihadapi oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam pembangunan sumber daya manusia berwawasan gender. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif kualitatif yang dilakukan dengan pengamatan dan pendeskripsian realita sesungguhnya yang terjadi pada objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia berwawasan gender yang dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang yaitu dengan melaksanakan pelatihan kepemimpinan, kepribadian dan PUG bagi istri Camat/Lurah/Kepala Desa, melaksanakan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga melalui program kegiatan P2W-KSS, melaksanakan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha melalui program kegiatan P3EL, serta memberikan sosialisasi dan fasilitasi perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. Adapun kendala internal yang dihadapi oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang yaitu kendala dana dan persentase jumlah pegawai perempuan yang lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang yaitu kendala mengenai pengembalian modal usaha dari para kelompok usaha dalam kegiatan program P3EL, kendala mengenai para peserta yang memiliki balita, kendala masih rendahnya tingkat pendidikan para peserta

program kegiatan P2WKSS, serta kendala dalam cara pikir masyarakat yang menghambat proses kegiatan sosialisasi dan fasilitasi terhadap tindak kekerasan.

Berdasarkan penelitian tersebut, saran yang dapat diberikan antara lain yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang disarankan tidak hanya tertuju pada pemberdayaan terhadap kaum perempuan saja karena kaum laki-laki juga perlu dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan. Perlu diadakannya seleksi yang lebih ketat kepada kelompok usaha yang akan mendapatkan bantuan dalam program P3EL.



## SUMMARY

Dwi Kurniawati. 2009. **Human Resources Building in Gender Perception (Study on Official of Children and Women Protection in Malang)**. Advisor: (1) Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsudin Indradi, (2) Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si.

---

Human resources building is one of important part in country building process which is human resources as future investment in running the further building that is high quality within a country, so that human resources building strategy held through human resources building in gender perception. The form of balance and justice for gender signed by dissapear the discrimination between men and women in obtain the access, participation opportunity, and control for building and also to get balance and justice advantage from building. So that, the role and effort from goverment, private, and society component is needed to reach human resources building in gender perception. Beside that, several activities which held by official of children and women protection in Malang as an effort this institution as goverment institution to reach human resources building in gender perception.

The purpose of research is to find out and to describe human resources building in gender perception which held by official of children and women protection in Malang, to find out and to describe several constraints that faced by official of children and women protection in Malang within human resources building in gender perception. Metode of research is descriptive qualitative by using observation and description which happened on the object of research.

Based on the result of research shows that human resources building in gender perception which held by official of children and women protection in Malang have some activities such as leadership, personality, and PUG training for wife of village chief (Camat/Lurah/Kepala Desa), Illumination for house wife in order to build their family through P2WKSS program, Exertion management guilding for women to manage the exertion through P3EL program and also to give socialitation and facility of women protection toward violence issues. There are two constraints, internal and eksternal constraints. Internal constraints that faced by official of children and women protection in Malang are fund constraints and prosentage on amount of women employee which is the greatest number than men employee. Beside, eksternal constraints that faced by official of children and women protection in Malang are constraints about financial capital from some exertion groups in P3EL program, constraints related to participants who have baby in leadership; personality; and PUG training for wife of village chief program, constraints caused by lack of education grade from P2WKSS participant, and also constraints related to the way of society thinking which can obstruct socialitation and facility process toward violence.

Based on those research, the suggestion which suitable is for some activities which held by official of children and women protection in Malang, the suggestion is not only oriented toward women because men also need to involve in each activity. Tigh selection is needed toward exertion groups who is obtaint an aid from P3EL program.

## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERWAWASAN GENDER (Studi Pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)”.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada program strata satu Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Disamping itu penulis juga mencoba untuk menyumbangkan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan bidang administrasi pembangunan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak dan Ibuku tercinta yang telah menjadi orang tua terbaik, Kakak dan Adikku tersayang, serta Muhammad Arief Rachman. Rasa syukur tidak pernah lekang kuucapkan telah memiliki kalian karena limpahan kasih sayang dan dukungan yang kalian berikan tidak pernah terhenti sedetikpun.
2. Ibu Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsudin Indradi selaku Dosen Pembimbing I yang selama ini dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
3. Ibu Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
5. Bapak Prof. Dr. Sumartono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
6. Ibu Dra. E. Kamti Astuti selaku Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di KP3A Kab. Malang.

7. Ibu Dra. Sri Sulistikanthi selaku Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan; Ibu Aminin, SH selaku Seksi Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga; Ibu Dra. Ida Sariwardani selaku Seksi Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis agar dapat menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan tema penelitian.
8. Seluruh pegawai Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang yang juga telah membantu banyak penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku alumni MI, SMP, SMA yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. 157 crew yang selama ini telah menjadi keluarga kedua bagi penulis.
11. Saudaraku seperjuangan (Cahyo Tri Pujiatmoko, Dwi Fatmasari, Dheni Shofya Hakim, Dian Dwi Purbowo, Dwi Anung Priyo S), terimakasih atas semangat, dukungan dan pengalaman yang kalian berikan.
12. Sahabat-sahabatku tercinta di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang selalu ada dan selalu memberikan dukungan dan semangat.
13. Keluarga besar “Solusi Indonesia” dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat sebesar-besarnya.

Malang, Oktober 2009

Penulis

Dwi Kurniawati

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>RINGKASAN</b> .....	vi
<b>SUMMARY</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Sistematika pembahasan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A Administrasi Pembangunan	
1. Definisi Pembangunan .....	14
2. Definisi Administrasi Pembangunan .....	15
3. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan .....	17
4. Penyelenggaraan Pembangunan .....	17
B Manajemen Sumber Daya Manusia	
1. Pengertian Sumber Daya Manusia .....	18
2. Manajemen Sumber Daya Manusia .....	19
3. Perencanaan Sumber Daya Manusia .....	20
4. Sumber Daya Manusia Berkualitas .....	22
C Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
1. Pengembangan Manusia .....	22
2. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	24
3. Komponen-komponen Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	27
D Gender	
1. Konsep Gender dan Jenis Kelamin ( <i>seks</i> ) .....	28
2. Ketimpangan Gender .....	30
3. Pendekatan Perempuan dalam Pembangunan .....	35
4. Pengarusutamaan Gender (PUG) .....	40
E Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Berwawasan Gender .....	43

**BAB III METODE PENELITIAN**

A Jenis Penelitian.....	49
B Fokus Penelitian .....	50
C Lokasi dan Situs Penelitian .....	52
D Sumber Data.....	52
E Teknik Pengumpulan Data .....	53
F Instrumen Penelitian.....	54
G Analisis Data .....	55

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

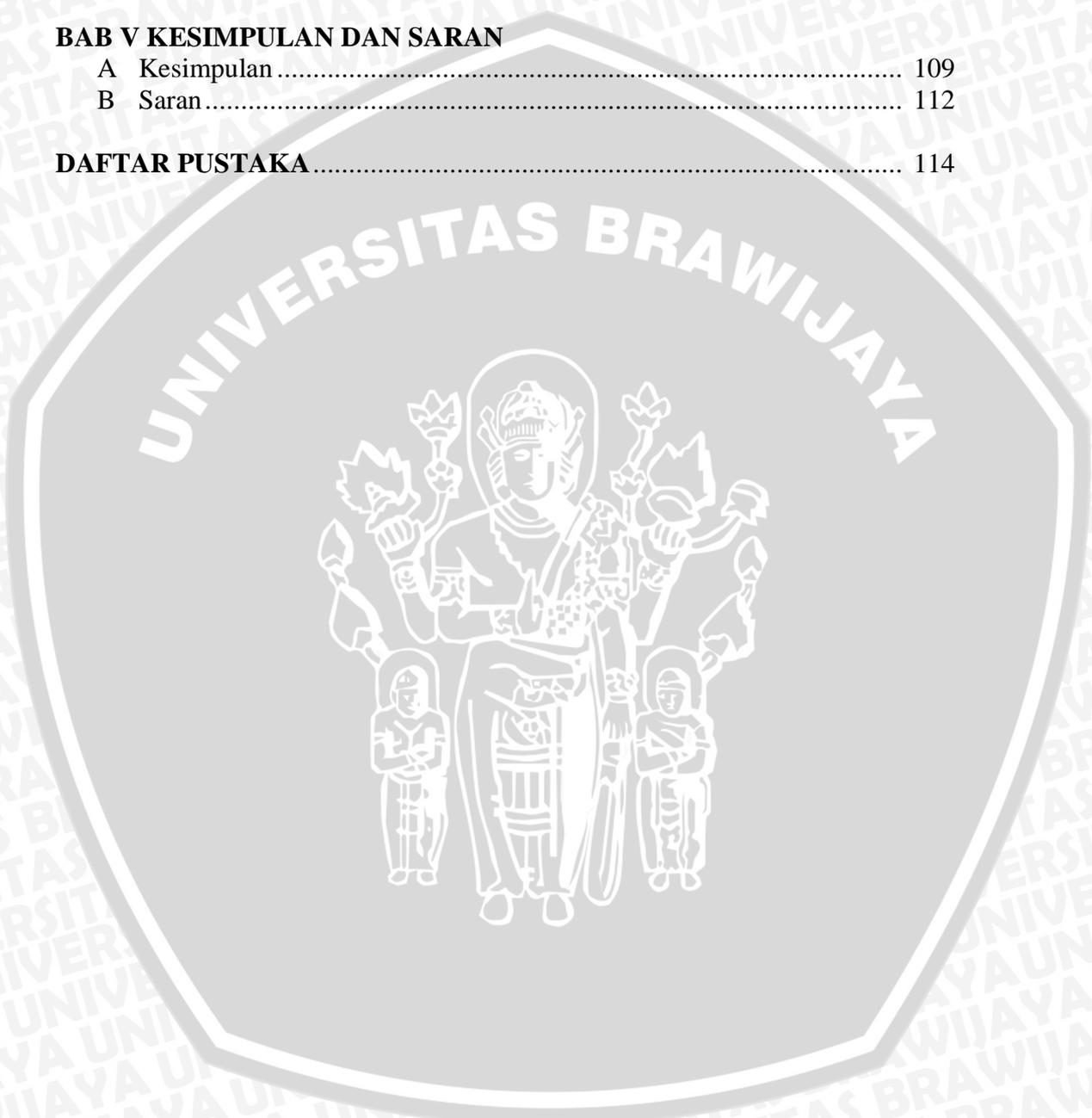
A Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang	
a. Gambaran Fisik .....	57
b. Pemerintahan .....	58
c. Kependudukan.....	60
2. Gambaran Umum Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang	
a. Visi dan Misi .....	61
b. Fungsi.....	62
c. Tujuan dan Sasaran.....	62
d. Kebijakan .....	63
e. Program Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang .....	65
f. Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang .....	67
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berwawasan Gender Oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.....	69
a. Pelatihan Kepemimpinan, Kepribadian dan PUG .....	70
b. Penyuluhan Bagi ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga (P2W-KSS).....	74
c. Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha (P3EL).....	86
d. Fasilitasi Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan .....	89
4. Kendala yang dihadapi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang	
a. Kendala Internal .....	92
b. Kendala Eksternal.....	94
B Pembahasan	
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berwawasan Gender Oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang .....	97
a. Pelatihan Kepemimpinan, Kepribadian dan PUG .....	99
b. Penyuluhan Bagi ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga (P2W-KSS).....	100
c. Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha (P3EL).....	101

d. Fasilitasi Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan .....	101
2. Kendala yang dihadapi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang .....	103
a. Kendala Internal .....	104
b. Kendala Eksternal .....	105

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

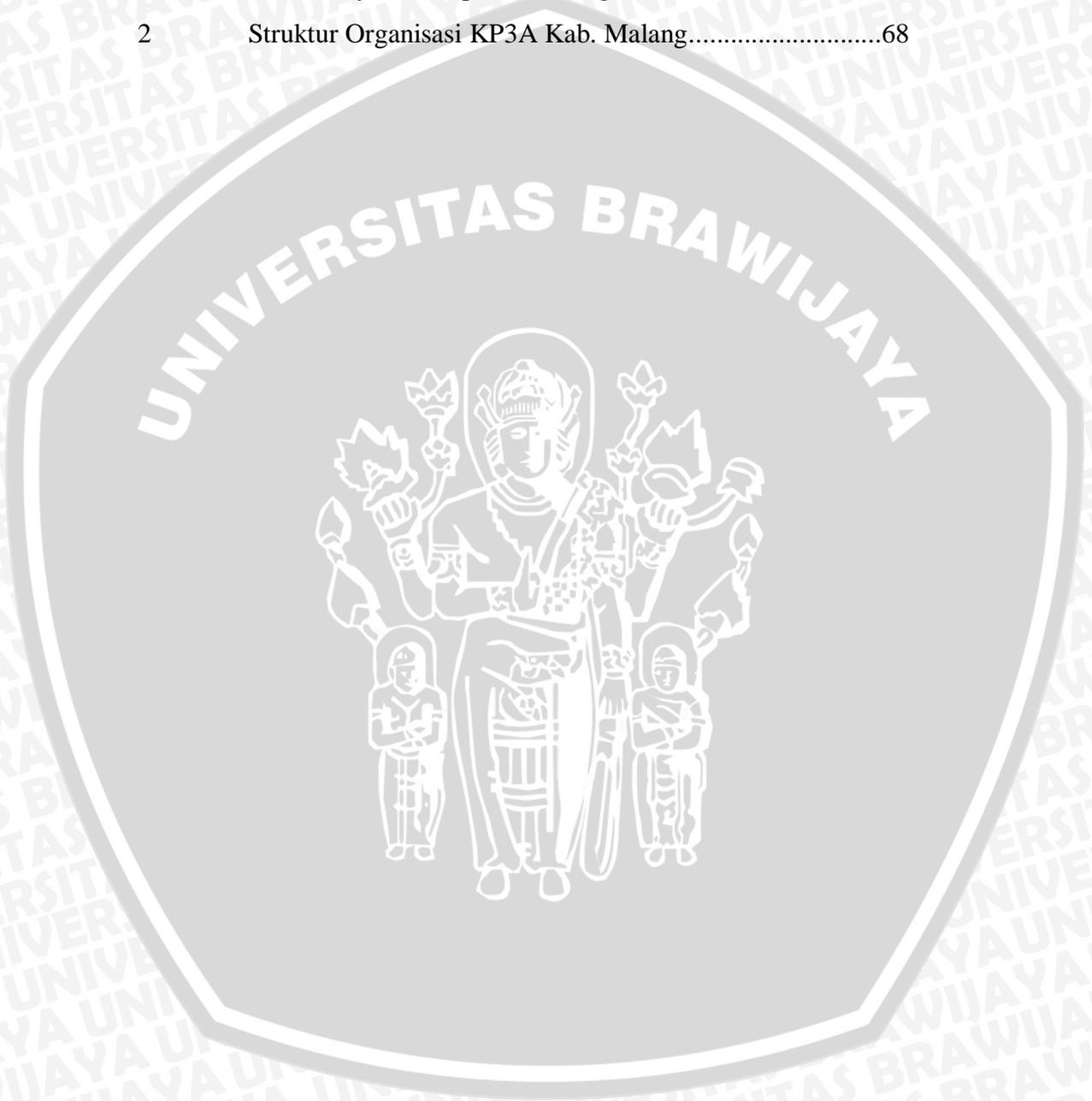
A Kesimpulan .....	109
B Saran .....	112

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	114
-----------------------------	-----



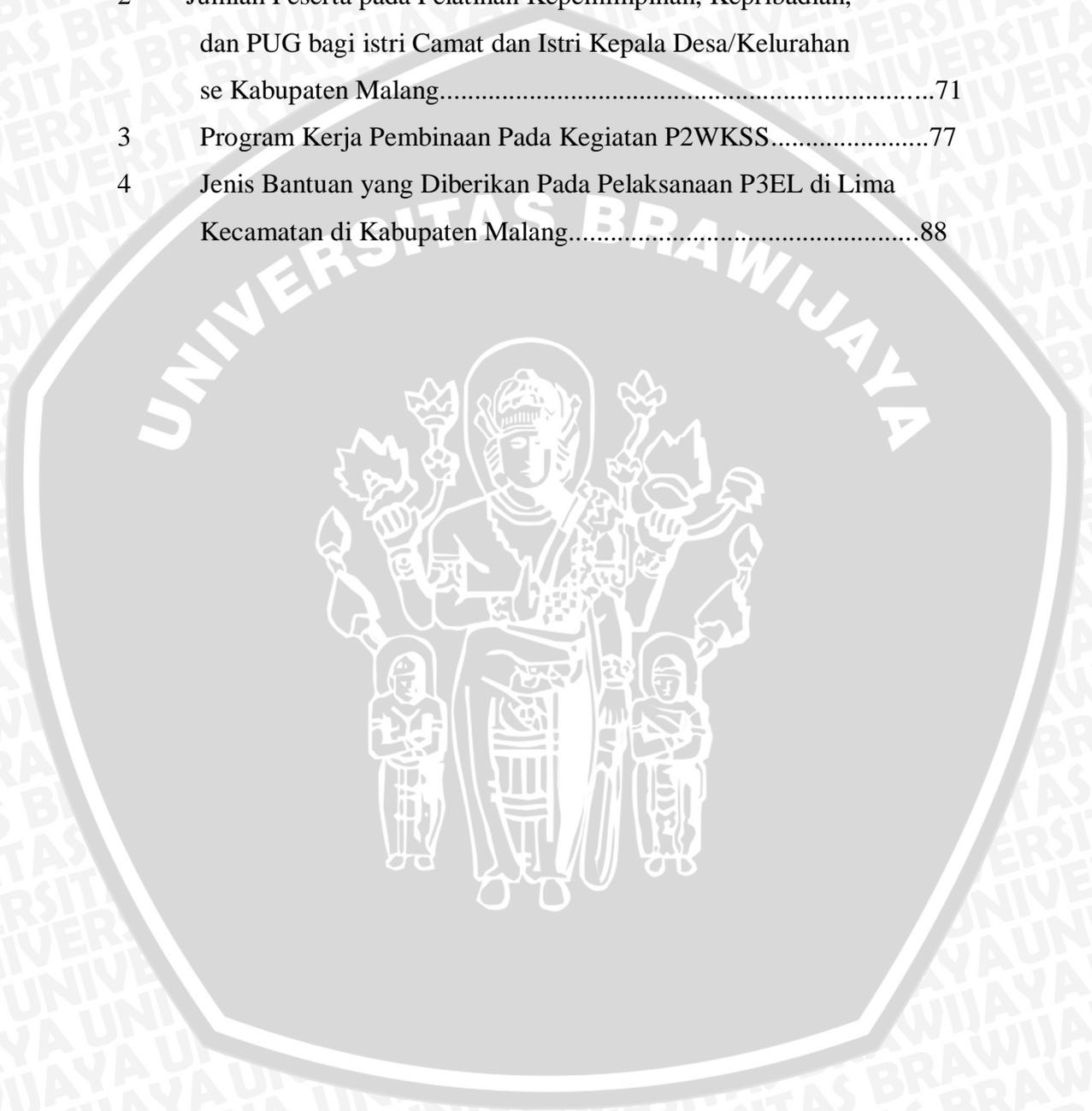
### DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal.
1	Peta Wilayah Kabupaten Malang.....	59
2	Struktur Organisasi KP3A Kab. Malang.....	68



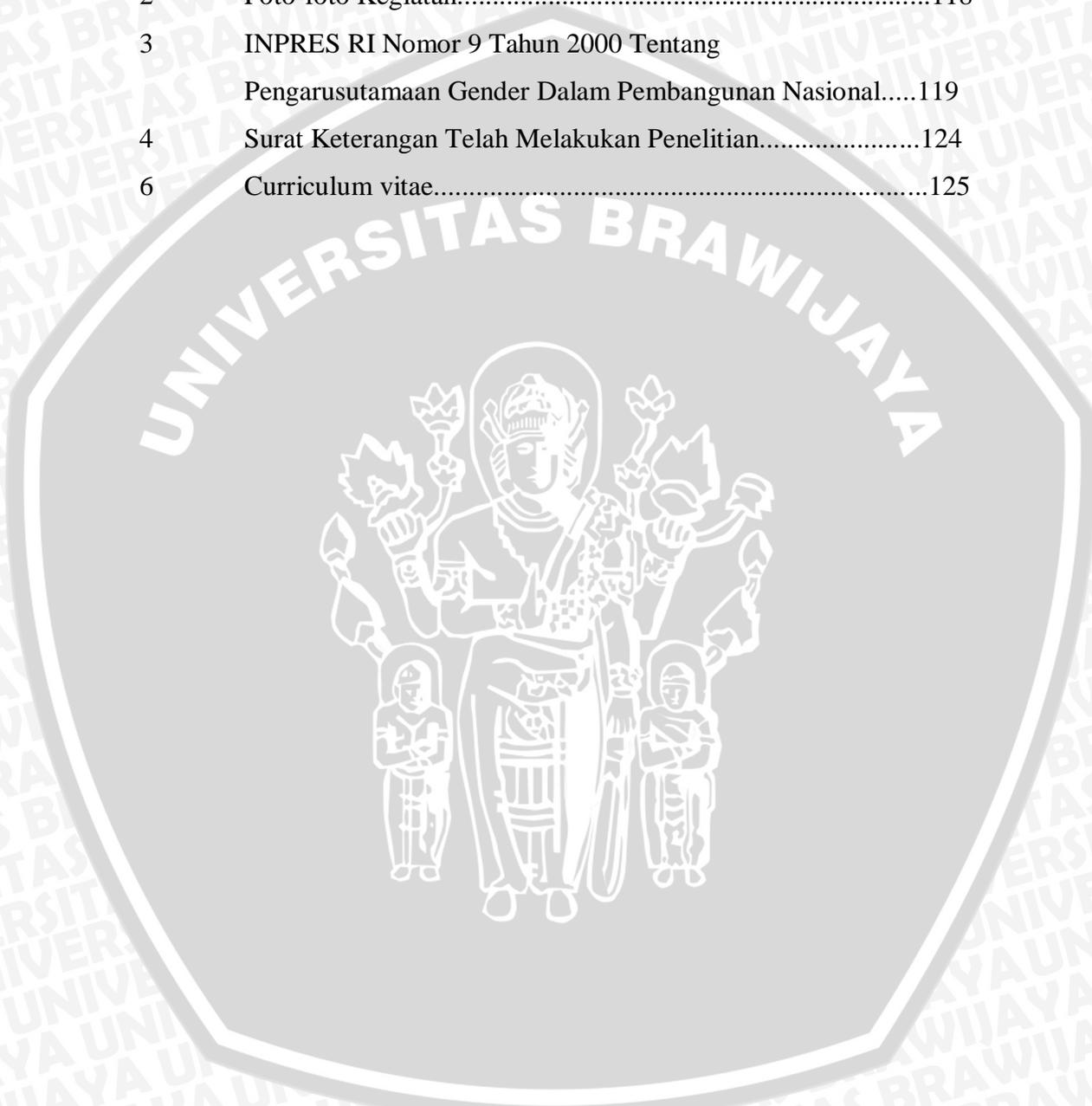
**DAFTAR TABEL**

Tabel	Hal.
1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Malang.....	60
2 Jumlah Peserta pada Pelatihan Kepemimpinan, Kepribadian, dan PUG bagi istri Camat dan Istri Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Malang.....	71
3 Program Kerja Pembinaan Pada Kegiatan P2WKSS.....	77
4 Jenis Bantuan yang Diberikan Pada Pelaksanaan P3EL di Lima Kecamatan di Kabupaten Malang.....	88



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Hal.
1 Surat Pengantar Melakukan Penelitian.....	117
2 Foto-foto Kegiatan.....	118
3 INPRES RI Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.....	119
4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	124
6 Curriculum vitae.....	125



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan manusia, hal ini akibat dari keinginan manusia untuk selalu berkembang dan maju dari waktu ke waktu. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek. Dan merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada waktu tertentu di masa depan (Siagian, 2005:5).

Tujuan pembangunan adalah untuk memperbesar pilihan atau akses dalam memperoleh ilmu pengetahuan, mendapatkan gizi dan nutrisi yang lebih baik, mendapatkan pelayanan kesehatan, keamanan, mata pencaharian, perlindungan dari kejahatan keamanan dan kekerasan fisik, kebebasan berbudaya dan berpolitik serta berpartisipasi dalam pemerintahan. Seluruh upaya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia berdasarkan pada ukuran kualitas kehidupan, yang pada akhirnya mewujudkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat.

Pembangunan mempunyai arti yang khusus dalam upaya mengubah keadaan suatu bangsa dan negara berkembang menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Indonesia saat ini juga sedang melaksanakan pembangunan yang dikenal dengan sebutan pembangunan nasional yaitu suatu langkah atau tindakan untuk memperbaharui kehidupan nasional bangsa Indonesia. Pembangunan nasional merupakan upaya negara dan bangsa dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia yaitu pembangunan sektor sumber daya manusia yang merupakan salah satu tujuan penting dalam agenda pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari pembangunan sumber daya manusia itu sendiri.

Pembangunan sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam proses pembangunan suatu negara. Sumber daya manusia merupakan suatu peranan dominan dalam upaya peningkatan pembangunan suatu negara baik

dari segi daya saing, baik kapital maupun kelembagaan, semuanya digerakkan oleh sumber daya manusia. Sehingga pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas semakin menjadi tuntutan yang tidak dapat terelakkan. Hal itu akan menjadi penopang utama bagi pembangunan di segala sektor secara mandiri dan berkeadilan bagi bangsa Indonesia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan penduduk, produktivitas, dan kemandirian agar menjadi sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Apabila hal ini terwujud, penduduk akan berubah dari kondisi yang kurang menguntungkan dan menjadi beban pembangunan ke arah penduduk yang memiliki kualitas dan kekuatan pembangunan yang mampu bersaing. Oleh karena itu, untuk dapat mengelola sumber daya manusia Indonesia menjadi sebuah daya saing terhadap bangsa-bangsa lain diperlukan komitmen dan keberpihakan kuat dari pemerintah sebagai regulator sekaligus lokomotif penggerak pengembangan serta pemberdayaan kualitas sumber daya manusia.

Ini berarti pembangunan manusia merupakan manifestasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya yang sistematis. Sebagaimana *United Nations Development Programme* (UNDP) menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam semua proses dan kegiatan pembangunan ([www. tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)). Berdasarkan hal tersebut sejak tahun 1990, UNDP mengeluarkan laporan tahunan perkembangan pembangunan manusia untuk negara-negara di dunia. Salah satu alat ukur untuk melihat aspek-aspek yang relevan dengan pembangunan manusia adalah melalui *Human Development Index* (HDI) yang dikenal dengan istilah IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM meliputi ukuran gabungan dari tiga dimensi tentang pembangunan manusia. Pertama, kesehatan, diukur dengan harapan hidup dari tiap kelahiran dan usia lama hidup. Kedua, pendidikan, diukur oleh tingkat keaksaraan atau melek huruf umur 15 tahun atau lebih. Ketiga, standar hidup diukur dari keseimbangan daya beli dengan penghasilan.

Pembangunan sumber daya manusia hendaknya dilakukan melalui upaya untuk memfasilitasi masyarakat agar mampu mengakses sumber

informasi dan sumber daya pembangunan sehingga masyarakat dapat mendayagunakan seluruh potensinya untuk berperan dan mengendalikan serta memperoleh manfaat dari seluruh proses dan tahap pembangunan. Hal ini penting dilakukan karena peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di dalam maupun diluar negeri, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan penghasilan bagi masyarakat. *United Nation Development Programme* (UNDP) telah mengeluarkan hasil penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2008 pada tanggal 18 Desember 2008. dari hasil penghitungan tersebut Indonesia berada pada peringkat ke-109 dari 179 negara, yang dikategorikan termasuk dalam kategori menengah (*Medium Human Development*) antara peringkat 76 s.d 153 ([www.iklandepok.com](http://www.iklandepok.com)).

Sasaran IPM atau HDI ini pada tahun 2000 oleh para pemimpin dunia melalui PBB disempurnakan menjadi program yang dinamakan Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). MDGs ini merupakan kesepakatan yang telah disepakati oleh 195 kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara anggota PBB dalam Konferensi Tingkat Tinggi Millenium PBB pada bulan September tahun 2000 dengan delapan sasaran utama, yaitu: (a) menghapuskan kemiskinan, (b) pendidikan dasar untuk semua, (c) kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan, (d) menurunkan angka kematian bayi, (e) memperbaiki kesehatan ibu, (f) mencegah HIV-AIDS, malaria dan penyakit lainnya, (g) lingkungan berkelanjutan dan, (h) membangun jaringan kemitraan global.

Dari yang sudah dijelaskan diatas mengenai tujuan dari program *Millennium Development Goals* (MDGs), terdapat sasaran utama mengenai tentang kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan inti yang menentukan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG), mulai dari peningkatan derajat kesehatan dan memberantas penyakit, sampai ke penghapusan kemiskinan dan kelaparan, memperluas pendidikan dan mengurangi angka kematian bayi dan balita, memperluas akses kepada air bersih dan menjamin keberlanjutan

lingkungan. Sehingga strategi pembangunan sumber daya manusia yang utama dilakukan melalui pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia yang berwawasan gender.

Dalam konteks administrasi pembangunan, isu gender merupakan *strategic issue* yang berada dalam ruang lingkup administrasi pembangunan. Oleh karena itu pendekatan gender memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan antar gender di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan tujuan administrasi pembangunan yaitu menciptakan suatu keadaan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan.

Gender di Indonesia sepuluh tahun terakhir ini sudah banyak dan sering diperbincangkan oleh semua golongan masyarakat, tetapi pemahaman masyarakat tentang konsep gender itu sendiri masih banyak yang salah mengartikan ([www.icrp-online.org](http://www.icrp-online.org)). Fatalnya, kesalahpahaman tersebut bukan hanya terjadi di kalangan awam, melainkan terjadi juga di kalangan terpelajar. Istilah gender seringkali disalahartikan dengan istilah jenis kelamin dan lebih rancu lagi gender diartikan dengan jenis kelamin perempuan. Begitu disebut gender yang dibayangkan adalah sosok manusia dengan jenis kelamin perempuan padahal istilah gender mengacu pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Kata gender sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*gender*". Jika dilihat dalam kamus bahasa Inggris tidak secara jelas dibedakan pengertian antara seks dan gender. Karena itu, penting sekali memahami terlebih dahulu perbedaan konsep antara jenis kelamin (*sex*) dan gender. Jenis kelamin (*sex*) merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu bahwa manusia terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang terpisah secara biologis. Menurut handayani dan sugiarti (2008:4) menyatakan:

Laki-laki memiliki fisik yang kuat, otot yang kuat, memiliki jakun, bersuara berat, memiliki penis, testis, sperma, yang berfungsi untuk alat reproduksi dalam meneruskan keturunan. Perempuan dan laki-laki memiliki ciri yang berbeda. Perempuan memiliki hormon yang berbeda dengan laki-laki sehingga terjadi menstruasi, perasaan yang sensitif, serta ciri-ciri fisik dan postur tubuh yang berbeda dengan laki-laki, seperti bentuk pinggul yang lebih besar daripada laki-laki, memiliki vagina, payudara, ovum, dan rahim.

Perbedaan biologis tersebut bersifat kodrati atau pemberian Tuhan dan tidak satupun yang dapat mengubahnya. Diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk dengan jenis kelamin yang berbeda tetapi sesungguhnya dimaksudkan untuk saling melengkapi, saling menghormati, dan saling mengasihi agar tercipta kehidupan yang tenang dan bahagia.

Istilah "gender" pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis (Nugroho, 2008:2). Kemudian menurut Oakley dalam Fakih (1999:71) menuturkan bahwa:

Gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat dari Tuhan. Perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (*sex*) adalah kodrat Tuhan maka secara permanen berbeda dengan pengertian gender. Gender merupakan *behavioral differences* (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Dengan demikian, gender dapat berubah dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis akan tetap tidak berubah.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan.

Dari uraian sebelumnya dapat dengan jelas dibedakan perbedaan antara jenis kelamin (*sex*) dengan gender. Perbedaan gender (*gender differences*) sesungguhnya merupakan hal yang biasa saja sepanjang tidak menimbulkan ketimpangan-ketimpangan gender (*gender inequalities*). Namun, yang menjadi masalah adalah ternyata perbedaan gender ini telah menimbulkan berbagai bentuk ketimpangan atau ketidakadilan baik bagi laki-laki dan perempuan, terlebih lagi bagi perempuan. Secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksi dapat hamil, melahirkan dan menyusui, kemudian muncul yang dinamakan peran gender (*gender role*) dari perempuan sehingga peran gender dianggap tidak menimbulkan permasalahan

dan tidak perlu digugat. Tetapi, yang menjadi permasalahan dan perlu dipertanyakan adalah struktur dari ketidakadilan gender yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender.

Di tingkat dunia, komitmen untuk mengubah relasi gender ke arah yang lebih adil dan setara terlihat sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah-langkah utama dengan menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam piagamnya tahun 1945 dan selanjutnya pada 1946 membentuk *Commission on the Status of Women* atau CSW (Komisi Kedudukan Perempuan). Kemudian, CSW sebagai komisi fungsional *Economic and Social Council* atau ECOSOC berfungsi aktif dalam upaya-upaya peningkatan kedudukan dan peran perempuan selaku mitra sejajar laki-laki sehingga terwujud kesetaraan dan keadilan gender.

Deklarasi dan Program Aksi konferensi ini menegaskan tiga point penting sebagai berikut. Pertama, penegasan Hak Asasi Perempuan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia secara integral (*Women's Rights are Human Rights*). Kedua, penegasan partisipasi penuh dan setara bagi perempuan dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya pada semua tingkat nasional, regional, dan internasional serta penghapusan segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin merupakan tujuan utama masyarakat sedunia. Ketiga, penegasan bahwa kekerasan berbasis gender dan segala bentuknya tidak sesuai dengan martabat dan harga diri manusia serta harus dihapuskan.

Bagi Indonesia sendiri tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan isi deklarasi dan program aksi tersebut karena penegasan Hak Asasi Perempuan sebagai tercantum dalam Deklarasi Wina sejalan dengan ideologi Pancasila khususnya sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Adapun landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 yang menjamin persamaan kedudukan dan hak bagi semua warga negara baik laki-laki dan perempuan, baik di depan hukum dan pemerintahan maupun atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, hukum perundang-undangan nasional mengakui hal tersebut dalam Undang-Undang No. 68 tahun 1958 tentang pengesahan Konvensi Hak Politik Perempuan,

Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, dan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) sudah menjadi isu yang sangat penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia sehingga seluruh negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen tersebut. Upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), di Indonesia dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, UU No. 25 th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional-PROPENAS 2000-2004, dan dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Pelaksanaan PUG diinstruksikan kepada seluruh departemen maupun lembaga pemerintah dan non departemen di pemerintah nasional, provinsi maupun di kabupaten dan kota, untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan, aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program dan kegiatan.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, serta memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

Disadari bahwa keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaat dari hasil pembangunan. Pada pelaksanaannya sampai saat ini peran serta kaum perempuan belum dioptimalkan. Oleh karena itu program pemberdayaan perempuan telah menjadi agenda bangsa sampai saat ini. Penduduk wanita yang jumlahnya 49.9 persen (102.847.415) dari total (206.264.595) penduduk Indonesia pada sensus penduduk tahun 2000 merupakan sumberdaya pembangunan yang cukup besar (www.bps.com).

Partisipasi aktif wanita dalam setiap proses pembangunan akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Kurang berperannya kaum perempuan, akan memperlambat proses pembangunan atau bahkan perempuan dapat menjadi beban pembangunan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena kondisi dan posisi yang kurang menguntungkan dibanding laki-laki. Seperti peluang dan kesempatan yang terbatas dalam mengakses dan mengontrol sumber daya pembangunan, sistem upah yang merugikan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, sehingga manfaat pembangunan kurang diterima kaum perempuan.

Faktor penyebab kesenjangan gender itu sendiri yaitu ada yang dari faktor tata nilai sosial budaya masyarakat, umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (*ideology patriarki*). Peraturan perundang-undangan masih berpihak pada salah satu jenis kelamin dengan kata lain belum mencerminkan kesetaraan gender. Penafsiran ajaran agama yang kurang komprehensif atau cenderung tekstual kurang kontekstual, cenderung dipahami parsial kurang kholistik. Kemampuan, kemauan dan kesiapan perempuan itu sendiri untuk merubah keadaan secara konsisten dan konsekwen. Rendahnya pemahaman para pengambil keputusan di eksekutif, yudikatif, legislatif terhadap arti, tujuan, dan arah pembangunan yang responsif gender. Adanya kesenjangan pada kondisi dan posisi laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan belum dapat menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Selain itu rendahnya kualitas

perempuan dapat mempengaruhi kualitas generasi penerusnya, mengingat bahwa kaum perempuan mempunyai peran reproduksi yang sangat berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia masa depan.

Kesenjangan gender sebagaimana diuraikan di atas, tentu merugikan perempuan. Karenanya, upaya pemberdayaan perempuan secara mutlak diperlukan untuk meningkatkan status dan kedudukan perempuan di berbagai bidang pembangunan. Berbagai indikator penting yang mengukur hal itu disajikan dalam laporan pembangunan manusia yaitu *Human Development Index* (HDI) yang sudah dijelaskan pada bahasan sebelumnya, *Gender-related Development Index* (GDI) dan *Gender Empowerment Index* (GEM). Menurut hasil laporan HDR 2008, Indonesia berada pada peringkat HDI ke-109 dari 179 negara di dunia, dengan angka indeks 0,726. Angka *Gender-related Development Index* (GDI) Untuk Indonesia bernilai 0,719 dan angka *Gender Empowerment Index* (GEM) bernilai 0,441 dengan peringkat 87 dari 108. Tingginya angka HDI bila dibandingkan dengan angka GDI menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan pembangunan gender. Sementara itu rendahnya angka GEM menunjukkan bahwa partisipasi dan kesempatan perempuan masih rendah di bidang politik dan ekonomi.

Dalam rangka memperoleh hasil yang lebih baik, strategi pembangunan sumber daya manusia berwawasan gender akan menjadi salah satu instrumen yang penting dalam penyelenggaraan pembangunan di Indonesia. Pemerintah melalui kementerian negara pemberdayaan perempuan menjabarkan MDGs melalui visi dan misi yang mengarah kepada terciptanya kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Strategi ini terutama diselenggarakan melalui pengarusutamaan gender dalam setiap proses dan tahap pembangunan, yang menjamin bahwa seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan memasukkan dimensi gender. Sesuai dengan Inpres No.9 Tahun 2000 tentang strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional dan panduan pelaksanaannya, dalam

rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Pengarusutamaan gender sebagai suatu strategi diperlukan agar pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil serta responsif gender baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kebijakan publik serta program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat. Pengarusutamaan gender juga merupakan salah satu upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam masyarakat. Pemerintah dengan dukungan masyarakat telah mengembangkan strategi yang dinamakan dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai program pembangunan (Parawansa, 2006:34).

Ketidakadilan gender terjadi semakin luas hampir diseluruh kelompok perempuan di dunia, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Bagi perkembangan di Indonesia, peran perempuan perlu diperhatikan tidak hanya dari keberadaannya, tetapi juga kualitas perannya. Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang perlu di tingkatkan pemberdayaan perempuannya. Ini dapat dilihat dari data penduduk Kabupaten Malang yang terdiri dari 2.393.648 jiwa dengan jumlah kaum perempuan 1.205.832 jiwa dan laki-laki 1.187.816 jiwa (sumber data BPS Maret 2008), terlihat bahwa kaum perempuan menempati persentase yang lebih tinggi dari kaum laki-laki yaitu 50,37 persen. Dengan jumlah tersebut apabila didukung oleh kualitas tinggi, maka perempuan Kabupaten Malang akan menjadi potensi produktif dan modal bagi pembangunan. Tetapi pada kenyataan yang ada sekarang ini adalah kedudukan dan peran perempuan di Kabupaten Malang walaupun telah diupayakan selama dua dasawarsa hasilnya belum memadai dan menggembirakan, hal ini disebabkan selama ini pendekatan pembangunan sumber daya manusianya belum secara adil bagi perempuan dan laki-laki sehingga hal tersebut ikut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender ([www.kppamalangkab.go.id](http://www.kppamalangkab.go.id)).

Satu di antara masalah tersebut adalah masih tingginya angka buta huruf di kalangan perempuan di Kabupaten Malang. Di Kabupaten Malang dari sekitar 11.312 penduduk yang belum bisa baca tulis, 8.253 di antaranya adalah perempuan. Tingginya angka buta huruf di kalangan perempuan menunjukkan rendahnya kualitas hidup perempuan. Ketidakmampuan menulis dan membaca pada perempuan ini akan berdampak langsung terhadap pengetahuan tentang kesehatan gizi, pendapatan (ekonomi), angka kematian ibu dan anak serta peningkatan kualitas anak sebagai generasi penerus bangsa.

Hal ini sangat berkaitan dengan kesadaran dan kepekaan masyarakat baik secara individual maupun kolektif. Kalau masyarakat memandang kondisi ini sebagai suatu kewajaran karena meyakini hal itu terkait dengan takdir, maka mereka akan menerima saja dengan pasrah. Akan tetapi dalam kelompok masyarakat yang kritis tentu akan melihat ketimpangan itu sebagai suatu akibat dari struktur sosial dan budaya yang berlaku. Perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia membawa pengaruh yang tidak kecil terhadap pola relasi gender dalam pembangunan di semua bidang kehidupan.

Berdasarkan uraian diatas menjadikan penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dengan melakukan penelitian yang dengan judul "Pembangunan Sumber Daya Manusia Berwawasan Gender" (Studi Pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembangunan sumber daya manusia berwawasan gender yang dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya manusia berwawasan gender yang dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pembangunan sumber daya manusia berwawasan gender yang dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya manusia berwawasan gender yang dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat memberikan wawasan atau pengetahuan secara khusus kepada peneliti dan secara umum kepada para pembaca
  - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, referensi dan kajian lebih lanjut tentang pengembangan sumber daya manusia berwawasan gender.
2. Secara Praktis
  - a. Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam proses mengembangkan sumber daya manusia yang berwawasan gender.
  - b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, serta bermanfaat untuk dapat mengetahui langkah-langkah yang diambil Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Berwawasan Gender di Wilayah Kabupaten Malang.
  - c. Diharapkan dapat membuka wawasan dan pengetahuan tentang upaya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Berwawasan Gender di Wilayah Kabupaten Malang, yang pada hakekatnya bermanfaat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan agar sesuatu yang dibahas pada masing-masing bab dalam skripsi ini dapat mudah diketahui dan dipahami secara jelas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan dijadikan dalam lima pokok bahasan yang semuanya merupakan satu kesatuan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka, bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang berhubungan dengan tema penelitian, sehingga dengan pedoman pada landasan teori tersebut maka permasalahan yang ada akan dipecahkan dengan baik dan benar.

Kemudian, bab ketiga merupakan metode penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian, antara lain: jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian serta metode analisis data.

Selanjutnya, bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan pembahasan dan analisis terhadap hasil penelitian yang dikaitkan dengan dasar-dasar teori yang telah dijabarkan pada tinjauan pustaka.

Dan yang terakhir merupakan bab kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran dari hasil penelitian yang dapat dipertimbangkan pihak-pihak terkait dan merupakan penutup dalam penulisan skripsi ini.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Administrasi Pembangunan

#### 1. Definisi Pembangunan

Definisi pembangunan menurut Nasution (1988:35) disebutkan bahwa pembangunan merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Sedangkan menurut Tjokrowinoto dalam Suryono (2004:21) yang menyimpulkan beberapa definisi pembangunan sebagai citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) yaitu sebagai berikut:

- a. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
- b. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
- c. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*).
- d. Pembangunan memperoleh sifat dan konsep *transcendental*, sebagai *metadisciplinar*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi yaitu *phenomenon the ideology of developmentalism*.
- e. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara semakin meningkat.
- f. Pembangunan menjadi *culture specific*, *situation specific* dan *time specific*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dan berencana untuk menjadikan atau mengerjakan sesuatu hal dengan mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, sehingga berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Di negara yang sedang berkembang dalam melakukan pembangunan hingga saat ini terdapat tiga jenis strategi yang digunakan yaitu pertama, strategi pertumbuhan (*growth strategy*) didasarkan pada asumsi efek tetesan ke bawah atau *trickle down effect*, pelaksanaan pembangunan di negara sedang berkembang penekanannya pada pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan nasional. Penerapan konsep pertumbuhan dalam pelaksanaan pembangunan berorientasi pada

pertumbuhan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan yang sangat pesat namun belum ada aspek pemerataan. Kedua, strategi kesejahteraan (*welfare strategy*) yang bertitik tolak pada asumsi bahwa merekalah (pemerintah) yang menentukan apa yang perlu bagi masyarakat dan mempunyai dana untuk tujuan itu serta penerapan pembangunan kesejahteraan cenderung pelaksanaannya bersifat sentralistik (*top down*), sehingga hubungan ketergantungan antara rakyat dengan proyek-proyek pembangunan yang pada akhirnya mengakibatkan tidak adanya pro aktif dari masyarakat karena tidak adanya partisipasi yang nyata. Ketiga, strategi responsif atau partisipatif. Esensi dari strategi responsif adalah keterlibatan masyarakat membuat keputusan-keputusan dalam setiap tahap aktivitas, yaitu materi dari persiapan hingga pelaksanaan dan evaluasi.

## 2. Definisi Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan salah satu disiplin ilmu dalam ruang lingkup administrasi negara. Telah diketahui pula bahwa fokus analisis administrasi pembangunan adalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa.

Administrasi pembangunan merupakan bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Administrasi pembangunan merupakan pembangunan atau penyempurnaan administrasi negara dan penyempurnaan administrasi bagi penyelenggaraan proses pembangunan. Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan negara sedang berkembang untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial, politik, dan ekonominya agar pembangunan dapat berhasil. Administrasi pembangunan bersumber dari administrasi negara, sehingga kaidah umum administrasi negara berlaku pula pada administrasi pembangunan. Namun administrasi pembangunan memberi perhatian lebih luas daripada hanya membahas penyelenggaraan administrasi pemerintahan saja. Administrasi

pembangunan bersifat dinamis dan inovatif, karena menyangkut upaya mengadakan perubahan-perubahan sosial. Dalam upaya itu administrasi pembangunan sangat berkepentingan dan terlibat dalam pengalokasian sumber daya manusia dan pengalokasiannya untuk kegiatan pembangunan.

Definisi administrasi pembangunan mencakup dua pengertian yaitu administrasi dan pembangunan. Telah umum diketahui definisi administrasi adalah keseluruhan suatu proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan definisi pembangunan yaitu sebagai rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang dilaksanakan oleh suatu bangsa untuk menuju kesejahteraan bangsa.

Menurut Tilaar dalam Suryono (2008:20) definisi pembangunan yaitu *pertama*, pembangunan bukanlah semata-mata untuk mencapai tujuan dan target pembangunan itu sendiri tetapi pembangunan itu diadakan untuk memperbaiki taraf hidup manusia. *Kedua* Pembangunan dilaksanakan oleh manusia dan untuk manusia.

Dengan adanya dua definisi pembangunan yang disebutkan diatas, yang saling melengkapi, pembangunan yang berwajah manusiawi mencakup kualitas manusia yang menguasai teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidupnya, mengelola sumber daya alamnya, juga manusia yang dapat dan mau bekerja keras, yang bertanggung jawab atas kelestarian lingkungannya. Pembangunan manusia seperti inilah yang diharapkan bisa membangun manusia yang mempunyai nilai moralitas tinggi yang membentuk suatu masyarakat yang madani.

Sehingga dapat disimpulkan definisi administrasi pembangunan adalah seluruh rangkaian usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. (Siagian, 2005:5).

### 3. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan

Pendekatan administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian administrasi oleh negara untuk mewujudkan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Dalam proses tersebut diperlukan mengenai ruang lingkup administrasi pembangunan. Ruang lingkup administrasi pembangunan menurut Tjokroamidjodjo (1988:15) yaitu:

- a. Penyempurnaan administrasi negara, meliputi:
  1. Kepemimpinan, koordinasi, pengawasan
  2. Administrasi fungsional kepegawaian, keuangan, sarana-sarana lain. Dan perlembagaan arti sempit.
- b. Penyempurnaan administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meliputi:
  1. Proses perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pemabangunan. Sering tercermin dalam suatu rencana pembangunan atau suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten (dalam proses administrasi maupun proses politik)
  2. Tata pelaksanaannya secara efektif.

### 4. Penyelenggaraan Pembangunan

Suatu negara khususnya negara berkembang, melakukan berbagai upaya pembangunan. Pembangunan yang dilakukan mencakup dari berbagai bidang kehidupan. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pembangunan itulah menurut Nasution (1988:53) ada lima tataran yang harus diketahui, yaitu:

- a. Pembangunan pada dirinya mengandung perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi yang kini ada.
- b. Pengertian pembangunan inheren dengan pertumbuhan. Yang di maksud dengan pertumbuhan disini adalah kemampuan suatu Negara bangsa untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
- c. Pembangunan ialah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya keadaan yang lebih baik, yang didambakan masyarakat serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung.
- d. Jika diterima pendapat bahwa pembangunan merupakan rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar, maka pembangunan itu didasarkan pada suatu rencana yang tersusun secara rapi dalam kurun waktu tertentu.
- e. Pembangunan bermuara pada titik akhir tertentu.

## B. Manajemen Sumber Daya Manusia

### 1. Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang penting dalam proses pembangunan. Dalam konsep pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada pembangunan manusia seutuhnya. Sumber daya manusia akan sangat menentukan bagi keberhasilan suatu pembangunan karena manusia merupakan subyek pelaku dari pembangunan.

Masalah sumber daya manusia merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh Negara-negara yang sedang membangun, termasuk Indonesia. Dengan demikian pengelolaan sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sebab untuk melaksanakan pembangunan kita perlu memanfaatkan segala sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia. Menurut Ndraha (1999:7) definisi sumber daya manusia adalah penduduk yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasional. Namun jelas yang dimaksud dengan organisasi di situ bukan hanya industri atau perusahaan tetapi juga organisasi diberbagai bidang.

Menurut Nawawi (2005:26) menjelaskan secara luas tentang pengertian sumber daya manusia adalah:

Manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi, potensi manusiawi sebagai penggerak dalam mewujudkan eksistensinya, dan potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Dalam suatu organisasi, unsur sumber daya manusia merupakan titik sentral keberhasilan penyelenggaraan kegiatan organisasi. Artinya sumber daya manusia merupakan penentuan jalan atau tidaknya suatu organisasi. Bahkan sebaiknya apapun sistem yang telah disusun atau selengkap apapun sarana dan prasarana kerja yang tersedia tanpa didukung oleh keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan memadai maka berbagai kelengkapan tersebut tidak akan berarti banyak bagi keberadaan organisasi. Dengan sumber daya manusia, sistem sarana

dan prasarana yang ada dapat terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan bagi percepatan penyelesaian tugas.

## 2. Manajemen Sumber Daya Manusia

Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah sebuah kebijakan dan praktik untuk menentukan aspek "manusia" atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan, serta penilaian (Dessler, 2003:2).

Sedangkan French mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi dan masyarakat (Handoko, 2001: 3).

Dengan menelaah berbagai definisi manajemen sumber daya manusia diatas, maka dapat disimpulkan tiga hal penting yaitu: Pertama, terdapat dua kelompok definisi manajemen sumber daya manusia, yakni definisi makro dan definisi mikro yang keduanya saling berkaitan. Kedua, manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai seni untuk menyelesaikan permasalahan pegawai melalui orang lain. Dan ketiga manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi-fungsi: pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia atau pemeliharaan, serta pemutusan hubungan kerja.

Dalam konsep dan teori manajemen sumber daya manusia dijelaskan tentang perkembangan teori nya, mulai dari teori tradisional, hubungan kemanusiaan, dan sumber daya manusia yang dilihat dari aspek-aspek asumsi, kebijakan, dan harapan. Pada model tradisional diasumsikan bahwa:

- a. Pekerjaan tidak begitu disukai oleh sebagian besar pegawai
- b. Apa yang dikerjakan pegawai tidak penting daripada apa yang diperoleh dari pegawai
- c. Hanya beberapa orang yang bekerja secara kreatif menentukan tujuan dan mengawasi diri.

Pada model hubungan kemanusiaan asumsinya adalah pegawai merasa ingin berguna, ingin diakui sebagai individu, dan kebutuhannya itu memotivasi untuk lebih mengutamakan pekerjaan daripada hanya sekedar untuk mendapatkan uang. Sedangkan pada model yang terakhir yaitu pada model sumber daya manusia adalah:

- a. Sebagian besar orang lebih kreatif, tanggung jawab, dan mampu mengontrol diri sendiri.
- b. Pekerjaan merupakan sesuatu yang menyenangkan dan menyumbang tentang hal-hal yang baru.

Manajemen sumber daya manusia dalam organisasi berkaitan dengan berbagai kegiatan organisasi seperti seleksi pegawai, penerimaan, pelatihan dan pengembangan, penggajian, evaluasi, promosi dan pemutusan hubungan kerja yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti lingkungan organisasi secara internal dan eksternal.

Bidang sumber daya manusia atau disebut juga dengan personalia memiliki dua fungsi pokok. Dimana fungsi pertama berkaitan dengan fungsi kedua. Fungsi tersebut menurut Handoko (2001:4) adalah:

- a. Untuk menjalin kerjasama dengan pengembangan dan administrasi berbagai kebijaksanaan yang mempengaruhi orang-orang yang membentuk organisasi.
- b. Untuk membantu para manajer mengelola sumber daya manusia.

### **3. Perencanaan Sumber Daya Manusia**

Perencanaan sumber daya manusia didefinisikan sebagai proses membuat keputusan tentang kebutuhan tenaga kerja untuk waktu yang akan datang, apa saja yang akan dilakukan, dan siapa yang akan melakukan.

Menurut Mangkunegara (2008:6) definisi perencanaan sumber daya manusia diartikan sebagai:

Suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan pengembangan, pengimplementasian, dan pengendalian kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan perencanaan organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai yang tepat dan bermanfaat.

Perencanaan sumber daya manusia harus memiliki tujuan yang berdasarkan atas kepentingan individu, organisasi, dan nasional. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah menghubungkan sumber daya manusia yang ada untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu didalam perencanaan sumber daya manusia terdapat tiga kepentingan-kepentingan untuk merencanakan pembangunan sumber daya manusia yaitu:

a. Kepentingan Individu

Perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi setiap individu pegawai, karena dapat membantu meningkatkan potensinya begitupula dengan keputusan pegawai yang dapat dicapai melalui perencanaan karier.

b. Kepentingan Organisasi

Perencanaan sumber daya manusia sangat bermanfaat bagi organisasi dalam mendapatkan calon pegawai yang memenuhi kualifikasi. Dengan adanya perencanaan sumber daya manusia, maka akan dapat dipersiapkan calon-calon sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk kemajuan di masa yang akan datang.

c. Kepentingan Nasional

Perencanaan sumber daya manusia sangat bermanfaat bagi kepentingan nasional, karena sumber daya manusia yang memiliki potensi tinggi dapat dimanfaatkan pada nantinya oleh pemerintah untuk membantu meningkatkan produktivitas nasional. Mereka dapat dijadikan sebagai sumber daya manusia yang ahli dalam bidang-bidang tertentu untuk membantu melaksanakan keberhasilan program pemerintah.

Perencanaan sumber daya manusia merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengadakan perubahan ke arah yang positif. Perencanaan sumber daya manusia menekankan penyesuaian pada perkembangan organisasi. Dengan demikian konsep perencanaan sumber daya manusia akan memiliki tingkat kualitas yang tinggi.

#### 4. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang penting bagi keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Menurut Syarif (2002:27) sumber daya manusia yang perlu diwujudkan adalah sumber daya manusia dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dicirikan antara lain dengan kejujuran dan akhlak mulia.
- b. Menghargai waktu dan mempunyai etos kerja dan disiplin yang tinggi.
- c. Berbudaya Iptek, sehingga mampu menerapkan, mengembangkan dan menguasai Iptek yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.
- d. Mempunyai wawasan kewiraswastaan dan kemampuan manajemen yang handal.
- e. Mempunyai wawasan kebangsaan yang mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa.
- f. Mempunyai tanggung jawab dan solidaritas social yang tinggi.
- g. Mempunyai kesehatan fisik yang prima sehingga dapat berpikir dan bekerja secara produktif
- h. Kreatif, produktif, efisien, dan berwawasan keunggulan.
- i. Mempunyai daya juang yang tinggi.
- j. Mempunyai ketangguhan moral yang kuat sehingga tidak mudah terkena dampak negatif dari arus negatif globalisasi.

Adapun kualitas sumber daya manusia itu sendiri adalah kualitas yang dapat menghasilkan suatu dampak positif bagi pembangunan nasional, antara lain melalui peningkatan kemampuan daya saing, kemampuan berkarya secara inovatif, kreatif dan lainnya (Raharjo, 1995:9). Di dalam setiap gerak langkah pembangunan senantiasa diharapkan adanya hasil yang optimal. Hal ini bisa terwujud bila didukung dengan sumber daya yang cukup, baik materi maupun non materi.

### C. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### 1. Pengembangan Manusia

Manusia merupakan sumber daya produksi yang menempati posisi penting dalam pembangunan. Dari manusia dapat diperoleh sumbangan tenaga maupun ide-ide pemikiran dan gagasan yang berasal dari pemikirannya. Konsep pengembangan manusia pada dasarnya banyak dibahas didalam ilmu psikologi. Terutama ilmu psikologi perkembangan

yang membicarakan pengembangan atau perubahan manusia selama rentang hidupnya, yang mencakup aspek pengembangan atau perubahan fisik, kognitif, dan psikologikal. Menurut Papalia dalam Suryono (2008:7) mengatakan bahwa pengembangan manusia merupakan kajian keilmuan terhadap cara-cara perubahan manusia secara kuantitatif dan kualitatif yang tidak berubah sepanjang waktu. Perubahan kuantitatif yang dimaksud adalah perubahan nomor atau jumlah seperti tinggi dan berat badan. Sedangkan perubahan kualitatif adalah perubahan yang menyangkut perubahan dalam struktur dan organisasi, misalnya dalam kemampuan berbicara sebagai suatu fenomena baru.

Teori-teori perkembangan manusia yang perlu dipelajari dalam kaitannya dengan pengembangan manusia adalah tentang teori psikoanalitis yang menekankan pada kekuatan-kekuatan yang memotivasi perilaku. teori pengembangan manusia pada dasarnya merupakan respons terhadap kejadian-kejadian dari eksternal. Teori ini memfokuskan pada perilaku-perilaku dan perubahan-perubahan kuantitatif yang dapat diamati, yaitu perilaku dapat diubah melalui "*classical or operant conditioning*". Sedangkan teori lain yang disebut dengan teori kognitif sebaliknya lebih menekankan pada perubahan kualitatif yang melihat manusia sebagai pelaku aktif perubahan yang dimilikinya. *United Nation Development Program* (UNDP) menjelaskan bahwa pengembangan manusia merupakan usaha untuk mengembangkan gagasan mengenai pengembangan manusia sebagai proses memperluas pilihan manusia. Pada dasarnya ada tiga pilihan yang paling pokok dari seorang manusia, yaitu kesehatan, mendapatkan pengetahuan, serta mendapatkan sumber daya.

Pengembangan manusia memiliki dua sisi yaitu pembinaan kapabilitas manusia dan kemampuan menggunakan kapasitas manusia itu. Pengembangan manusia pada dasarnya tertuju pada peningkatan kualitas dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan kualitas manusia itu perlu untuk dikembangkan, baik itu nantinya dipelopori oleh pemerintah maupun keinginan dari tiap manusia itu untuk meningkatkan kualitasnya sendiri. Pengembangan manusia terdiri dari tiga

bagian pokok yaitu globalisasi ekonomi, pengembangan kependudukan, dan kualitas lingkungan global.

Pada bagian pertama tentang globalisasi ekonomi. Perkembangan ekonomi lebih menekankan pada materialisme sehingga mengakibatkan globalisasi budaya yang nantinya akan mengancam ciri khas budaya nasional. Globalisasi ekonomi juga dapat memasuki permasalahan mengenai kualitas pembangunan yang seharusnya ditempuh oleh negara berkembang.

Bagian kedua dikemukakan bahwa penduduk dunia diramalkan akan bertambah jumlahnya yang disebabkan kepada menurunnya tingkat kematian yang lebih cepat daripada turunnya tingkat kelahiran di negara-negara berkembang. Pasangan usia subur yang semakin banyak adalah kelompok penduduk usia muda yang mencari kesempatan kerja atau fasilitas pendidikan.

Terakhir, bagian ketiga menjelaskan tentang kualitas lingkungan global. Sesungguhnya pada proses pembangunan tidak saja menghasilkan barang dan jasa yang berguna untuk seluruh manusia, tetapi telah menyebabkan pula penurunan kualitas lingkungan global. Menurunnya kualitas global disebabkan juga oleh adanya pencemaran gas karbondioksida dan metan yang dihasilkan dari gas industri, energi, maupun dari kendaraan.

## **2. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Konsep pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini berbeda dengan konsep pengembangan manusia. Pengembangan sumber daya manusia lebih kepada usaha peningkatan terhadap kualitas manusia baik secara fisik maupun mental. Mengkaji tentang pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah hal yang penting, dimana secara mendasar kajian ini dilatar belakangi tentang pentingnya keselarasan antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Diketahui bahwa pada abad sekarang manusia telah melakukan dua kesalahan besar yang telah dilakukan yaitu dengan mengeksploitasi sumber daya alam secara

semena-mena dan telah mengabaikan dimensi manusiawi dalam mengembangkan teknologi dan pemanfaatannya.

Penggunaan istilah pengembangan sumber daya manusia telah banyak dikemukakan oleh beberapa ahli. Salah satu pendapat yang dapat diketahui yaitu pendapat dari Andrew dalam Mangkunegara (2008:50) menyatakan bahwa:

Pelatihan (*training*) adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi, pegawai non manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan yang ter batas. Sedangkan pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi yang pegawai manajerialnya mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk mencapai tujuan yang umum.

Sedangkan definisi pengembangan manusia menurut Notoadmodjo (1998:2) dibagi menjadi dua, yaitu:

Pertama, pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan pembangunan bangsa. Proses peningkatan disini mencakup perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia. Kedua, pengembangan sumber daya manusia secara mikro adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga kerja atau karyawan untuk mencapai hasil yang optimal.

Dengan demikian, istilah pelatihan ditujukan pada pegawai pelaksana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, sedangkan pengembangan ditujukan kepada pegawai tingkat manajerial untuk meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan memperluas *human relation*.

Proses pengembangan sumber daya manusia adalah peningkatan kualitas serta kemampuan manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan SDM untuk mencapai hasil yang optimal. Pengembangan sumber daya manusia dirasakan semakin penting manfaatnya karena tuntutan pekerjaan atau jabatan sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan diantara organisasi. Pengembangan sumber daya manusia berdasarkan pada pengembangan pendidikan dan

pengembangan pembangunan. Pendidikan dikategorikan sebagai salah satu proses sadar akan pengembangan kemampuan manusia. Pendidikan disini berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan potensi manusia yang dimiliki oleh setiap individu. Sehingga pendidikan tidak saja berfungsi untuk mengembangkan kemampuan manusia, tetapi pendidikan dimaknai sebagai upaya untuk mencocokkan kecakapan, keterampilan, atau keahlian manusia sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Posisi pentingnya pendidikan khususnya pendidikan nasional sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan manusia dan masyarakat untuk menuju manusia berkualitas yang di dalam lingkungan dapat menjadi manusia yang menjunjung tinggi moralitas. Pada hakikatnya pendidikan nasional merupakan suatu proses pemanusiaan dalam totalitas kondisi yang diciptakan oleh masyarakat, orang tua, dan negara. Pendidikan dan pendidikan nasional juga memiliki fungsi mempertahankan dan mengembangkan identitas nasional supaya setiap manusia bisa bertahan di dalam masyarakat global yang antara lain ditandai oleh masyarakat yang didasarkan pada kemampuan dan kehidupan masyarakat dalam dunia yang tanpa batas. Sehingga pada nantinya manusia tersebut menunjukkan kualitasnya untuk dapat bertahan dalam kehidupan nasional maupun internasional.

Menurut Muhadjir dalam Suryono (2008:17) menempatkan kualitas manusia sebagai objek pengembangan sumber daya manusia itu menggunakan dua indikator yaitu indikator instrumental dan indikator substansial. Indikator instrumental menyangkut tentang kreativitas, kebebasan, tanggung jawab, dan kemampuan produktif. Sedangkan indikator substansial memiliki tujuh aspek yang antara lain mencakup sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, ilmu, dan fisik. Kedua indikator ini dapat digunakan untuk melihat keberhasilan dari keberhasilan pengembangan kualitas manusia secara bersamaan. Keberhasilan pengembangan kualitas manusia itu biasanya ditunjukkan dalam bentuk pendapatan atau penghasilan, pendidikan, kesehatan, keimanan, ketangguhan fisik, ketangguhan mental, dan tingkat budaya atau seni.

Studi tentang pengembangan sumber daya manusia memerlukan wawasan transdisipliner, yaitu kemampuan untuk memahami secara komparatif berbagai ilmu yang berdekatan dan meluas baik dalam objek materilnya maupun dalam objek formal. Manusia merupakan objek materil yang berada diruang lingkup ilmu biologi, psikologi, pendidikan, dan filsafat. Manusia dalam kehidupan masyarakat menjadi objek materil yang berada diruang lingkup ilmu sosiologi, psikologi sosial, antropologi, manajemen, politik, dan beberapa ilmu lainnya. Sedangkan objek formal, pengembangan sumber daya manusia adalah satuan agregatif kualitas sumber daya manusia yang berupa klaster dengan berbagai kriteria seperti spesifikasi keahlian, jenjang keahlian, strata sosial, etnik, lokasi, tingkat perkembangan suatu negara, atau klaster dengan kriteria lainnya.

Kualitas sumber daya manusia dapat mengacu pada indeks pembangunan manusia, indeks kemiskinan, dan pengukuran tingkat pemberdayaan perempuan. Juga dapat mengacu pada indeks penghasilan dalam negeri, kemampuan daya beli masyarakat, kesehatan, kependudukan, pendidikan, dan komunikasi. Pengembangan sumber daya manusia berkualitas merupakan masalah masa depan dan masalah sosial pengembangan sumber daya manusia. Prospek masa depan pengembangan sumber daya manusia memiliki kaitannya dengan studi tentang pemberdayaan masyarakat sampai kepada pembuatan perencanaan pembangunan. Mengenai masalah sosial pengembangan sumber daya manusia ini ada tiga macam masalah sosial yaitu masalah sosial individu, institusional, dan sistemik. Masalah sosial individu dipecahkan lewat aturan individu. Masalah sosial institusional dipecahkan lewat aturan institusi. Sementara itu masalah sosial sistemik dipecahkan lewat pembuatan peraturan dan undang-undang.

### **3. Komponen-komponen Pelatihan dan Pengembangan SDM**

Menentukan komponen pelatihan dan pengembangan merupakan hal yang penting untuk dilakukan sebelum memulai pelaksanaan dari pelatihan dan pengembangan tersebut. Ini bertujuan untuk menentukan apa

saja yang kita lakukan untuk membuat proses pelatihan dan pengembangan ini menghasilkan sumber daya yang berkualitas.

Adapun komponen-komponen yang diperlukan dalam pelatihan dan pengembangan menurut Mangkunegara (2008:51) yaitu:

- a. Tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan harus jelas dan tepat sasaran
- b. Para pelatih harus ahli di dalam bidangnya (profesional)
- c. Materi yang diberikan harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai
- d. Metode pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan para sumber daya manusia yang menjadi peserta

#### **D. Gender**

##### **1. Konsep Gender dan Jenis Kelamin (Seks)**

Disadari bahwa isu gender merupakan isu yang sepuluh tahun terakhir ini menjadi bahasan disetiap analisis sosial maupun menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial serta menjadi topik penting dalam setiap perbincangan mengenai pembangunan. Dari kondisi yang ada saat ini, perlu diamati bahwa masih sering terjadi ketidakjelasan maupun kesalahpahaman tentang pengertian gender dalam kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan. Setidak-tidaknya ada beberapa penyebab terjadinya ketidakjelasan dan kesalahpahaman itu.

Kata gender sebenarnya tidak ada di dalam kamus bahasa Indonesia, karena sesungguhnya kata gender berasal dari bahasa Inggris. Jika dilihat dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas pula pengertian antara *seks* dan *gender* keduanya disrtikan sebagai jenis kelamin.

Untuk memahami konsep gender maka harus dapat dibedakan antara kata gender dan *seks* (jenis kelamin). Konsep *seks* (jenis kelamin) adalah merupakan pembagian dua jenis kelamin (penyifatan) manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, apabila jenis kelamin laki-laki maka secara biologis akan memiliki penis, memiliki jakala (kala menjing) dan dapat memproduksi sperma. Sedangkan apabila perempuan maka secara biologis akan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan,

memproduksi sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui. Hal tersebut merupakan ciri secara biologis yang melekat pada setiap manusia yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Artinya bahwa secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dirubah ataupun ditukar yang merupakan ketentuan biologis atau yang sering kita katakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan).

Sementara itu konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Menurut Williams dkk dalam Nugroho (2008:3) mengartikan gender sebagai berikut:

Manusia dilahirkan dan dididik sebagai bayi perempuan dan laki-laki supaya kelak menjadi anak perempuan dan laki-laki serta berlanjut sebagai perempuan dewasa dan laki-laki dewasa. Mereka dididik tentang bagaimana cara berperilaku, berperan dan melakukan pekerjaan yang sepantasnya sebagai perempuan dan laki-laki dewasa. Mereka dididik bagaimana berelasi diantara mereka, sikap-sikap yang dipelajari inilah yang pada akhirnya membentuk identitas diri dan peranan gender dalam masyarakat.

Sedangkan definisi gender juga dapat diartikan sebagai peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya.

Dari berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa gender bukanlah kodrat atau ketentuan Tuhan karena gender berkaitan dengan proses keyakinan tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan diharapkan untuk bersikap, bertindak, dan berperan sesuai dengan tata nilai yang terstruktur serta ketentuan sosial dan budaya dimana mereka berasal. Jadi, gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat dan dikonstruksikan masyarakat diberbagai kehidupan manusia. Bentuk sosial antara laki-laki dan perempuan itu antara lain, kalau perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, emosional, serta memiliki sifat keibuan. Sedangkan laki-laki kuat,

rasional, jantan, serta perkasa. Tetapi pada kenyataannya sekarang sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan dan berubah dari waktu ke waktu.

## 2. Ketimpangan Gender

Dari uraian sebelumnya dapat dengan jelas dibedakan antara perbedaan gender dengan jenis kelamin (*seks*). Dengan kondisi saat ini masih menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin dapat menyebabkan perbedaan gender (*gender differences*) dimana kaum perempuan itu dianggap tidak rasional, emosional, dan lemah lembut. Sedangkan laki-laki dianggap memiliki sifat rasional, kuat dan perkasa.

Sejarah perbedaan gender antara manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan sebenarnya telah terjadi melalui proses yang panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksikan secara sosial atau kultural baik melalui ajaran keagamaan maupun melalui negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi sebuah ketentuan Tuhan yang tidak bisa dirubah. Sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat manusia yang terlahir dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

Perbedaan gender sebenarnya bukan sebuah masalah sepanjang perbedaan itu tidak menimbulkan adanya ketidakadilan gender (*inequalities*). Namun kemudian yang menjadi masalah adalah ternyata perbedaan gender itu telah menimbulkan berbagai ketidakadilan baik, bagi kaum laki-laki dan terutamanya yaitu bagi kaum perempuan. Sejak dulu banyak mitos-mitos yang menjadi penyebab ketidakadilan gender, misalnya ada mitos yang mengatakan bahwa perempuan itu konco wingking (teman yang ada dibelakang laki-laki). Kebanyakan mitos-mitos yang muncul dikalangan masyarakat inilah yang sebenarnya lebih menguntungkan kaum laki-laki dan mendiskreditkan kaum perempuan.

Beberapa contoh yang menjadi faktor penyebab ketidaksetaraan gender diatas sebenarnya merupakan akibat dari negara kita yang

menganut sistem patriarki, yaitu yang berkuasa adalah bapak. Sistem hukum ini menggambarkan konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat, dalam pemerintahan, militer, pendidikan, industri, dan lain sebagainya (Handayani dan Sugiarti, 2008:11).

Selain sistem hukum patriarki, manifestasi ketidakadilan gender juga sudah tersosialisasikan kepada kaum laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan ketidakadilan tersebut merupakan kebiasaan dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender seolah-olah merupakan kodrat dan akhirnya diterima masyarakat umum. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan. Agar dapat memahami perbedaan gender yang telah menyebabkan ketidakadilan gender maka dapat dilihat dari berbagai manifestasinya sebagai berikut:

a. Gender dan Marginalisasi

Sesungguhnya proses marginalisasi yang terjadi dalam masyarakat dan negara merupakan sebagai akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian misalnya penggusuran, bencana alam atau proses eksploitasi. Dan bentuk marginalisasi yang paling dominan terjadi pada satu jenis kelamin tertentu, yaitu kaum perempuan yang disebabkan oleh gender.

Ada berbagai macam bentuk mekanisme dari proses marginalisasi perempuan akibat dari adanya perbedaan gender. Ditinjau dari sumbernya dapat berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, keyakinan tradisi, asumsi ilmu pengetahuan, bahkan berasal dari tafsiran agama. Perbedaan gender ini sebagai akibat dari beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu, serta mekanisme dari proses marginalisasi yang sudah dijelaskan diatas. Misalnya, program dibidang pertanian yaitu adanya revolusi hijau yang secara langsung hanya memfokuskan petani laki-laki sehingga secara ekonomis menyebabkan banyak perempuan desa yang tersingkir

dan menjadi miskin. Serta adanya pelatihan bagi petani yang hanya ditujukan bagi petani laki-laki saja.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah tanpa melalui pertimbangan dari aspek gender, yang berakibat kepada termarginalisasinya perempuan akibat dari program pembangunan yang tidak berwawasan gender.

b. Gender dan Subordinasi

Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap kaum perempuan. Subordinasi adalah anggapan bahwa perempuan tidak penting terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan itu dianggap tidak bisa tampil memimpin. Diskriminasi oleh perempuan pada sektor pekerjaan ini terlihat dengan diidentikkannya jenis-jenis pekerjaan tertentu. Pekerjaan yang dikategorikan sebagai reproduksi dianggap rendah dan menjadi subordinasi dari pekerjaan produksi yang dikuasai kaum laki-laki. Subordinasi terhadap jenis pekerjaan juga tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga saja, tetapi juga terjadi di tingkat masyarakat dan tempat pekerjaan (misalnya, pabrik). Keyakinan gender ternyata ikut menyumbangkan diskriminasi terhadap posisi buruh perempuan dalam struktur perusahaan dan pabrik-pabrik. Bahkan ada indikasi bahwa bias gender dalam bentuk subordinasi terhadap kaum perempuan ini juga terjadi dikalangan organisasi kaum buruh dan gerakan buruh.

Subordinasi yang disebabkan oleh gender terjadi didalam segala macam bentuk yang berbeda dari waktu ke waktu. Dalam kehidupan di masyarakat, rumah tangga, dan bernegara banyak kebijakan yang dikeluarkan tanpa menganggap penting kaum perempuan. Misalnya, masih adanya anggapan bahwa perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi sehingga menimbulkan adanya prioritas utama untuk bersekolah bagi kaum laki-laki. Bahkan pemerintah pernah memiliki peraturan jika suami akan pergi belajar (jauh dari

keluarga) dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi seorang istri yang hendak belajar dan jauh dari keluarga harus mendapat izin dari suami terlebih dahulu.

Hal ini sebenarnya timbul dari kesadaran gender yang tidak adil. Agar perempuan tidak tersubordinasi lagi, maka perempuan harus mengejar berbagai ketertinggalan dari laki-laki untuk meningkatkan kemampuan, kedudukan, peranan, kesempatan, dan kemandirian, serta ketahanan mental baik jasmanim maupun rohani. Dengan demikian perempuan diharapkan dapat memiliki peran sejajar dengan laki-laki sebagai mitra yang seimbang.

#### c. Gender dan Stereotipe

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Dapat dikatakan stereotipe adalah bentuk dari berbagai ketidakadilan dan diskriminasi, sehingga dinamakan pelabelan negatif. Bentuk dari stereotipe salah satunya bersumber dari pandangan gender itu sendiri. Banyak stereotipe yang dikonstruksikan masyarakat sebagai hasil hubungan sosial tentang perbedaan laki-laki dan perempuan.

Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. Oleh karena itu perempuan identik dengan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Bahkan stereotipe ini berakibat bahwa pendidikan kaum perempuan wajar jika dinomorduakan. Maka peluang perempuan untuk bekerja diluar pun sangat terbatas, bahkan ada perempuan yang berpendidikan tetapi tidak bisa menerapkan pendidikannya tersebut. Kemudian adanya anggapan bahwa apabila perempuan bersolek tujuannya yaitu untuk memancing perhatian dari laki-laki, sehingga apabila terjadi kekerasan ataupun terjadi tindak pelecehan seksual maka perempuan yang menjadi korban yang disalahkan. Banyak sekali bentuk dari stereotipe yang terjadi di masyarakat yang dilekatkan pada kaum perempuan pada umumnya sehingga berakibat menyulitkan, membatasi, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan.

#### d. Gender dan Kekerasan

Kekerasan (*Violence*) merupakan serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap manusia ini sumbernya bermacam-macam, namun ada salah satu kekerasan yang bersumber dari anggapan gender yaitu kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin. Pada dasarnya kekerasan gender ini disebabkan oleh adanya ketidaksetaraan kekuatan yang ada di masyarakat. Dan pada umumnya perempuanlah yang menjadi korban dari perbedaan gender itu.

Timbulnya perbedaan tugas dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan inilah tanpa disadari telah menimbulkan perbedaan tugas dan peran yang berakibat menghambat potensi dasar laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal. Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi karena budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan. Kekerasan biasanya digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas, dan seringkali hanya menunjukkan bahwa laki-laki berkuasa daripada perempuan. Kekerasan berbasis gender ini pada dasarnya adalah refleksi dari sistem patriarki di Indonesia. Menurut Fakhri (1999:17) bentuk dan macam kejahatan yang masuk kategori gender violence antara lain yaitu:

1. Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan pemaksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual.
2. Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga. Termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak.
3. Bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin, misalnya tindakan penyunatan terhadap anak perempuan.
4. Kekerasan dalam bentuk pelacuran. Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan.
5. Kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Dimana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang.

6. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam program Keluarga Berencana. Keluarga berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan.
  7. Yang ketujuh ini adalah jenis kekerasan terselubung, yaitu memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan dari si pemilik tubuh.
  8. Melakukan tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarakat yaitu yang dikenal dengan pelecehan seksual atau sexual and emotional harassment. Misalnya, menyampaikan lelucon jorok secara vulgar pada seseorang dengan cara yang dirasakan sangat ofensif, menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor.
- e. Gender dan beban Kerja.

Kaum perempuan didalam anggapan masyarakat luas memiliki tugas untuk mengelola pekerjaan rumah tangga, sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak daripada laki-laki. Bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki. Sementara itu kaum perempuan, karena anggapan gender ini, sejak dini telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Bahkan bagi kalangan keluarga miskin, beban yang harus ditanggung oleh perempuan sangat berat apalagi jika perempuan ini harus bekerja diluar juga sehingga harus memikul beban kerja yang ganda. Sedangkan bagi kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang cukup, beban kerja rumah tangga seringkali dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga.

### 3. Pendekatan perempuan dalam pembangunan

Dalam pembangunan berbangsa, gender merupakan strategi global yang berupaya untuk meningkatkan kepedulian akan aspirasi, kepentingan

dan peranan perempuan dan laki-laki tanpa mengesampingkan harkat, martabat, kodrat dari laki-laki maupun perempuan. Hakekat peningkatan peranan khususnya kaum perempuan adalah meningkatkan kedudukan, peranan, kemampuan, kemandirian dan ketahanan baik mental maupun spiritual dari perempuan.

Pada dasawarsa 70'an kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang dengan diwujudkan dalam arah pendekatan program yang memusatkan pada masalah perempuan dalam pembangunan. Masalah ini didasarkan pada suatu pemikiran mengenai perlunya kemandirian bagi perempuan miskin agar pembangunan dapat dinikmati oleh semua pihak.

Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perempuan telah banyak membuat program-program pembangunan untuk dilaksanakan. Namun banyak juga dari program tersebut yang sejak awal dikembangkan tanpa mempertimbangkan masalah gender dan telah menimbulkan dan hasil yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya, pembangunan yang awal mulanya untuk mensejahterakan dan menjawab tantangan kemiskinan dan keterbelakangan bangsa-bangsa dunia ketiga tersebut justru telah mengakibatkan keterbelakangan dan ketidakadilan bagi perempuan.

Berbagai pendekatan perempuan dalam pembangunan mulai dari WID (*women in development*), WAD (*women and development*), GAD (*gender and development*) akan dibahas lebih lanjut pada uraian berikut ini:

a. Pendekatan WID (*Women In Development*)

Timbulnya pemikiran perempuan dalam pembangunan (*Women In Development*) ini menjadi sangat menarik, karena didasari bahwa perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga perempuan yang posisinya termarginalkan perlu diikutsertakan kedalam pembangunan. Perempuan dalam pembangunan telah menjadi diskusi pembangunan dan merupakan pendekatan dominan bagi pemecahan persoalan perempuan di negara dunia ketiga.

Istilah *Women In Development* (WID) ini pertama kali dicetuskan oleh *Women's Committee of the Washington D.C Chapter of the Society for International Development* pada awal tahun 1970'an. Mulai pada saat itu WID dipakai sebagai pendekatan dimana sebagian besar ide, konsep dan solusinya didasarkan dari paradigma modernisasi. Sasaran dari pendekatan ini adalah kalangan perempuan dewasa yang secara ekonomi miskin. Pada saat itulah dimulailah pembentukan proyek-proyek yang berusaha keras untuk meningkatkan akses perempuan untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Contoh-contoh proyeknya seperti melalui kegiatan-kegiatan ketrampilan menyulam, menjahit, dan lain sebagainya sehingga banyak orang mengasumsikan bahwa pada dasarnya perempuan memang hanya bisa mempunyai keterampilan-keterampilan seperti itu saja.

Dalam pelaksanaannya proyek-proyek tersebut seringkali mengalami kegagalan, dan pada akhirnya terlihat bahwa konsep WID gagal dalam menghapus masalah diskriminasi terhadap perempuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa WID merupakan strategi dan diskusi tentang pembangunan untuk melanggengkan dominasi dan penindasan terhadap perempuan di negara dunia ketiga.

Dengan analisis diatas, diperlukan adanya sebuah alternatif yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial. Transformasi sosial yang dimaksud adalah semacam proses penciptaan hubungan yang secara fundamental merupakan sesuatu yang baru dan lebih baik (Fakih, 1999:65). Hubungan disini maksudnya adalah struktur, struktur ekonomi yang eksploitatif menuju ke struktur ekonomi tanpa eksploitatif, dari struktur gender yang merugikan perempuan menuju struktur gender yang adil.

Dengan demikian demokratisasi merupakan alternatif dari proses transformasi sosial. Demokrasi merupakan cara dan proses yang memberi peluang dan wewenang yang memungkinkan masyarakat menentukan dan mengelola hidupnya sendiri melalui dialog, diskusi, aksi yang bertumpu pada asas persamaan dan keadilan. Pada akhirnya,

demokratisasi akan terjadi jika masyarakat itu sendiri yang menginginkan, memperjuangkan dan memenangkannya.

WID bertujuan memproses persamaan antara kaum laki-laki dan perempuan, maka transformasi gender merupakan gerakan pembebasan perempuan dan laki-laki dari sistem dan struktur yang tidak adil serta memperjuangkan martabat dan kekuatan perempuan. Sehingga hal tersebut membutuhkan perubahan peran yang berkeadilan gender baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

b. Pendekatan WAD (Women and Development)

Pendekatan WID lebih menekankan kepada terintegrasinya perempuan dalam pembangunan, maka WAD (Women and Development) lebih mengarah pada hubungan antara perempuan dan proses pembangunan. Setelah WID terimplementasi, pembicaraan selanjutnya beralih pada bagaimana hubungan atau keterkaitan antara perempuan dan proses pembangunan.

WAD (Women and Development) yaitu merupakan pendekatan ketergantungan, perempuan telah berperan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat (Murniati, 2004:99). Dalam pendekatan WAD tidak dibahas letak kedudukan laki-laki dan perempuan. Sudah ada pemahaman bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan, kesempatan dan peran yang sejajar. Sehingga masalahnya kemudian adalah bagaimana posisi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

Pelaksanaan pendekatan WAD ini dititikberatkan pada pengembangan kegiatan peningkatan pendapatan tanpa memperhatikan unsur waktu yang digunakan oleh perempuan. Ini berarti kaum perempuan justru telah mendukung eksistensi struktur masyarakat yang timpang atau secara tidak sadar perempuan telah mendukung penindasan terhadap kaumnya sendiri. Strategi ini hanya berfokus pada pengembangan peningkatan pendapatan bagi perempuan. Sehingga strategi ini dinilai juga telah gagal dalam menganalisis hubungan perempuan dan laki-laki dalam budaya patriarkhi.

c. Pendekatan GAD (Gender and Development)

Sebagai respon dan evaluasi dari tidak terlalu berhasilnya konsep WID dan WAD, kemudian pada dasawarsa tahun 90'an muncul konsep baru yang kemudian dikenal sebagai konsep *Gender and Development* (GAD). Konsep ini lebih didasarkan pada suatu pendekatan mengenai pentingnya keterlibatan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan. Seperti kita ketahui bahwa gender dapat dimaknai sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, bukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara jenis kelamin. GAD lebih mengarah pada hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan.

Konsep ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa konstruksi sosial yang dibuat atas peran perempuan dan laki-laki yang dapat diubah. Pendekatan ini lebih memusatkan kepada isu gender dan tidak melihat pada masalah perempuan semata. Dalam pendekatan GAD, posisi perempuan diletakkan dalam konstruksi sosial gender serta pemberian peran tertentu kepada perempuan maupun kepada laki-laki. Laki-laki berperan dan terlibat dalam penempatan posisi perempuan, laki-laki ikut turut berperan dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan. Hal inilah kemudian yang disebut dengan hubungan gender.

Secara implementatif, peran negara sangat berpengaruh terhadap penempatan posisi perempuan. Di dalam GBHN telah tersirat bahwa terdapat peran perempuan di dalam pembangunan bangsa. Oleh sebab itulah di dalam pendekatan GAD, perempuan berada dalam posisi "*agent of change*" dalam pembangunan. Dimana perempuan berperan aktif sebagai agen perubahan dalam pembangunan, tidak hanya sebagai objek pembangunan atau penerima program pembangunan secara pasif. Oleh sebab itulah pelaksanaan GAD memerlukan dukungan sosio budaya masyarakat dalam politik nasional yang menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki.

Konsep GAD ini tidak hanya kalangan perempuan saja yang harus ikut disertakan dalam proses-proses pengambilan keputusan atas pembangunan disegala bidang, tetapi laki-laki juga harus bisa memahami dan memikirkan kebutuhan-kebutuhan kaum perempuan dalam setiap program pembangunan. Sehingga apabila dilihat dari sudut laki-laki maupun perempuan, ketimpangan gender yang selama ini terjadi diharapkan bisa dikurangi atau bahkan bisa dihapus.

#### 4. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Beberapa tahun terakhir ini berkembang konsep baru tentang gender yang dikenal dengan sebutan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*). Pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) yang disingkat dengan PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Konsep ini muncul pertama kali setelah Konferensi Perempuan yang ketiga pada tahun 1985 di Nairobi oleh PBB. Konsep pengarusutamaan gender ini dibuat untuk keperluan mendukung perempuan dalam pembangunan serta bagaimana untuk memasukkan nilai-nilai perempuan dalam pembangunan itu. Kemudian pada Konferensi Perempuan yang keempat di Beijing pada tahun 1995, secara tegas para partisipan mendukung penuh konsep pengarusutamaan gender ini. Bahwa pemerintah serta para pengambil keputusan harus terlebih dahulu secara aktif mempromosikan rencana kebijakan-kebijakan dan program-program yang berprespektif gender.

Meskipun demikian usaha untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender ternyata masih mengalami hambatan dan masih sulit untuk

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat pada umumnya dan khususnya oleh perempuan. Sebagaimana dimaklumi bersama dalam Inpres 9 tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 132 tahun 2003 menegaskan, agar setiap instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan lain sebagainya dapat mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan gender ke dalam program sektor dan daerah masing-masing.

Pengarusutamaan gender ini bertujuan untuk menyatukan sudut pandang yang responsif gender sebagai strategi untuk mengurangi dan menghapus kesenjangan gender dalam kebijakan dan program pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan dalam suatu proses pembangunan sebagai salah satu perwujudan hak asasi manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Hasil pembangunan menunjukkan, dalam hampir semua bidang kehidupan pencapaian perempuan masih tertinggal dibandingkan dengan lawan jenisnya. Walaupun sebenarnya kebijakan dan program pembangunan telah menganut anti diskriminasi gender. Hal itu terjadi tidak saja disebabkan karena adanya kesempatan yang timpang, baik menurut jenis kelamin atau karena relasi gender yang masih terdapat perbedaan pandangan dalam masyarakat. Namun ketertinggalan perempuan itu sendiri tidak memaksimalkan partisipasinya karena belum yakin bahwa kemampuan dan kesenjangan yang ada sesungguhnya sudah setara. Untuk itulah, pengarusutamaan gender perlu lebih dipahami oleh semua elemen masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam mensosialisasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan penerapannya di Indonesia mengenal prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pluralistis Yaitu menerima keragaman budaya, agama dan adat istiadat (pluralistis), karena bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan adat istiadat tadi merupakan kekayaan dan keragaman yang perlu dipertahankan di dalam Pengarusutamaan Gender tanpa harus mempertentangkan keragaman tersebut.

2. Bukan pendekatan konflik Yaitu pendekatan dalam rangka PUG tidak melalui pendekatan dikotomis yang selalu mempertimbangkan antara kepentingan laki-laki dan perempuan.
3. Melalui proses sosialisasi dan advokasi prinsip yang penting dalam PUG di Indonesia yaitu melalui perjuangan dan penerapan secara bertahap melalui proses sosialisasi dan advokasi. Dalam PUG tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi pelaksanaannya harus dengan penuh pertimbangan melalui proses sosialisasi dan advokasi yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
4. Menjunjung Nilai HAM dan Demokratisasi, maksudnya pendekatan PUG di Indonesia tidak melalui pertentangan-pertentangan dan penekanan-penekanan, sehingga ada kelompok-kelompok yang merasa dirugikan. PUG di Indonesia penerapannya akan selalu menjunjung nilai-nilai Hak Azasi Manusia dan demokratis, sehingga akan diterima oleh lapisan masyarakat tanpa ada penekanan-penekanan.

Selain usaha dari Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam mensosialisasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan penerapannya di atas, syarat penting lainnya yang diperlukan untuk membangun pengarusutamaan gender di Indonesia yaitu dengan adanya *political will*. Pemerintah diharuskan memasukkan konsep kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan utamanya. Pengarusutamaan gender harus dapat menjadi isu politik, dimana pemerintah harus dengan jelas dan transparan dalam menyampaikan misi untuk memasukkan perspektif gender kedalam semua kebijakan dan program yang mengarah ke kesetaraan dan keadilan gender. Sehingga apabila tanpa adanya *political will* yang kuat dalam menciptakan budaya kesetaraan dan keadilan gender, kebijakan pengarusutamaan gender ini tidak akan berhasil.

Dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender diperlukan sumber daya manusia ahli gender yang tepat. Mengingat bahwa pengarusutamaan gender ini merupakan kegiatan mengorganisir dan melihat perkembangan proses kebijakan, implementasi, serta evaluasi yang responsif gender. Keterlibatan perempuan disini juga tidak boleh melupakan peranan

perempuan dalam politik maupun dalam kehidupan publik. Karena sulit rasanya jika menciptakan *political will* untuk pengarusutamaan gender tanpa adanya peranan dari perempuan secara penuh. Menurut Nugroho (2008:143) konsep pengarusutamaan gender juga memberikan ruang pada laki-laki dan masyarakat secara keseluruhan untuk ikut terlibat pada isu-isu kesetaraan gender, tidak hanya tertuju pada perempuan saja. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan strategi pengarusutamaan gender ini dapat memanfaatkan sumber daya manusia secara utuh, yaitu laki-laki dan perempuan. Hasil dari pembangunan itu nantinya juga dapat dinikmati secara merata tanpa adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

#### **E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Berwawasan Gender**

Pembangunan sumber daya manusia berwawasan gender pada dasarnya merupakan sebuah langkah pembebasan manusia secara setara untuk dapat mengembangkan kualitas dirinya, baik itu manusia yang berjenis laki-laki maupun perempuan. Di dalam konteks kesetaraan gender yang menghubungkan relasi antara laki-laki dan perempuan, diperlukan yang namanya pemberdayaan bagi kaum perempuan terlebih dahulu. Pemberdayaan perempuan merupakan tuntutan hak asasi manusia. Ketika paradigma pembangunan ditekankan pada pentingnya manusia dan nilai-nilai kemanusiaan, maka perhatian terhadap kebutuhan kaum perempuan harus menjadi agenda penting. Selama kondisi perempuan masih terpuruk dan rentan akibat adanya ketidakadilan gender, maka mau tidak mau semua pihak terkait berusaha melakukan berbagai upaya agar hak perempuan sebagai anggota masyarakat dapat terpenuhi. Keberhasilan pelaksanaan proses pembangunan sumber daya manusia berwawasan gender yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan bagi kaum perempuan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tersebut, yaitu:

a. Pendidikan

Di sektor pendidikan terdapat dua sub-sektor yang bersifat strategis, yaitu pendidikan dan keagamaan. Di sektor pendidikan ini diharapkan untuk mendukung dua point penting di sektor ini, yaitu mekanisme pengarusutamaan gender di sektor pendidikan dan sensitivitas kesetaraan gender pada organisasi-organisasi pendidikan. Di sub sektor pendidikan, Hal ini tentunya di harapkan adanya dukungan Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang memasukkan unsur kesetaraan gender di dalamnya. Sehingga dengan adanya UU pendidikan yang responsif gender, akan menunjang kegiatan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan yang dimiliki atau dikelola pemerintah, maupun yang dimiliki atau dikelola oleh masyarakat.

Di sub sektor keagamaan, diperlukan sebuah kebijakan yang dapat memayungi seluruh agama di Indonesia yang sudah disahkan. Salah satu strateginya yaitu memasukkan nilai kesetaraan gender ke dalam undang-undang keagamaan seperti halnya undang-undang pendidikan diatas, yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan apabila dimunculkannya kebijakan-kebijakan pendidikan di bawah tingkat UU, baik di pusat maupun di daerah. Di tingkat daerah, baik di propinsi/kabupaten/kota diperlukan upaya dari pemerintah daerah untuk membuat kebijakan ditingkat daerah yang mendukung pelaksanaan PUG di tingkat daerah di sektor pendidikan, baik itu di jalur pendidikan maupun di jalur keagamaan. Kebijakan ini diperlukan karena adanya desentralisasi di sektor pendidikan.

Mekanisme tersebut kemudian didukung sejumlah perangkat pendukung yang dipergunakan untuk memperkuat mekanisme tersebut. Perangkat pendukung mekanisme PUG di dalam pendidikan menurut Nugroho (2008:210) yaitu:

1. Membangun lingkungan sekolah yang mendukung sensitivitas dan ketanggapan gender di lingkungan sekolah. Kegiatan ini memerlukan dukungan dalam bentuk kurikulum, materi ajar, dan pelatihan gender bagi guru.
2. Mengembangkan manajemen persekolahan yang memiliki sensitivitas dan responsivitas gender. Menyusun model manajemen

sekolah yang memiliki nilai kesetaraan gender untuk digunakan sebagai model manajemen sekolah pada umumnya.

3. Mengembangkan pendidikan kemasyarakatan maupun pendidikan keagamaan yang berkesetaraan gender.
4. Meningkatkan peran asosiasi guru (PGRI) dalam merumuskan, melaksanakan, dan memantau proses pembangunan pendidikan kearah yang berkesetaraan gender. Kegiatan disini berkenaan dengan sensitivitasi PGRI.

Diharapkan dengan upaya meningkatkan kualitas kesetaraan gender di organisasi-organisasi ini akan dapat memperoleh dukungan yang lebih besar baik dalam bidang kebijakan, mekanisme, maupun pendidikan dan pelatihan. Pemberian pelatihan kesetaraan gender ini dikedepankan pada:

1. Pelatihan dalam bentuk *training for trainers* (TOT) bagi guru dan pemilik sekolah.
2. Pelatihan bagi manajer dan staf pendidikan di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.
3. Pelatihan bagi pemimpin agama.
4. Pelatihan bagi pemuka masyarakat.
5. Pelatihan bagi organisasi orang tua.wali murid.

Semua usaha di dalam sektor pendidikan baik di pendidikan umum maupun pendidikan yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan maupun yang di bawah pengelolaan negara maupun yang berada dalam pengelolaan masyarakat. Secara khusus sasarannya adalah lembaga pendidikan di tingkat pra sekolah dan sekolah dasar, karena mengingat pendidikan kesetaraan gender sebaiknya dimulai sejak dini.

b. Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan merupakan salah satu faktor yang penting dalam kesuksesan pelaksanaan pemberdayaan perempuan. Meningkatkan kebijakan dan program-program PUG merupakan hal yang penting di sektor kesehatan, karena hal ini akan berkaitan erat dengan peningkatan kualitas yang berkesetaraan gender di sektor kesehatan. Di sektor kesehatan, organisasi yang bersifat strategis untuk ditingkatkan kualitas kesetaraan gendernya adalah:

1. Departemen Kesehatan (pusat)

2. Dinas Kesehatan (propinsi dan Kabupaten/kota)
3. Asosiasi pelayanan kesehatan (nasional)

Di sektor kesehatan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mensensitifkan gender yaitu dengan adanya Diklat Kesehatan di tingkat nasional maupun daerah, termasuk Pusdiklat Pegawai Kesejahteraan di tingkat nasional maupun daerah. Hasil dari kegiatan ini untuk bisa menyusun sebuah manajemen pendidikan dan pelatihan, materi ajar, dan pengajar yang sensitif dan responsif gender.

Perangkat pendukung mekanisme PUG di sektor kesehatan adalah materi komunikasi massa baik yang tercetak, audial, maupun audio-visual yang mengajarkan pendidikan penyelenggaraan kesehatan yang mempunyai nilai-nilai kesetaraan gender, baik yang bersifat kegiatan penyelenggaraan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat. Strategi khusus dibidang kesehatan ini yaitu mengarah untuk merubah paradigma kesehatan dari paradigma *male dominated* (didominasi laki-laki) menjadi kearah *gender sensitif*. Meski memang terdapat beberapa perbedaan tertentu diantara perempuan, tetapi dalam kenyataannya masih terdapat bias pemaknaan kesehatan, misalnya hipertensi adalah pasti penyakitnya laki-laki. Paradigma ini tidak hanya ada di dunia akademis, praktisi kesehatan, namun juga paradigma di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat itu sendiri juga masih rendahnya kesadaran untuk menjaga kesehatan bagi perempuan dibandingkan dengan laki-laki, yang terlebih dalam keadaan masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan sekali program atau kegiatan promosi membangun nilai kesetaraan gender dalam paradigma kesehatan.

c. Ekonomi

Sektor ekonomi mendukung posisi yang penting di Indonesia mengingat adanya dampak krisis yang melemahkan kemampuan ekonomi dan meningkatnya tingkat kemiskinan. Memasukkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam setiap kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang terkoordinasi merupakan solusi tepat disaat perekonomian Indonesia saat ini. Sebuah solusi kebijakan di sektor ekonomi yang sensitif dan

responsif gender akan mendukung upaya untuk meningkatkan kualitas kesetaraan gender dalam pembangunan ekonomi pada umumnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya, baik yang dilaksanakan oleh negara maupun masyarakat.

Kemudian lembaga-lembaga penyampai nilai yang diupayakan untuk disensitifgenderkan adalah lembaga pelatihan kerja, khususnya yang berada di lingkungan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, di sub-sub sektor ketenagakerjaan, industri dan perdagangan, koperasi dan UKM, pertanian dan perkebunan, kelautan, serta keuangan dan perbankan. Adapun strategi khusus dibidang ekonomi yang harus dilaksanakan yaitu fokus kepada anggaran terbesar dalam pembangunan, yaitu penanggulangan kemiskinan. Menurut Nugroho (2008:216) terdapat dua fokus yang harus dilaksanakan dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu:

1. Meningkatkan produktivitas kelompok miskin
2. Menurunkan pengeluaran kelompok miskin

Strategi dalam sektor ekonomi ini tetap menggunakan strategi penanggulangan kemiskinan dalam ruang lingkup kesetaraan gender di bidang ekonomi. Karena itu, perlu adanya sosialisasi mengenai strategi-strategi tersebut. Salah satu bentuk sosialisasi yang dapat dilaksanakan segera yaitu menyelenggarakan serangkaian *workshop-workshop* dalam hal mengintegrasikan pengarusutamaan gender di dalam penanggulangan kemiskinan.

d. Nilai Budaya Masyarakat

Pemahaman masalah gender dapat terbentuk dari berbagai faktor, dari keluarga hingga negara, kemudian dilestarikan oleh tradisi (adat istiadat) dan berbagai norma yang ada dalam masyarakat. Hubungan perempuan dan laki-laki di Indonesia ini pada kenyataannya masih didominasi oleh ideologi gender yang membuahkan budaya patriarkhi. Secara umum, patriarkhi ini merupakan tradisi budaya yang lebih mengutamakan keturunan dari garis ayah, atau dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang bercirikan laki-laki (ayah). Dalam sistem ini laki-laki yang berkuasa untuk menentukan segala sesuatu bagi keluarganya.

Perjalanan budaya patriarki makin kuat ketika terjadi perubahan sosial ke masyarakat feodal (Murniati, 2004:80). Akibat perubahan sosial tersebut, didalam masyarakat terdapat pandangan bahwa norma manusia yang dianggap benar apabila dipandang dari sudut laki-laki dan berlaku disemua bidang pembangunan. Keadaan inilah yang pada akhirnya melahirkan segala macam diskriminasi terhadap perempuan.

Sistem ini tumbuh dan berkembang di dalam konsensus masyarakat yang dipelihara secara turun menurun dan dijadikan panutan. Selain itu diperkuat juga oleh adanya kelompok-kelompok yang dominan dalam masyarakat, seperti sesepuh, pemimpin dan orang-orang yang terpuja dan berpengaruh juga memiliki peranan besar dalam pelestarian ideologi ini. Pemahaman gender ini banyak mempengaruhi tingkah laku perempuan dalam hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Pemahaman ini dapat diartikan dengan bagaimana laki-laki dan perempuan didefinisikan, dinilai, dipersepsikan dan diharapkan dalam bertingkah laku.

Perempuan dan laki-laki mendapatkan pengetahuan dari produk budaya. Perjuangan pemberdayaan perempuan tidak akan mencapai tujuan apabila perempuan itu berjuang sendiri tanpa melibatkan laki-laki. Perjuangan terhadap kaumnya sendiri akan menjerumuskan perempuan kedalam sikap permusuhan dengan kaum laki-laki.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan metode studi yang dilakukan seseorang atau beberapa orang melalui penyelidikan yang hati-hati terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah yang diteliti. Dalam melaksanakan suatu penelitian, langkah-langkah yang akan di ambil bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan relevan serta memperoleh informasi yang lengkap. Maka terlebih dahulu harus dipahami dasar-dasar yang menjadi tumpuan berpikir dalam menggunakan metode ilmiah, khususnya dalam rangka sistem etika penelitian. Dengan kata lain sebelumnya peneliti harus dapat memahami dasar pemikiran terhadap masalah yang akan diselidiki serta untuk memberikan gambaran dari masalah yang akan diteliti.

Penelitian berperspektif gender yang menekankan pada analisis gender merupakan pendekatan yang relatif baru dan semakin meluas penggunaannya sejalan dengan berkembangnya penelitian gender (Handayani dan Sugiarti, 2008:45). Penelitian gender adalah suatu penelitian yang dilaksanakan untuk memahami terjadinya ketimpangan sosial yang disebabkan oleh aspek gender. Penelitian berwawasan gender ini merupakan kajian yang secara jelas berusaha mengungkapkan hubungan gender sesuai dengan isu yang sedang berkembang yang perlu mendapatkan perhatian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif disini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir, 2003:63). Data yang dikumpulkan dengan jenis penelitian ini berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka-angka.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Maleong (2004:04) yaitu:

“Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.

pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perilaku memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan”.

Pendekatan kualitatif menekankan pada pendekatan humanistik untuk memahami realitas sosial, memberikan tekanan pada pandangan terbuka terhadap kehidupan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis secara terperinci tentang upaya yang dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam rangka melaksanakan pembangunan sumber daya manusia yang berwawasan gender secara optimal.

## **B. Fokus Penelitian**

Penentuan fokus sangat menentukan dalam langkah-langkah penelitian. Fokus penelitian pada dasarnya merupakan penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian. Masalah adalah keadaan yang membingungkan sebagai akibat adanya kaitan dua atau lebih. Seperti yang dikemukakan Moleong (2004:94) bahwa penentuan fokus penelitian mempunyai dua tujuan, pertama, penentuan fokus membatasi studi dan yang kedua penentuan fokus penelitian secara efektif menetapkan kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Adanya fokus penelitian bisa mempermudah penelitian dalam mengambil data serta mengolahnya menjadi sebuah kesimpulan. Sehubungan dengan topik penelitian tentang sumber daya manusia berwawasan gender, maka peneliti memberi batasan fokus pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia berwawasan gender yang dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, dengan cara:
  - a. Pelatihan Kepemimpinan, Kepribadian dan PUG.
  - b. Penyuluhan Bagi ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga (P2W-KSS).

- c. Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha (P3EL)
  - d. Fasilitasi Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya manusia berwawasan gender yang dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang .

a. Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang itu sendiri. Faktor internal yang ada dalam tubuh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang disini adalah terdapatnya kendala mengenai pencairan dana pelaksanaan program kegiatan, selain itu juga adanya ketimpangan antara jumlah pegawai laki-laki dengan perempuan di dalam tubuh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.

b. Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang itu sendiri. Pada pelaksanaan kegiatan program P3EL misalnya yang mengalami kendala dalam hal pengembalian uang modal yang diberikan kepada kelompok usaha. Pada pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan, Kepribadian dan Pengarusutamaan Gender Bagi Istri Camat dan Istri Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Malang yang mengalami kendala pada para peserta yang masih memiliki balita. Pada pelaksanaan kegiatan P2WKSS yang mengalami kendala terbatasnya kemampuan dan akses kaum perempuan karena rendahnya tingkat pendidikan serta rendahnya akses di bidang ekonomi. Pada pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan yang mengalami kendala mengenai budaya masyarakat yang menganggap bahwa masalah

keburukan keluarga merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan dengan orang lain

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti sebenarnya mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat, absah, yang benar-benar diperlukan dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan penelitian adalah Kabupaten Malang

Situs penelitian itu sendiri menunjukkan dimana sebenarnya peneliti keadaan menangkap dari objek yang diteliti. Maka situs dari penelitian ini adalah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang yang beralamat Jl. Merdeka Timur 3 Malang. Alasan penulis memilih situs ini sebagai tempat penelitian karena Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang ini telah menunjukkan kontribusi positif sebagai pusat penyebaran ide-ide tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat serta sebagai pelaksana pemberdayaan perempuan agar memperoleh akses kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi sebagai pelaku dalam pengelolaan pembangunan. Selain itu sejak dibentuk pada tahun 2007 kemudian disahkan pada tahun 2008, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang telah mengantarkan Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang sebagai kecamatan yang mendapatkan juara 3 (tiga) dalam lomba pelaksanaan P2WKSS tahun 2008 se-Jawa Timur.

### **D. Sumber Data**

Sumber data berasal dari subyek atau obyek yang memenuhi persyaratan tertentu yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Arikunto (1998:114), yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek darimana data itu dapat diperoleh.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber pengambilan data yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung terhadap obyek yang diteliti dan dikumpulkan oleh peneliti melalui proses

wawancara dengan beberapa responden. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu:

- a. Dra. Sri Sulistikanthi, menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan.
- b. Aminin, SH, menjabat sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga.
- c. Dra. Ida Sari Wardhani, menjabat sebagai Kepala Seksi Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak.
- d. Ibu Nurja'iyah dan Ibu Luluil Farida Widyawati, keduanya merupakan para peserta yang mengikuti kegiatan program pemberdayaan perempuan yang diadakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari luar lokasi obyek yang diteliti yang mencakup informasi yang telah dikumpulkan dan hanya relevan dengan permasalahan yang ada, terdiri dari dokumen-dokumen berupa foto pelaksanaan kegiatan program yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang; laporan-laporan dari hasil kegiatan pelaksanaan program pelatihan, kepemimpinan, kepribadian dan PUG bagi istri Camat dan istri Lurah/Kepala Desa, laporan kegiatan P3EL, laporan kegiatan P2WKSS, dan laporan kegiatan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan; jurnal-jurnal dari internet maupun arsip-arsip berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008, serta buku materi pada pelaksanaan semiloka orientasi analisis gender.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menunjang keberhasilan dan kelancaran penelitian yang dilaksanakan sangat digunakan sebuah metode pengumpulan data yang baik. Semakin kurangnya pengalaman pengumpulan data, semakin mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadinya, dan semakin bias pula data yang terkumpul. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam

sebuah penelitian (Nazir, 2003:211). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan beberapa literatur, artikel, jurnal, instruksi presiden dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara terbuka dan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data ini sering disebut dengan teknik wawancara, pelaksanaannya dengan mengadakan tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan informan. Wawancara ini dilaksanakan oleh peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya.

b. Observasi (Observation)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung yang berkaitan dengan loyalitas para pegawai Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang mengenai pola kerja para pegawai kantor dengan menggunakan alat indera penglihatan.

c. Dokumentasi (Documentation)

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan mencatat atau menyalin data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau sumber-sumber tertulis dan arsip-arsip yang tersedia di lokasi penelitian.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam mencapai tujuan penelitian. Penelitian dengan metode kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan

penelitian yang sangat menentukan keseluruhan skenarionya (Moleong, 2004:117). Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah:

1. Peneliti Sendiri, merupakan komponen yang paling penting sebagai alat pengumpul data utama.
2. Pedoman wawancara, suatu daftar pertanyaan yang akan diajukan atau ditanyakan kepada narasumber yang terarah pada konsep penelitian, bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data dari informan.
3. Alat penunjang lain yang berupa alat tulis, buku catatan, serta alat bantu berupa flasdisk.

#### **G. Analisa Data**

Analisis data merupakan kegiatan pengorganisasian dan pengolahan data yang diperoleh dari sumber yaitu wawancara, observasi, dokumentasi atau pencatatan laporan yang ada kemudian menjadi seperangkat hasil.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Adapun kegiatan dalam analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Miles dan Hubberman (1984) dalam Sugiyono (2006:337)

Adapun ketiga proses analisa data kualitatif diatas dapat diperjelas sebagai berikut.

##### **1. Reduksi data**

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang bertujuan mempertajam, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisir data sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan yang diinginkan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan abstraksi, pemusatan, dan transformasi data mentah dari laporan-laporan hasil kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, maupun yang muncul dari catatan penulis di lapangan. Dalam kegiatan mereduksi ini, peneliti merangkum serta mengambil data yang pokok dan penting dari data berupa laporan hasil kegiatan yang diterima. kemudian data tersebut dipilih mana yang relevan dan mana yang tidak relevan terhadap

permasalahan dan fokus penelitian yang akan diangkat. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

## 2. Penyajian data

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah mereduksi data. Penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penyajian data berupa rangkuman hasil reduksi data dari laporan kegiatan penelitian yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Hasil dari reduksi data tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian dan tabel sesuai dengan urutan fokus penelitian dalam penyajian data sehingga dapat mudah untuk difahami.

## 3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari kegiatan analisis. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung. Kesimpulan merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan dari awal penelitian. Hasil data yang diperoleh dari penelitian di lapangan kemudian dikumpulkan dan dianalisa untuk dapat menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini berupa deskripsi atau gambaran suatu masalah yang sebelumnya masih belum menemukan jawaban sehingga setelah diteliti dapat menjadi jelas.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

##### a. Gambaran Fisik

Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.348 km<sup>2</sup> atau sama dengan 334.800 ha. Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dari 37 Kabupaten yang ada di Jawa Timur.

Letak geografis Kabupaten Malang terletak pada 112° 17' 10,9" - 122° 57' 00" Bujur Timur dan 7° 44' 55,11" - 8° 26' 35,45" Lintang Selatan. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto.
- Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang
- Bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
- Dan bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia

Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang berupa Daerah Dataran Tinggi (pegunungan), Wilayah ini dipagari oleh :

- Bagian utara terdapat Gunung Anjasmoro (2.277m) dan Gunung Arjuno (3.399 m)
- Bagian timur terdapat Gunung Bromo (2.392m) dan Gunung Semeru (3.676m) yang merupakan gunung tertinggi di pulau jawa.
- Bagian barat terdapat Gunung Kelud (1.731m)
- Bagian selatan terdapat Pegunungan Kapur (650m) dan Gunung Kawi (2.625m)

Kabupaten Malang itu sendiri berada di cekungan antara kedua wilayah pegunungan tersebut. Bagian selatan berupa pegunungan dan

dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan cukup sempit dan sebagian besar pantainya berbukit.

Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. Daerah utara dan timur banyak digunakan untuk perkebunan apel. Daerah pegunungan di barat banyak ditanami sayuran dan menjadi salah satu penghasil sayuran utama di Jawa Timur. Daerah selatan banyak digunakan ditanami tebu dan hortikultura, seperti salak dan semangka. Selain perkebunan teh, Kabupaten Malang juga berpotensi untuk perkebunan kopi dan coklat (daerah pegunungan Kecamatan Tirtoyudo). Hutan jati banyak terdapat di bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan kapur.

Kondisi lahan di Kabupaten Malang bagian utara relatif subur, sementara di sebelah selatan relatif kurang subur. Masyarakat Kabupaten Malang umumnya bertani, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan, sebagian lainnya telah berkembang sebagai masyarakat industri. *(Sumber: Bappekab Kabupaten Malang 2009)*

b. Pemerintahan

Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi 12 kelurahan, 177 desa, 2953 Rukun Warga dan 14.665 Rukun Tetangga. Pusat pemerintahan Kabupaten Malang berada di Kecamatan Kepanjen. Sebelumnya pusat pemerintahan berada di Kota Malang. Kota Batu dulu juga bagian dari Kabupaten Malang, tetapi sejak tahun 2001 Batu memisahkan diri setelah ditetapkan menjadi kota. Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Malang antara lain yaitu: Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Singosari, Sumberpucung, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak, Wonosari. Kecamatan yang cukup besar di Kabupaten Malang antara lain adalah Lawang, Singosari, Dampit, dan Kepanjen. *(Sumber: Bappekab Kabupaten Malang 2009)*



Sumber: [www.pemkabmalang.go.id](http://www.pemkabmalang.go.id)

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Malang

c. Penduduk

Pembahasan mengenai kondisi kependudukan akan berhubungan langsung dengan masyarakat atau penduduk. Peran serta penduduk baik laki-laki maupun perempuan dalam upaya pemberdayaan masyarakat mempunyai ikatan yang cukup kuat sesuai dengan tempat tinggalnya. Perkembangan penduduk pada Kabupaten Malang setiap tahun mengalami perubahan dan perkembangan, terakhir jumlah penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2008 berjumlah 2.393.648 jiwa dengan jumlah kaum perempuan 1.205.832 jiwa dan laki-laki 1.187.816 jiwa (sumber data BPS Maret 2008).

Dari data diatas perkembangan jumlah penduduk pada tiap-tiap kecamatan dapat dilihat pada **tabel 1** dibawah ini:

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Malang**

No.	Kecamatan	Tahun 2008	No.	Kecamatan	Tahun 2008
1.	Donomulyo	31383	17.	Sumberpucung	55147
2.	Kalipare	66785	18.	Kromengan	87556
3.	Pagak	50363	19.	Ngajum	49210
4.	Bantur	70979	20.	Wonosari	94884
5.	Gedangan	50657	21.	Wagir	72830
6.	Sumbermanjing	94457	22.	Pakisaji	74258
7.	Dampit	117462	23.	Tajinan	48396
8.	Tirtoyudo	63226	24.	Tumpang	74071
9.	Ampelgading	56995	25.	Pakis	113908
10.	Poncokusumo	85614	26.	Jabung	69267
11.	Wajak	84252	27.	Lawang	92636
12.	Turen	108806	28.	Singosari	145661
13.	Bululawang	60653	29.	Karangploso	55654
14.	Gondanglegi	53715	30.	Dau	56782
15.	Pagelaran	66297	31.	Pujon	62585
16.	Kepanjen	93046	32.	Ngantang	56025
			33.	Kasembon	30088

Sumber: Bappekab Kabupaten Malang 2009, diolah

## 2. Gambaran Umum Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang

Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah mengenai Bidang Pemberdayaan Perempuan dan berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Susunan Perangkat Daerah, pada tahun 2008. Sebuah lembaga pemerintah daerah yang fokus pada bidang pemberdayaan perempuan, dimana sebuah lembaga pemerintah daerah yang berusaha mengungkapkan berbagai permasalahan ketidakadilan gender yang selama ini terjadi pada kaum perempuan. Serta berupaya untuk meningkatkan peran dan kedudukan perempuan dalam pembangunan karena kesenjangan kualitas, kedudukan, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan sumber daya manusia yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi saat ini.

### a. Visi dan Misi

#### 1) Visi :

Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### 2) Misi :

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan
2. Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
3. Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
5. Meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat.

b. Fungsi

Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
2. Sebagai koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
3. Sebagai pengelola barang milik/kekayaan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab Kantor Pemberdayaan Perempuan.
4. Mengawasi atas pelaksanaan tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
5. Menyampaikan laporan evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak kepada Bupati.

c. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan dari pembangunan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang adalah untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.

Tujuan dari peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak adalah membangun anak Kabupaten Malang yang sehat, cerdas, ceria dan bertaqwa serta terlindungi baik secara ekonomi, sosial, budaya dan hukum.

Pencapaian tujuan tersebut ditandai dengan:

- a. Terintegrasinya kebijakan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan serta perlindungan anak pada semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lintas sektor.
- b. Terwujudnya 33 Kecamatan, 378 Desa dan 12 Kelurahan yang responsif gender dan peduli anak.

- c. Berperannya organisasi perempuan dan lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan serta peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

## 2. Sasaran

Sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2008 dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak adalah :

- a. Terwujudnya kebijakan dan program yang responsif gender dan peduli anak.
- b. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak.
- d. Korban trafiking dan KDRT dapat diberdayakan dan dapat menjalani kehidupan layak dengan lingkungan sekitar, sasaran setiap tahunnya 44,64%.
- e. Penguatan kelembagaan yang mengurus KPPA di tingkat kecamatan / desa, setiap tahunnya dapat dilaksanakan 30%.
- f. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan dan anak sehingga akan terbentuk ketahanan keluarga.
- g. Meningkatnya jumlah kelompok yang dapat diberdayakan baik modal maupun manajemennya agar dapat menambah pendapatan keluarga, sehingga akan terjadi peningkatan kesejahteraan yang lebih baik dengan :
  - 1) Jumlah kelompok P3EL per tahun yang dapat diberdayakan sebesar 3,076%.
  - 2) Jumlah kelompok Dasa Wisma yang dapat diberdayakan setiap tahunnya sebesar 7.673 kelompok atau 20%.

## d. Kebijakan

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2008-2010 dalam rangka peningkatan status,

posisi, dan kondisi perempuan serta perlindungan anak. Kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Terjaminnya keadilan gender dalam bentuk berbagai produk peraturan daerah, program kegiatan pembangunan.
2. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak untuk mewujudkan anak yang sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, ceria dan berakhlak mulia serta berpartisipasi aktif sesuai usianya.
4. Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender dan anak termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Untuk pelaksanaan kebijakan tersebut diuraikan kedalam operasional diberbagai bidang penanganan sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan.
2. Bidang Kesehatan.
3. Bidang Ekonomi.
4. Bidang Hukum.
5. Bidang Lingkungan dan Sosial Budaya.
6. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja.
7. Bidang Perlindungan Perempuan Usia Lanjut.
8. Bidang Perlindungan Perempuan Penyandang Cacat.
9. Bidang Perlindungan Remaja Putri.
10. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan.
11. Bidang Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan dalam jabatan Publik.
12. Bidang Perlindungan terhadap tindak kekerasan.
13. Bidang Pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.
14. Bidang Penghapusan Pornografi dan Pornoaksi.
15. Bidang Tumbuh Kembang Anak.
16. Bidang Perlindungan Anak.

17. Bidang Partisipasi Anak.
18. Bidang Kelembagaan Anak.
19. Bidang Pengarusutamaan Gender.
20. Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Swasta.

e. Program Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2008-2010, dijabarkan dalam kegiatan yang dilaksanakan melalui 4 program yaitu:

1. Sekretariat

Tujuan program ini untuk melaksanakan tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

- a. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan rumah tangga, humas serta pengelolaan aset.
- b. Melaksanakan urusan keuangan, yang meliputi penganggaran, penatausahaan dan mengkoordinasikan proses pencarian keuangan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan.
- c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program, penyusunan anggaran tahunan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan koordinasi pelaporan pelaksanaan program kegiatan.

2. Program Pengembangan Partisipasi Perempuan

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan partisipasi perempuan, pengembangan lembaga/organisasi perempuan serta peningkatan kualitas kegiatan untuk mendorong kemajuan perempuan. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

- a. Menyelenggarakan pengembangan partisipasi perempuan.
- b. Menyelenggarakan pemberdayaan perempuan, tokoh/pemimpin perempuan di masyarakat.
- c. Melaksanakan pengembangan lembaga/organisasi perempuan.

- d. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan lembaga swadaya masyarakat yang peduli permasalahan perempuan.
- e. Menyelenggarakan penyuluhan, sosialisasi, advokasi dan pelatihan pengarusutamaan gender.
- f. Melaksanakan program peningkatan kualitas kegiatan dan mendorong kemajuan kelembagaan perempuan serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

### 3. Program Partisipasi Hubungan Antar Lembaga

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di tingkat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta penguatan jejaring kelembagaan baik tingkat daerah, nasional dan internasional. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

- a. Menyelenggarakan pelayanan terhadap lembaga dan organisasi.
  - b. Membangun networking (jejaring kerja) antar lembaga.
  - c. Menyelenggarakan koordinasi antar lembaga/organisasi dan instansi terkait dalam rangka pembentukan jaringan kerja lintas sektoral.
  - d. Melaksanakan penelitian dan pengkajian data terpilah menurut jenis kelamin, inventaris lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak.
  - e. Fasilitasi terhadap organisasi peduli perempuan.
- ### 4. Program Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak

Tujuan program ini untuk meningkatkan hak-hak perempuan dan anak di berbagai sektor kehidupan serta meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

- a. Melaksanakan perlindungan dan peningkatan harkat dan martabat perempuan dan anak.
- b. Melaksanaan penyuluhan dan sosialisasi hak-hak perempuan dan anak dalam usaha penanggulangan kekerasan terhadap

perempuan dan anak dan sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam usaha penanggulangan trafiking.

- c. Menyelenggarakan fasilitasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
- d. Menyelenggaraan koordinasi antar lembaga/organisasi dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

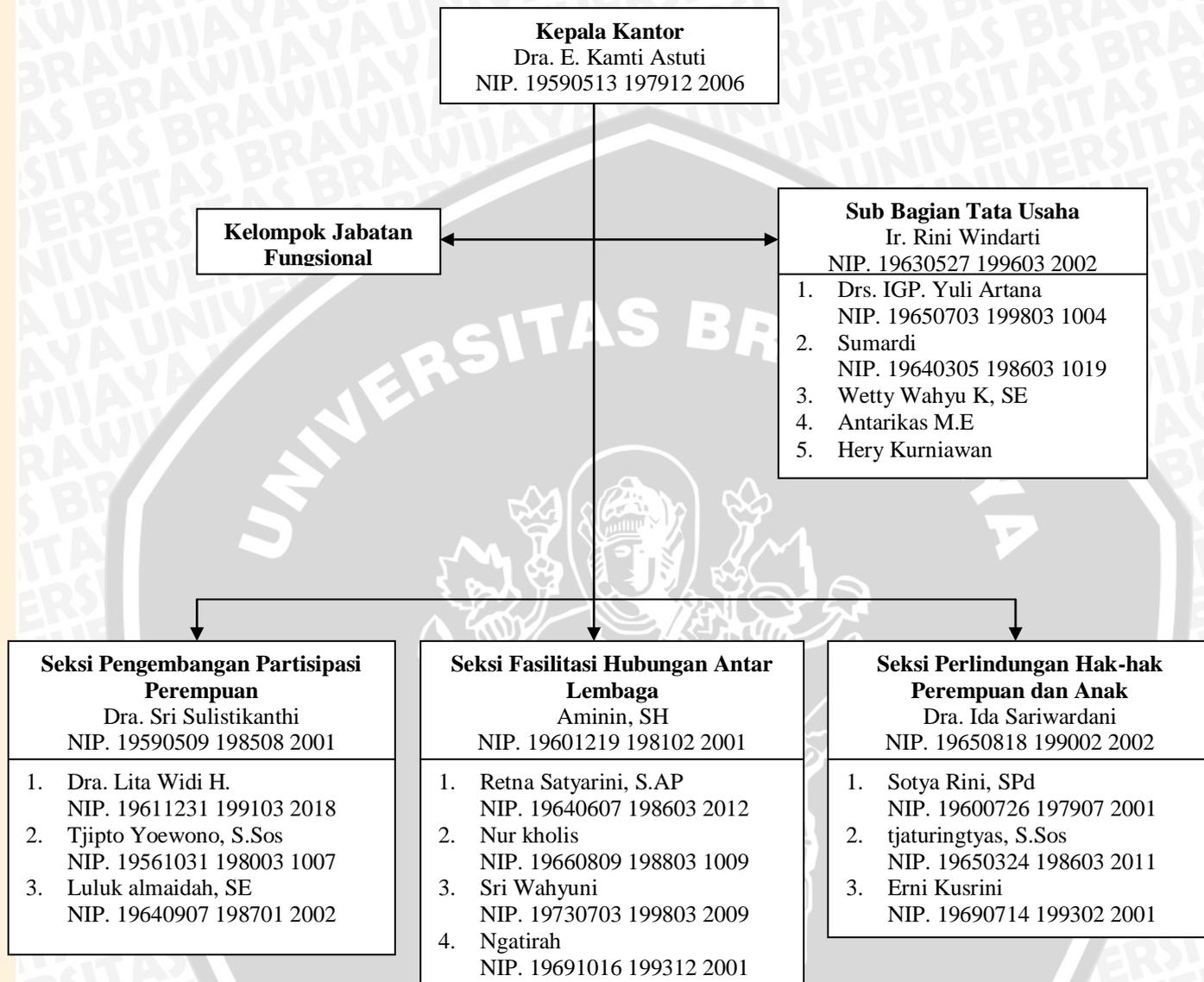
Pada hakekatnya sasaran program pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan.

Namun sasaran tersebut masih menghadapi tantangan karena kesenjangan gender dalam berbagai sektor pembangunan masih sering dijumpai. Apabila sasaran program pemberdayaan perempuan ini tercapai maka, kesetaraan dan keadilan gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak di Kabupaten Malang akan segera terwujud.

- f. Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang

Bedasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sesuai dengan Peraturan tersebut, maka susunan organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari **bagan 1**, berikut ini :

## STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



*Sumber: KPPPA Kab. Malang*

### **3. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berwawasan Gender Oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang**

Perjuangan membangun kesetaraan gender melalui pengarusutamaan gender merupakan bagian dari agenda seluruh negara di dunia. Sejumlah kesepakatan bersama, konvensi atau peraturan perundangan pada tingkat dunia telah dirumuskan dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan gender. Dalam kerangka inilah pada tataran nasional lahir sebuah kebijakan tentang pengarusutamaan gender, yang dilegitimasi melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dan keputusan menteri dalam negeri nomor 132 Tahun 2003 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

Seperti yang tercantum dalam panduan pelaksanaan INPRES no. 9 Tahun 2000, tujuan pengarusutamaan gender ini dilaksanakan untuk memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang mengalami marjinalisasi, sebagai dampak dari bias gender. Serta bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah, sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender di bidang masing-masing. Oleh karena itu sasaran pengarusutamaan gender itu sendiri akan berhasil jika dilaksanakan oleh seluruh kalangan masyarakat baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Kantor pemberdayaan perempuan sebagai salah satu departemen yang berada dibawah naungan pemerintah Kabupaten Malang yang ikut berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berwawasan gender bagi masyarakat Kabupaten Malang. Sasaran program dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia berwawasan gender yang di laksanakan melalui program pemberdayaan yang lebih diarahkan kepada untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan hak yang sama terhadap sumber daya pembangunan.

Berbagai strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Malang melalui Kantor Pemberdayaan Perempuan dalam usaha pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang ini dilaksanakan dengan cara yang akan diuraikan di bawah ini:

**a. Pelatihan Kepemimpinan, Kepribadian dan PUG.**

Pelatihan merupakan proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur secara sistematis. Disini Kantor Pemberdayaan Perempuan melaksanakan proses pelatihan yang memiliki tema “Pelatihan Kepemimpinan, Kepribadian, dan PUG bagi Istri Camat dan Istri Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Malang”. Pelatihan ini dilaksanakan dalam 4 (empat) angkatan, masing-masing angkatan diberikan pelatihan selama 3 (tiga) hari. Kegiatan yang fokus sarannya istri camat dan istri kepala desa/kelurahan ini dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 16 Juni 2008 di Hotel Wisata Tidar Malang.

Terdapat 425 peserta yang diundang dalam pelaksanaan kegiatan ini, adapun rinciannya terdapat pada **tabel 2**.

Dari jumlah peserta yang diundang sebanyak 425 orang tersebut terdiri dari:

1. Istri camat selaku Ketua TP-PKK Kecamatan sejumlah 33 orang, sebanyak 30 orang adalah istri camat dan 3 orang istri dari sekretaris Kecamatan, karena Camat dijabat oleh perempuan dan masih lajang.
2. Istri Kepala Desa/Kelurahan selaku Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan sejumlah 390 orang, dengan rincian:
  - a. Istri Kepala Desa : 327 orang
  - b. Istri Lurah : 12 orang
  - c. Bukan istri Kepala Desa/Lurah : 48 orang
3. Kader Pemberdayaan Perempuan : 2 orang
4. Peserta yang tidak hadir 3 orang yang masing-masing berasal dari:
  - a. Desa Wonoayu Kecamatan Wajak
  - b. Desa Sumberputih Kecamatan Wajak
  - c. Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir

**Tabel 2. Jumlah Peserta pada Pelatihan Kepemimpinan, Kepribadian, dan PUG bagi istri Camat dan Istri Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Malang**

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Donomulyo	11	-	18.	Kromengan	8	-
2.	Kalipare	10	-	19.	Ngajum	10	-
3.	Pagak	9	-	20.	Wonosari	9	-
4.	Bantur	11	-	21.	Wagir	13	-
5.	Gedangan	9	-	22.	Pakisaji	13	-
6.	Sumbermanjing Wetan	15	-	23.	Tajinan	13	-
7.	Dampit	14	1	24.	Tumpang	16	-
8.	Tirtoyudo	14	-	25.	Pakis	15	-
9.	Ampelgading	14	-	26.	Jabung	16	-
10.	Poncokusumo	18	-	27.	Lawang	13	2
11.	Wajak	13	-	28.	Singosari	16	3
12.	Turen	14	2	29.	Karangploso	10	-
13.	Bululawang	15	-	30.	Dau	11	-
14.	Gondanglegi	15	-	31.	Pujon	11	-
15.	Pagelaran	11	-	32.	Ngantang	14	-
16.	Kepanjen	16	4	33.	Kasembon	7	-
17.	Sumberpucung	8	-				
	Jumlah	216	7		Jumlah	195	5

*Sumber: Laporan hasil kegiatan Pelatihan, Kepribadian dan PUG bagi istri Camat dan istri Kepala Desa/Lurah KPPPA Kab. Malang*

Tingkat pendidikan peserta pelatihan terinci sebagai berikut: 2 persen berpendidikan SLTP dan yang setara, 92 persen berpendidikan SLTA dan yang setara, dan 6 persen berpendidikan D4, S1 dan S2.

Adapun kegiatan ini memiliki tujuan, antara lain yaitu: untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan istri camat dan istri kepala desa/kelurahan dalam memahami pengarusutamaan gender serta hak-hak perempuan dan anak; untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan

dibidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa serta dapat memberikan kontribusi positif kepada suami selaku pimpinan wilayah/desa dalam mengambil kebijakan pembangunan yang responsif gender; dan untuk meningkatkan ketrampilan dalam upaya memanfaatkan potensi lokal desa. (*Sumber: Laporan hasil kegiatan Pelatihan, Kepribadian dan PUG bagi istri Camat dan istri Kepala Desa/ Lurah KPPPA Kab. Malang*).

Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh Dra. Sri Sulistikanthi sebagai berikut:

*“Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini antara lainnya yaitu untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan mengenai gender kepada istri Camat/ istri Kades/ istri Lurah, dapat dijadikan kader di desa untuk meneruskan program-program dari pemerintah, serta mampu mensosialisasikan segala permasalahan yang terjadi di desa dan apabila terdapat masalah diharapkan cukup terselesaikan di tingkat desa/kecamatan saja”.* (*Hasil wawancara pada tanggal 19 Agustus 2009*)

Materi yang diberikan kepada peserta selama masa pelatihan dibuat sesuai dengan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan istri camat dan istri kepala desa/kelurahan dalam menerapkan pengarusutamaan gender. Materi yang diberikan ada 13 (tiga belas), antara lain yaitu: kebijakan umum tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; kebijakan umum mengenai gerakan PKK; pemerintahan desa; manajemen stress dan trylogy peran perempuan; pelajaran kepribadian perempuan; Traffiking, KDRT dan perlindungan pada perempuan dan anak; pemahaman gender dari agama; peran perempuan dalam kegiatan politik menuju sukses parlemen; kepemimpinan; peran ketua TP. PKK desa/kelurahan dalam revitalisasi posyandu; 10 program pokok PKK; produktivitas wanita; keterampilan (budidaya tanaman hias).

Materi pelatihan tentang kepemimpinan yang merupakan salah satu topik bahasan dalam pelatihan sangat bermanfaat sekali. Ketika para suami menjalankan tugas untuk memimpin warganya, saat itu juga para istri camat, lurah/kepala desa dituntut juga untuk dapat memimpin organisasi

perempuan ataupun gerakan PKK di wilayahnya. Untuk itu, diperlukan sebuah pembekalan diri dengan pengetahuan dan keterampilan kepada para istri camat, lurah/kepala desa ini untuk dapat menjalankan tugasnya juga sebagai pemimpin organisasi perempuan atau gerakan PKK di wilayahnya.

Sebagai istri camat, lurah/kepala desa setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan dapat menjadi pemimpin yang visioner, kreatif, dan menjadi mitra yang setara bagi kaum laki-laki. Menjadi pemimpin di kelompok masyarakat di wilayahnya yang mampu berperan sebagai pelaku perubahan (*Agent of Change*) yaitu membawa masyarakat yang kita pimpin menjadi kearah yang lebih baik. Oleh karena itu pelatihan ini diberikan kepada istri camat, lurah/kepala desa supaya dapat memberikan motivasi, komunikasi, dorongan, bimbingan, bantuan, keteladanan bagi masyarakat yang kita pimpin untuk dapat mengubah pola pikir dan tingkah lakunya agar dapat mengaktualisasikan diri serta agar tidak ada lagi subordinasi dan marginalisasi perempuan sebagai pengambil keputusan. Dengan adanya materi kepemimpinan ini para peserta berjanji akan merubah diri menjadi pemimpin yang lebih bijaksana, tegas dan berwibawa.

Mengembangkan kepribadian merupakan salah satu wujud aktualisasi hidup perempuan untuk terus maju kedepan untuk menjadi pemimpin bagi diri sendiri maupun masyarakat. Pelatihan kepribadian juga terdapat dalam materi pelatihan yang diadakan bagi istri camat, lurah/kepala desa. Materi tentang pengembangan kepribadian ini diharapkan agar perempuan dapat mengembangkan pribadinya sendiri secara sehat, sehingga dapat membangun komitmen dari dirinya sendiri untuk menguatkan motivasi diri.

Pelatihan ini menghasilkan suatu implementasi yang mengarah kepada usaha untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diarahkan untuk melakukan berbagai tindakan antara lain: Sosialisasi hasil pelatihan kepada masyarakat, pengurus PKK desa/kelurahan serta kelompok

masyarakat yang ada di desa/kelurahan; Revitalisasi kegiatan Posyandu yang terintegrasi dengan BKB; Mengadakan kembali kegiatan kelompok BKB, BKR, dan BKL; Membentuk Posyandu baru di dusun-dusun terpencil; Akan menjadi kader paralegal dan mengadvokasi bagi korban trafficking dan KDRT; Menggalakkan kembali KB di desa/kelurahan; Pembinaan dan Pembenahan administrasi PKK. (Sumber: Laporan hasil kegiatan Pelatihan, Kepribadian dan PUG bagi istri Camat dan istri Kepala Desa/ Lurah KPPPA Kab. Malang)

**b. Penyuluhan Bagi ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga (P2W-KSS).**

Sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Malang yang tertuang dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Malang Tahun 2008. Kantor Pemberdayaan Perempuan melaksanakan program penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga dengan tema “Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS).

Selanjutnya berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/483/KEP/421.012/2004 Desa Bringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang ditetapkan sebagai lokasi Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2008 serta berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur Tanggal 9 Juni 2008 Nomor: 188/253/KPTS/013/2008. dengan ditetapkannya Desa Bringin sebagai lokasi P2WKSS tahun 2008, maka secara terpadu telah dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui instansi terkait dengan garda terdepan dimotori oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, Desa serta segenap unsur masyarakat yang dikoordinir oleh LPMD Desa Bringin.

Desa Bringin ini terdiri dari 3 Dusun, 45 RT, dan terdiri dari 19 RW dengan jumlah penduduk 5403 orang yang terdiri dari laki-laki: 2749

orang dan perempuan: 2654 orang. Dari jumlah 2654 perempuan yang terdapat di desa Bringin tersebut, pendataan dilakukan pada wanita dengan usia 15-50 tahun yang memiliki permasalahan ekonomi, kesehatan dan pendidikan rendah. Kemudian setelah dilakukan pendataan sesuai dengan umur, terdapat 412 warga binaan sesuai dengan prioritas masalah dari masing-masing warga.

Program terpadu P2KWSS merupakan program lintas sektoral, untuk itu didalam pelaksanaan pembinaan dilakukan secara terkoordinir dan terpadu dalam suatu sistem pembinaan yang tepat dan terarah. Dengan demikian Dinas/Instansi sektoral Tingkat Kabupaten Malang bersama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang selaku Tim Pembina P2KWSS didalam melaksanakan pembinaan sesuai dengan kewenangan dan bidang masing-masing pembinaan yang pelaksanaannya berdasarkan jadwal kerja yang telah disusun. (Sumber: Laporan hasil kegiatan P2WKSS KPPPA Kab. Malang).

Seperti yang telah disampaikan oleh Dra. Sri Sulistikanthi sebagai berikut:

*“Begini mbak, yang dimaksud dari intas sektoral disini yaitu pelaksanaan P2WKSS ini dilaksanakan melalui pendekatan pendekatan lintas bidang pe, bangunan yang terkait dan lintas program secara terintegrasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat. P2WKSS ini dilaksanakan dengan memanfaatkan pedoman umum atau petunjuk yang relevan dengan tetap mempertimbangkan potensi serta karakteristik dari daerah masing-masing serta melibatkan semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)”. (Hasil Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2009)*

Adapun langkah-langkah kegiatan yang tepat disesuaikan dengan lingkup kewenangan Tim Penanganan P2WKSS di setiap tingkatan. Oleh sebab itu dibawah ini akan akan dijelaskan secara terinci.

#### 1. Tingkat Kabupaten

Langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kabupaten meliputi:

- a. Mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Program P2WKSS

b. Mengkoordinasikan kegiatan operasional di lapangan yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swasta

## 2. Tingkat Kecamatan

Langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan di Tingkat Kecamatan meliputi:

- a. Mengkoordinasikan dan mengondisikan kegiatan operasional di lapangan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dengan masyarakat, khususnya warga binaan P2WKSS
- b. Memberikan motivasi dan dorongan terhadap lembaga swasta dan masyarakat selaku warga binaan P2WKSS dan upaya peningkatan peranan wanita menuju keluarga bahagia dan sehat sejahtera

## 3. Tingkat Desa

Sebagai unsur pelaksana di desa, maka langkah yang dilakukan oleh Kelompok Pelaksana Peningkatan Peranan Wanita Desa Bringin dengan membentuk kelompok-kelompok warga binaan dalam 11 (sebelas) program kerja pembinaan, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh Tim Pembina Kabupaten dan Kecamatan. 11 (sebelas) program pembinaan tersebut akan dijelaskan pada **tabel 3**.

Pelaksanaan pembinaan dalam program P2WKSS di Desa Bringin dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan di berbagai sektor yang secara singkat sudah dijelaskan di dalam program pembinaan diatas. Kegiatan-kegiatan di berbagai sektor secara terpadu akan saling mendukung antara sektor satu dengan sektor lainnya, serta lebih memfokuskan pada warga binaan. Sektor-sektor tersebut antara lain:

### I. Sektor Kesehatan.

Komponen peran serta masyarakat/wanita dalam mewujudkan keluarga sehat.

Peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat terus dilakukan dan diupayakan sejak dini mulai dari dalam kandungan, balita, usia sekolah, remaja dan lansia.

**Tabel 3. Program Kerja Pembinaan Pada Kegiatan P2WKSS**

No	Sektor/Komponen	Jenis Kegiatan	Sasaran
I.	Sektor Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyuluhan dan pembinaan KIA, KB, gizi, imunisasi, PMT</li> <li>2. Penyediaan Sarana dan Prasarana (KK, brosur, garam yodium, buku adm)</li> <li>3. Penyediaan sarana untuk Posyandu</li> </ol>	Kaum wanita, Balita, anak sekolah desa Bringin
II.	Sektor Peningkatan Peran Perempuan dalam KSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyuluhan dan Penataan Lingkungan</li> <li>2. Pendataan rumah layak huni</li> <li>3. Pemugaran perumahan</li> </ol>	Kaum wanita yang dibagi dalam Pokja
III.	Sektor Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan penyuluhan</li> <li>2. Pembentukan Kadarkum</li> <li>3. Bantuan sarana</li> <li>4. Bantuan buku bacaan</li> </ol>	Masyarakat khususnya wanita yang Kadarkum
IV.	Sektor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan, pelatihan dan pembentukan KF, PAUD, dan KBU</li> <li>2. Praktek keterampilan pada kelompok binaan</li> <li>3. Pembinaan dan pembentukan taman bacaan</li> </ol>	PAUD, KF, KBU
V.	Sektor Disperindag	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan kelompok usaha</li> <li>2. Pelatihan keterampilan</li> <li>3. Bantuan sarana dan prasarana serta modal</li> </ol>	Kelompok-kelompok wanita usaha
VI.	Sektor peningkatan peranan dan fungsi wanita di bidang ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan penyuluhan pada KUBE</li> <li>2. Pelatihan dan ketrampilan</li> <li>3. Bantuan modal</li> </ol>	Kelompok-kelompok wanita pedagang
VII.	Sektor Infokom	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan kader wanita pedesaan</li> <li>2. Pembinaan dan penyuluhan</li> <li>3. Bantuan sarana dan stimulan</li> <li>4. Pengadaan buku bacaan dan brosur</li> </ol>	Kelompok penerangan wanita
VIII.	Sektor Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percontohan kegiatan</li> <li>2. Penyuluhan dan pembinaan tentang usaha tani, ternak dan perikanan</li> <li>3. pembentukan dan pembinaan kelompok</li> </ol>	Kelompok wanita tani
IX.	Sektor TP-PKK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan kelembagaan PKK deas, Dukuh, RW, RT, Dasa wisma</li> <li>2. pembinaan dan pembentukan kelompok</li> <li>3. Bantuan sarana stimulan</li> </ol>	TP PKK Desa, Dusun, RW, RT
X.	Sektor Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pelatihan kelompok usaha kecil menengah</li> <li>2. Bantuan modal</li> <li>3. Bantuan pemasaran produk</li> </ol>	Kelompok wanita usaha
XI.	Sektor BKKBN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyuluhan KB di Posyandu</li> <li>2. Penyuluhan dan pembinaan keluarga berkualitas</li> <li>3. Sosialisasi</li> <li>4. Bantuan Sarana, Prasarana serta stimulan</li> </ol>	PUS, Remaja

Sumber: Laporan hasil kegiatan P2WKSS KPPPA Kab. Malang

Upaya ini melibatkan seluruh komponen masyarakat dengan difasilitasi pemerintah. Upaya yang telah dilakukan meliputi:

a. Penyelenggaraan Posyandu

Di Desa Bringin telah terbentuk sebanyak 5 Posyandu. Perbandingan antara jumlah posyandu dan balita adalah 1:20.

b. Kesehatan Ibu dan Anak

Guna meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak telah dilakukan penyuluhan dan bimbingan khususnya kepada para ibu hamil. Jumlah ibu hamil pada satu tahun terakhir sejumlah 23 orang, yang telah tertangani dan melakukan pemeriksaan rutin pada Posyandu yang ada.

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat terus dilakukan dan diupayakan sejak dini mulai dari dalam kandungan, balita, usia sekolah, remaja, dewasa dan lansia. Upaya-upaya tersebut antara lain seperti:

- 1) Penimbangan balita untuk pemantauan pertumbuhan anak
- 2) Pemeriksaan kehamilan
- 3) Iminisasi bayi dan ibu hamil
- 4) Pemberian makanan tambahan (PMT)
- 5) Pemberian kapsul vitamin A
- 6) Penyuluhan perorangan oleh kader kesehatan
- 7) Pemberian rujukan bagi kasus yang tidak bisa dilayani di Posyandu

Selain kegiatan diatas, Posyandu juga melaksanakan imunisasi/vaksinasi bagi bayi dan ibu hamil yang dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan kegiatan posyandu, dan diberikan sesuai dengan aturan kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi.

*(Sumber: Laporan hasil kegiatan P2WKSS KPPPA Kab. Malang)*

## II. Sektor Peningkatan Peran Perempuan dalam KSS.

Komponen pemeliharaan lingkungan dan rumah tangga, peran pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera.

Dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan dan pembinaan tentang kebersihan lingkungan dengan sasaran pekarangan, jalan, saluran air limbah, jamban keluarga dan penggunaan air bersih. Dalam kegiatan ini telah didukung juga oleh instansi terkait seperti pemugaran rumah yang dilakukan oleh Kantor Perumahan dengan dana stimulant dari pusat, TP PKK dengan pemanfaatan Toga.

(Sumber: Laporan hasil kegiatan P2WKSS KPPPA Kab. Malang)

### III. Sektor Hukum.

Komponen penyuluhan hukum.

Dalam masyarakat kita, utamanya masyarakat pedesaan. Walau mereka sudah hidup berkeluarga, masih banyak yang belum tahu persis tentang UU Perkawinan, khususnya dalam pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan. Untuk itu perlu adanya penyuluhan tentang aturan hukum pada umumnya dan undang-undang perkawinan pada khususnya, yaitu dengan cara membentuk kelompok-kelompok kadarkum. Selain itu juga, bagian hukum juga telah melakukan sosialisasi tentang UU KDRT, Trafiking, UU Perkawinan yang didukung oleh kantor Departemen Agama serta diberikan juga bantuan buku-buku mengenai hukum.

(Sumber: Laporan hasil kegiatan P2WKSS KPPPA Kab. Malang)

### IV. Sektor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Komponen program pendidikan luar sekolah.

Dinas pendidikan Kabupaten Malang sangat konsern dengan pentingnya peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan baik dibidang teknis maupun non teknis, sebagai penopang utama untuk meningkatnya pembangunan diberbagai bidang bagi masyarakat pada umumnya, dan pada kaum wanita pada khususnya. Dalam program P2WKSS di Desa Bringin, antara lain telah dilaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah, anatara lain yaitu:

#### a. Keaksaraan Fungsional

Berdasarkan data pada akhir tahun 2007, 98 orang penduduk Desa Bringin buta huruf atau tidak tamat SD/MI. Dari jumlah tersebut,

40 orang adalah wanita. Selanjutnya dibina melalui kegiatan Keaksaraan Fungsional dan Keaksaraan Fungsional lanjutan yang diatur sesuai jadwal kegiatan yang sudah direncanakan.

- b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak  
Kepedulian masyarakat untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sejak dini melalui pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus diupayakan semaksimal mungkin. Melalui program P2WKSS di Desa Bringin ini sudah diselenggarakan PAUD Pertiwi melalui swadaya masyarakat, yang menampung 20 anak dengan usia antara 0-6 tahun. Sedangkan untuk Taman Kanak-Kanak ada 2 sekolah yaitu TK Dharma Wanita terletak di Dusun Garotan yang menampung sebanyak 35 anak, dan TK Swadaya Masyarakat terletak di Dusun Boros yang menampung sebanyak 30 anak. Sumber dana ini didapat dari swadaya masyarakat dan donatur.

- c. Kelompok Belajar Usaha (KBU)  
Upaya untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dilakukan melalui pemberian keterampilan warga binaan dalam kegiatan Kelompok Belajar Usaha (KBU. Warga binaan KBU merupakan lanjutan dari warga belajar Keaksaraan Fungsional (KF), dengan diberi bimbingan cara-cara mengelola usaha, dengan harapan agar warga binaan dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan mampu memproduksi dan memasarkan produksinya.

*(Sumber: Laporan hasil kegiatan P2WKSS KPPPA Kab. Malang)*

#### V. Sektor Disperindang.

Komponen bimbingan pengembangan kelompok usaha wanita bina swadaya ke arah kewirausahaan.

Dalam kegiatan ini telah dilakukan pengelompokan usaha wanita dalam bidangnya untuk diberikan pembinaan antara lain yaitu dengan memberikan kemudahan untuk mengurus ijin usaha. Serta dilakukan pelatihan dan penyuluhan pengembangan usaha rumah tangga dengan memberikan bantuan berupa mesin bordir.

(Sumber: Laporan hasil kegiatan P2WKSS KPPPA Kab. Malang)

#### VI. Sektor Peningkatan Peran Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal.

Komponen peningkatan peranan dan fungsi wanita di bidang ekonomi.

Didalam sektor ini kegiatan awal yang dilaksanakan adalah identifikasi sumber daya kelompok dan jenis usaha yang dikelola oleh kader maupun warga binaan dalam upaya untuk menambah pendapatan keluarga, anggota kelompok dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di desa. Selanjutnya dari Tim Pembina tingkat kabupaten yang terdiri dari Kantor Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, Tim Penggerak PKK, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Kantor Penanaman Modal melakukan pembinaan, penyuluhan dan pendampingan pada kelompok yang ada baik secara administrasi, pelatihan manajemen sederhana, pelatihan pengembangan usaha serta pemberian bantuan baik berupa peralatan sederhana maupun bantuan berupa modal bergulir. Kemudian Tim pembina melatih anggota kelompok binaan tersebut dengan keterampilan yang sesuai dengan jenis usahanya. Hasilnya di Desa Bringin Kecamatan Wajak menghasilkan berbagai macam usaha seperti menjahit, industri makanan kecil dan anyaman bambu.

(Sumber: Laporan hasil kegiatan P2WKSS KPPPA Kab. Malang)

#### VII. Sektor Infokom.

Komponen penerangan wanita pedesaan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender, khususnya kepada kaum wanita, telah dilakukan kegiatan berupa penyuluhan dan pembinaan oleh SKPD terkait, antara lain: melakukan dialog interaktif di Radio Kanjuruhan yang bekerjasama dengan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, humas tentang topik-topik masalah wanita dengan segala permasalahan yang berkaitan dengan kesetaraan gender, KDRT, TKW dan informasi-informasi terbaru seputar pelaksanaan program terpadu P2WKSS dengan harapan agar semua warga masyarakat tahu

dan mau melaksanakan program-program yang telah diajarkan oleh Dinas sektoral. Di desa Bringin Kecamatan Wajak ini telah terbentuk Kelompok Penerangan Wanita Desa yang diberi nama “SRIKANDI” yang mempunyai peran pembantuan dalam rangka penyebarluasan program P2WKSS kepada warga masyarakat. Dengan adanya kelompok ini maka semua program dari Dinas yang masuk ke Desa Bringin akan diketahui dan dipantau bersama-sama oleh semua komponen masyarakat.

(Sumber: Laporan hasil kegiatan P2WKSS KPPPA Kab. Malang)

#### VIII. Sektor Pertanian.

Komponen peran wanita dalam usaha pertanian.

Pembinaan peran wanita dalam usaha pertanian diarahkan pada upaya peningkatan usaha pertanian yang meliputi peningkatan pemanfaatan pekarangan dan peningkatan usaha produktif melalui pelatihan pengelolaan hasil pertanian, penyuluhan teknis pemanfaatan pekarangan dan bantuan stimulan bibit serta pupuk. Kegiatan-kegiatan pembinaan wanita dalam usaha pertanian meliputi beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

##### a. Kegiatan pengelolaan lahan pekarangan

Dengan potensi lahan yang terbatas, pembinaan diarahkan pada pemanfaatan lahan secara efektif, melalui penanaman: kangkung darat, kacang panjang, terong, lombok, bayam, dan tomat. Sedangkan untuk pengembangan tanaman buah-buahan yang dibudidayakan adalah mangga 1200 pohon, jambu 1100 pohon, rambutan 200 pohon, pepaya 750, dan pisang 300 rumpun. Lebih lanjut, pembinaan-pembinaan itu dilakukan antara lain melalui:

- 1) Pemberian stimulan berupa bibit buah-buahan, bibit sayuran, polibag, pupuk dan sarana pengelolaan hasil pertanian.
- 2) Pemberian pelatihan keterampilan pengelolaan hasil pertanian, pembuatan kompos dan teknis budidaya tanaman pot.
- 3) Pembuatan percontohan demplot, dan tanaman pekarangan

- 4) Penyuluhan tentang pemanfaatan pekarangan
- b. Kegiatan usaha peternakan

Kegiatan usaha peternakan dilakukan dalam bentuk pembinaan kader, pembinaan administrasi, penyuluhan kelompok dan pemberian bantuan ternak sapi/kambing. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader baik secara teknis maupun manajemen, sehingga dapat memanfaatkan pekarangannya lebih produktif yang selanjutnya pada akhirnya dapat menunjang kebutuhan gizi keluarga serta meningkatkan pendapatan. Ternak yang dibudidayakan antara lain yaitu: sapi, kambing, ayam, ikan koi. Sedangkan bentuk pembinaan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Penyuluhan kader/kelompok peternakan sebanyak 6 kelompok
  - 2) Pembinaan lapangan dilaksanakan 1 kali/bulan meliputi pemberian vaksinasi dan kebersihan kandang
  - 3) Pemberian bantuan ternak sapi sistem bagi hasil
  - 4) Sosialisasi dan pelatihan biogas.
- c. Kegiatan usaha perikanan

Kegiatan pembinaan diarahkan pada upaya-upaya budidaya ikan hias di tanah pekarangan, mengingat potensi sumber air untuk usaha perikanan di Desa Bringin cukup baik. Adapun ikan yang dibudidayakan diupayakan untuk dikembangkan dengan jenis-jenis ikan yang lain seperti ikan gurami, ikan lele, atau ikan nila.

*(Sumber: Laporan hasil kegiatan P2WKSS KPPPA Kab. Malang)*

## IX. Sektor TP-PKK.

Komponen gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Di Desa Bringin Kecamatan Wajak telah terbentuk kepengurusan PKK tingkat desa dengan anggota pengurus sebanyak 35 orang yang duduk di sekretariat serta Pokja I s/d Pokja IV. Dalam melaksanakan kegiatan, Tim Penggerak PKK desa mendapat bimbingan dan arahan serta pendampingan dari Tim Penggerak PKK Kecamatan, Tim

Penggerak PKK Kabupaten serta Dinas/Instansi terkait. Kegiatan yang dilaksanakan terinci sebagai berikut:

1. Seretariat, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
  - a. Pemantapan kelembagaan PKK dari Tingkat Dasa Wisma/RT/RW/Dusun/Desa dengan jumlah masing-masing 110 PKK Dasa Wisma, 45 PKK RT, 19 PKK RW, 3 PKK Dusun yang dimana administrasi masing-masing lengkap sesuai dengan pedoman Umum Gerakan PKK
  - b. Pelatihan kader umum dan kader khusus
  - c. Pembinaan administrasi kelompok
  - d. Bantuan sarana dan prasarana sekretariat
2. Pokja I
  - a. Penyuluhan kesadaran bela negara
  - b. Membentuk kelompok pengajian
  - c. Anak asuh
  - d. Menumbuhkan jiwa gotong royong yang diimplementasikan dalam gerakan Jum'at bersih serta menggalang dana swadaya untuk mendukung kegiatan kelompok.
3. Pokja II
  - a. Membentuk kelompok pra koperasi, serta simpan pinjam untuk anggota PKK. Kegiatan ini mendapatkan penyuluhan dan bimbingan dari Tim Penggerak PKK Kabupaten, Dinas Koperasi dan UMKM, KPPPA, serta Kantor Penanaman modal
  - b. Pemberantasan Tri Buta dengan membentuk Kelompok Keaksaraan Fungsional yang diberi nama “ Mawar 1,2,3 ” dengan jumlah warga binaan masing-masing 10 orang
  - c. Untuk menampung anak usia 3-5 tahun yang membutuhkan pendidikan dini telah dibentuk juga PAUD “PUTRA PERTIWI” dengan jumlah anak didik 30 anak
  - d. Pelatihan ketrampilan antara lain menjahit, membuat kue, salon rias dan potong rambut yang semuanya itu memberikan

dampak pada penambahan pendapatan keluarga karena para peserta kursus membentuk kelompok usaha

- e. Membentuk kelompok BKB. Dengan kegiatan antara lain mengelola UPPKS yang mendapar binaan dari badan KB, Tiim Penggerak PKK, KPPPA, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Kesehatan.
4. Pokja III, kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
    - a. Membentuk percontohan TOGA dengan memberikan kursus/pelatihan membuat aneka TOGA misalnya jahe instan, balsem jahe, sirup jeruk purut, kripik jahe, dan lain-lain.
    - b. Pelatihan olahan aneka makanan misalnya kripik tempe, kue kering, kripik singkong, selai nanas, sale pisang, aneka olahan ikan, dan lain-lain. Kegiatan ini mendapat bimbingan dan penyuluhan dari Tim Penggerak PKK, Badan Ketahanan Pangan dan Petugas Penyuluhan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan.
    - c. Membuat gazebo sebagai tempat kumpul untuk tukar pendapat informasi bagi kelompok-kelompok yang lain.
    - d. Percontohan rumah sehat.
    - e. Percontohan RT/RW yang menerapkan lahan untuk PTP.
  5. Pokja IV, kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
    - a. Posyandu dengan jumlah 7 Pos yang tersebar di 3 Dusun. Dengan kategori 1 Mandiri di Dusun Bringin Posyandu “Angrek II”.
    - b. Penyuluhan dan pembinaan untuk perilaku hidup sehat.
    - c. Penyuluhan tentang bahaya penyakit menular.
    - d. Penyuluhan NAPZA.

(Sumber: Laporan hasil kegiatan P2WKSS KPPPA Kab. Malang)

#### X. Sektor Koperasi.

Komponen penyuluhan bidang perekonomian.

Didesa Bringin terdapat kurang lebih 29 jenis usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh kader dan warga binaan. Untuk

mengembangkan usaha baik secara modal maupun produksi telah mendapat bimbingan dan penyuluhan dari Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Penanaman modal, Tim Penggerak PKK. Sedangkan untuk jenis usaha yang dikelola antara lain di sektor industri rumahan, perbengkelan, pembibitan tanaman keras, peternakan, perikanan maupun keterampilan.

*(Sumber: Laporan hasil kegiatan P2WKSS KPPPA Kab. Malang)*

#### XI. Sektor BKKBN.

Komponen pengendalian keluarga berencana dan kesehatan.

Pembinaan program keluarga diarahkan pada pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi untuk menuju keluarga sejahtera serta pemberdayaan anggota keluarga dalam berbagai kegiatan yang sesuai dengan kemampuan bidangnya masing-masing. Program ini sudah merupakan kebutuhan bagi pasangan usia subur untuk penataan kehidupan yang ideal baik dari sisi ekonomi dan kesehatan. Dari data yang ada peserta KB khususnya pasangan usia subur dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan.

*(Sumber: Laporan hasil kegiatan P2WKSS KPPPA Kab. Malang)*

#### c. **Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha (P3EL).**

Dalam rangka peningkatan peran serta perempuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pedesaan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan yaitu melalui diadakannya kegiatan P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal) yang tujuannya mendorong lebih banyak kaum perempuan untuk berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemampuan yang berkelanjutan dalam kegiatan usaha ekonomi lokal. Salah satu bentuk usaha yang dilakukan untuk memberdayakan kelompok usaha yang dikelola oleh perempuan yaitu dalam bentuk pemberian bantuan peralatan untuk meningkatkan

produksi usaha mereka. (Sumber: Laporan hasil kegiatan P3EL KPPPA Kab. Malang)

Adapun syarat-syarat untuk memperoleh bantuan tersebut dijelaskan oleh Ibu Aminin, SH sebagai berikut:

*“Syarat-syarat untuk memperoleh bantuan P3EL ini ada 5 (lima) mbak, yaitu: pertama, terbentuknya kelompok usaha yang dikelola khusus untuk usaha yang dikelola oleh kaum perempuan yang sudah berjalan. Kedua, diharuskan mengajukan proposal. Ketiga, Lokasi penilaian P2WKSS. Keempat, ada tanda-tanda kehidupan dalam usaha kelompok tersebut. Kelima, ketua UPK (Unit Pengelola Keuangan) P3EL harus mempunyai rekening di BANK setempat (BRI)”. (Hasil Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2009)*

Peserta yang mengikuti kegiatan penyerahan bantuan peralatan program P3EL adalah 5 (lima) kelompok usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh perempuan dengan memanfaatkan potensi lokal desa. Kegiatan penyerahan bantuan peralatan P3EL untuk kelompok usaha ekonomi produktif yang dikelola perempuan ini dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus s/d 26 Agustus 2008, karena keterbatasan anggaran untuk pemberian bantuan peralatan kepada kelompok usaha ekonomi produktif yang dikelola perempuan dari dana APBD Kabupaten Malang tahun 2008, maka dari hasil identifikasi di 33 Kecamatan diperoleh desa-desa yang mempunyai kelompok usaha produktif yang dikelola perempuan dengan memanfaatkan potensi lokal desa sebanyak 5 Desa di 5 Kecamatan, sebagai berikut:

1. Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen, dengan jenis usaha yang dikelola adalah bordir, menjahit, kue, krupuk, bakso, mlijo dan jenang.
2. Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo, dengan jenis usaha yang dikelola adalah kripik jahe, kripik singkong dan kue kering.
3. Desa Klompok Kecamatan Singosari, dengan jenis usaha yang dikelola adalah Lontong sayur, terangbulan, gorengan, bakso, jamu, telur asin dan aneka jus.
4. Desa Kemiri Kecamatan Jabung, dengan jenis usaha yang dikelola adalah permen susu dan penjahitan.

5. Desa Bendosari Kecamatan Pujon, dengan jenis usaha yang dikelola adalah peracangan, mlijo, penjahitan dan salon.

(Sumber: Laporan hasil kegiatan P3EL KPPPA Kab. Malang)

Dari hasil identifikasi kebutuhan dan jenis usaha ekonomi produktif yang dikelola perempuan dengan memanfaatkan potensi lokal desa (P3EL), maka diperoleh rekap jenis bantuan peralatan yang diberikan oleh masing-masing kelima kelompok tersebut, yang akan dijelaskan pada **tabel 4** berikut ini:

**Tabel 4. Jenis Bantuan yang Diberikan Pada Pelaksanaan P3EL di Lima Kecamatan di Kabupaten Malang**

No	Desa/Kecamatan	Jenis Usaha	Jenis Bantuan
1.	Tawangrejeni Kec. Turen	a. Bordir b. Menjahit c. Kue d. Krupuk e. Bakso f. Jenang g. Mlijo	1. Mesin Obras 1 buah 2. mesin Bordir Juki 1 buah 3. Mesin jahit Butterfly 1 buah 4. Oven "Hock" 1 buah 5. Kompor gas sigle komplet 3 unit
2.	Desa gadungsari Kec. Tirtoyudo	a. Kripik singkong b. Kripik jahe c. Kue kering	1. Alat pemotong singkong 4 buah 2. Wajan lengkap 4 unit 3. Kompor gas single komplet 6 unit 4. Oven "Hock" 2 buah
3.	Desa Klampok Kec. Singosari	a. Lontong sayur b. Terangbulan c. Gorengan d. Bakso e. Jamu f. Telor asin g. Aneka jus	1. Kompor gas single komplet 6 buah 2. panci ukuran 36, 3 buah 3. Wajan lengkap 2 buah 4. Blender Panasonic 2 buah 5. Dandang bakso 1 buah 6. Pemotong singkong 2 buah
4.	Desa Kemiri Kec. Jabung	a. Permen susu b. Penjahitan	1. mesin jahit Butterfly 2 buah 2. Kompor gas single komplet 1 buah 3. Mesin pengaduk+dinamo 1 unit 4. Alat pengemas 1 buah 5. Tempat adonan
5.	Desa Bendosari Kec. Pujon	a. Pracangan b. Mlijo c. Penjahitan d. Salon	1. Timbangan 5 buah 2. Blender Panasonic 1 buah 3. Mixer philip 1 buah 4. Cathok rambut Farber 1 buah 5. Mesin jahit Butterfly 1 buah 6. Mesin obras 1 buah

Sumber: Laporan hasil kegiatan P3EL KPPPA Kab. Malang

#### d. Fasilitasi Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan.

Perempuan merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi juga harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun dalam kenyataannya di masyarakat, masih banyak perempuan yang dipandang sebagai kelompok masyarakat dengan strata yang lebih rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki, sehingga sering menjadi tindak kekerasan.

Situasi tindak kekerasan terhadap perempuan semakin hari semakin kompleks dan tidak bisa dipandang dari salah sudut saja. Bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan dalam bentuk psikis juga termasuk tindak kekerasan terhadap perempuan. Selain itu juga terdapat tindak *trafficking* (perdagangan orang), yang kebanyakan korbannya yaitu kaum perempuan. Keadaan tersebut sudah disadari oleh pemerintah kita. Ini terbukti dengan makin banyaknya perundang-undangan yang disahkan oleh pemerintah, diantaranya adalah UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemilu dan Partai Politik. Perundang-undangan tersebut sebagai kelanjutan dari UU sebelumnya, diantaranya adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau CEDAW (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia), dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan untuk di Kabupaten Malang terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Semua perundang-undangan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat Kabupaten Malang pada khususnya, terutama bagi perempuan dan anak,

karena semua ketentuan undang-undang tersebut memberikan pengaturan dan sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan. Agar semua ketentuan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum tersebut dapat dijalankan maka harus dilakukan sosialisasi, advokasi dan implementasi yang didorong dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

Berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang melakukan serangkaian program kegiatan baik itu berupa sosialisasi tentang KDRT dan *trafficking* maupun memberikan berupa perlindungan, pelayanan, dan pendampingan bagi korban dari tindak kekerasan yang pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan di Desa SumberSuku Kecamatan Tajinan. (*Sumber: Laporan hasil kegiatan Sosialisasi, Fasilitasi, serta advokasi tindak KDRT dan trafficking KPPPA Kab. Malang*)

Sasaran yang menjadi peserta dalam kegiatan sosialisasi KDRT dan *trafficking* dijelaskan oleh Dra. Ida Sari Wardhani sebagai berikut:

*“Ada 6 (enam) sasaran mbak yang kami libatkan dalam pelaksanaan kegiatann sosialisaso KDRT dan trafing ini. Pertama, Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Kedua, Kepala Sekolah dan Kepala UPTD (Unit Pelaksana Tehnis Desa). Ketiga, Masyarakat dan perangkat desa setempat. Keempat, Ibu-ibu anggota fatayat NU. Kelima, siswa-siswi SMP maupun SMA. Dan keenam para petugas PJTKI”.* (*Hasil wawancara pada tanggal 19 Agustus 2009*)

Dalam kegiatan ini Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang juga bekerjasama dengan POLRES Malang, *Women Cricis Center (WCC)*, serta RSUD Kepanjen Kabupaten Malang. Tujuan dari kerjasama ini yaitu supaya untuk lebih memberikan pemahaman dan fasilitasi terhadap korban tindak kekerasan, yang berupa mekanisme pelayanan dan penanganan korban KDRT. Mulai dari korban sendiri atau dengan didampingi kader paralegal atau keluarga melaporkan tindak kekerasan kepada POLSEK/POLRES setempat sesaat setelah terjadinya tindak KDRT. Untuk memperoleh surat pengantar ke Rumah

Sakit Umum atau Rumah Sakit lain yang ditunjuk oleh polisi, guna untuk mendapatkan *Visum et Repertum* (VeR) untuk merekam adanya KDRT fisik dan mendapatkan *Visum er Psichiatrium* (VeRP) untuk merekam adanya KDRT psikologis. Kemudian kepolisian memproses gugatan hukum korban di pengadilan, selain itu juga Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UPPA) memberikan penanganan korban pasca proses hukum seperti melakukan rehabilitasi kesehatan dan sosial dengan didampingi kader dari WCC/LSM/PONPES, serta memberdayakan potensi korban dengan memberikan keterampilan yang bekerjasama dengan anggota Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.

Sementara itu, kasus tindak kegiatan *trafiking* (perdagangan orang) yang kebanyakan korbannya perempuan juga semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang oleh Pemerintah RI diatur pada Undang-undang No.21 Tahun 2007. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang sebagai pelaksana di tingkat daerah memberikan sosialisasi-sosialisasi tentang tindak *trafiking*. Sosialisasi yang dilakukan berupa pemberian penjelasan Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, memberikan gambaran umum tentang tindakan-tindakan yang termasuk dalam tindak *trafiking*, serta memberikan gambaran secara umum tentang ancaman pidana (hukuman) bagi *trafiker* atau pelaku *trafiking* menurut UU No.21 Tahun 2007 ataupun menurut berbagai UU di luar UU No.21 Tahun 2007.

Dengan adanya program-program kegiatan diatas, diharapkan dewasa ini makin memiliki kesadaran hukum bagi masyarakat Kabupaten Malang, terutama bagi perempuan tentang apa saja yang menajadi hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. (Sumber: Laporan hasil kegiatan Sosialisasi, Fasilitasi, serta advokasi tindak KDRT dan *trafiking* KPPPA Kab. Malang)

#### **4. Kendala yang dihadapi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang**

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap melaksanakan suatu program kegiatan banyak sekali kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaannya, kendala itu datang baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Demikian halnya dengan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam upaya menciptakan pembangunan sumberdaya manusia yang berwawasan gender melalui kegiatan-kegiatan memberdayakan perempuan Kabupaten Malang. Kendala-kendala tersebut lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

##### **a) Kendala yang bersifat Internal**

Kendala yang bersifat internal merupakan kendala atau faktor penghambat yang datang dari tubuh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang itu sendiri maupun dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Malang.

Umumnya kendala yang dihadapi oleh berbagai instansi adalah persoalan mengenai dana, demikian juga dengan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Kendala mengenai dana merupakan faktor penghambat bagi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Kendala tersebut juga disadari oleh para pegawai Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Seperti dalam kegiatan fasilitasi perlindungan terhadap tindak kekerasan, dari dana yang disediakan hanya 20% yang baru dicairkan untuk kegiatan identifikasi korban KDRT dan Trafiking yang akan diadvokasi. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (P3EL) dananya juga baru dicairkan 35%. Sedangkan untuk kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga (P2WKSS) dan kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peranserta dan kesetaraan gender tidak memiliki kendala dalam hal pencairan dana dalam pelaksanaan kegiatan.

Meskipun demikian, persoalan dana tidak diabaikan begitu saja. Pemerintah Kabupaten Malang berupaya semaksimal mungkin untuk menyediakan dana untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini terbukti, meskipun hanya beberapa persen yang dicairkan namun dengan segera mereka mencairkan dana sisanya. Ini merupakan bukti bahwa semua aspek yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ini memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Kendala dana tersebut juga disampaikan oleh ibu Dra. Sri Sulistikanthi sebagai berikut:

“Kalau masalah dana disetiap instansi juga pasti menjadi sebuah kendala mbak. Tetapi selama ini bagi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri masalah dana bukan merupakan sebuah kendala yang berarti selama pemerintah Kabupaten Malang selaku pemangku dana kegiatan masih bertanggung jawab penuh untuk memberikan dana yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor”.  
(Hasil wawancara pada tanggal 8 Juli 2009)

Disetiap instansi pasti memiliki pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dari program kerja yang telah disusun. Pegawai pada umumnya merupakan sebuah kendala dalam setiap instansi, terkait mengenai loyalitas para pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Namun bagi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang para pegawai kantor sampai saat ini memiliki loyalitas dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan setiap program kerja yang akan dilaksanakan. Seperti yang disampaikan oleh ibu Dra. Sri Sulistikanthi sebagai berikut:

“Jika ada kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan program kerja, maka semua para pegawai sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan segera menyelesaikannya. Bahkan, apabila ada kesulitan kita semua para pegawai membantu untuk menyelesaikannya. Intinya, apabila ada kegiatan kita semua ikut serta untuk membantu. Bukan karena kegiatan program kerja tersebut bukan bidang kita terus kita tidak ikut serta, tidak begitu juga mbak”.  
(Hasil wawancara pada tanggal 8 Juli 2009)

Jika peneliti amati sendiri, loyalitas para pegawai Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang memang sudah baik. Ketika ada kegiatan-kegiatan program kerja yang

dilaksanakan, hampir sebagian besar pegawai kantor turut serta dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Mulai dari persiapan bahkan sampai tahap pelaksanaan mereka turut serta. Hanya saja setelah peneliti amati terdapat ketimpangan antara jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di dalam Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Dari 20 (duapuluh) pegawai yang ada, hanya terdapat 6 (enam) pegawai laki-laki dan selebihnya adalah pegawai perempuan. Hal tersebut membuktikan bahwa didalam tubuh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang sendiri masih belum menciptakan kesetaraan dan keadilan gender. Meskipun Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan sebuah instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang tentang pemberdayaan perempuan maupun gender tetapi bukan berarti laki-laki tidak bisa berperan untuk mencapai tujuan tersebut.

b) Kendala yang bersifat eksternal

Kendala yang bersifat eksternal merupakan kendala atau faktor penghambat yang datang dari luar tubuh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Kegiatan pelaksanaan program P3EL misalnya yang mengalami kendala dalam hal pengembalian uang modal yang diberikan kepada kelompok usaha. Modal yang diberikan kepada para kelompok usaha ini merupakan modal bergilir yang pada nantinya modal tersebut akan digunakan oleh kelompok usaha lainnya. Hal yang demikian dibenarkan oleh ibu Aminin, SH. sebagai berikut:

“Betul mbak, masalah pengembalian uang modal yang diberikan kepada kelompok usaha merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan P3EL. Fenomena tersebut biasanya dikarenakan usaha yang dikelola oleh kelompok usaha tersebut yang bankrut, sehingga jarang yang bisa mengembalikan modalnya. Atau juga apabila setelah diberi modal usaha, banyak sekali dari kelompok usaha yang tidak dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan usahanya, yang pada akhirnya hanya

dijadikan sebagai ajang coba-coba saja”. (*Hasil wawancara pada tanggal 8 Juli 2009*)

Menanggapi pernyataan diatas, para kelompok usaha membenarkan bahwa kendala diatas memang sering terjadi pada kelompok usaha, tidak hanya terjadi pada kelompok usaha mereka saja. Hal ini dijelaskan oleh ibu Luluil Farida Widyawati yang merupakan salah satu anggota kelompok usaha dari program pelaksanaan P3EL.

“Iya mbak, kendala setelah kita mendapatkan modal usaha memang kesulitan untuk mengembalikan modal tersebut. Ini dikarenakan setelah memulai usaha, banyak dari anggota kelompok usaha yang tiba-tiba mengundurkan diri dari usaha, yang mengakibatkan para anggota lainnya juga tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan usaha”. (*hasil wawancara pada tanggal 27 Juli 2009*)

Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan, Kepribadian dan Pengarusutamaan Gender Bagi Istri Camat dan Istri Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Malang. Dalam hal kehadiran peserta tidak terlalu mengalami kendala, meskipun dari 425 jumlah peserta yang diundang terdapat 3 peserta yang tidak hadir karena beberapa alasan seperti ada yang sedang melahirkan maupun ada yang sedang mempunyai hajatan. Namun, kendala yang menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan kegiatan ini yaitu masalah para peserta yang masih memiliki balita. Ini menjadi kendala, karena ini sangat mengganggu di setiap sesi pelajaran yang mereka ikuti. Hal ini juga yang diamati langsung oleh ibu Dra. Sri Sulistikanthi, dalam pengamatan beliau secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini.

“Memang itu mbak kendala yang cukup mengganggu dalam pelaksanaan pelatihan ini. Sebenarnya kita juga menyadari bahwa para peserta kebanyakan juga masih memiliki balita yang tidak bisa ditinggal apalagi kalau masih menyusui, sehingga KPPPA Kab. Malang membuat kebijakan, sementara ibunya mengikuti pelatihan anaknya diasuh oleh pengasuh di luar ruangan. Sehingga maksud mereka, ibunya juga masih bisa mengawasi anaknya. Inilah, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pelatihan karena konsentrasi peserta terbagi menjadi dua antara mengikuti pelajaran pelatihan dengan mengawasi anaknya”. (*Hasil wawancara pada tanggal 8 Juli 2009*)

Mengenai kendala diatas juga disadari oleh para peserta pelatihan yang memiliki balita serta membawa mengikuti masa pelatihan. Menurut ibu Nurja'iyah, salah satu peserta dari pelatihan mengungkapkan sebagai berikut:

“Kalau mempunyai balita kan memang sulit untuk ditinggalkan mbak, apalagi apabila balita kita masih menyusu. Sehingga jalan satu-satunya yaitu kita bawa ikut dalam pelatihan ini. Untuk lebih membantu kita dalam mengawasi mereka kita akhirnya juga mengajak para pengasuh supaya lebih memudahkan kita untuk mengikuti proses belajar pelatihan ini. Walaupun begitu saya sendiri juga merasa konsentrasi saya tidak terlalu penuh untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini, begitu juga sama halnya yang dirasakan oleh ibu-ibu lainnya yang membawa balitanya mengikuti pelatihan ini”. (*Hasil wawancara pada tanggal 28 Juli 2009*)

Untuk pelaksanaan kegiatan P2WKSS, sebagian masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan dan akses kaum perempuan karena rendahnya tingkat pendidikan serta rendahnya akses di bidang ekonomi. Hal ini disebabkan karena perempuan memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus membantu juga mencari nafkah tambahan. di Desa bringin Kecamatan Wajak yang merupakan tempat pelaksanaan kegiatan P2WKSS ini, wanita diatas umur 20 tahun sebanya 1714 orang dengan tingkat pendidikan rata-rata lulus SD/MI dan itupun juga sudah dinikahkan. Sehingga upaya pembinaan serta dalam pelaksanaan program melalui keterlambatan dalam penerapannya. Ini disebabkan oleh faktor lambatnya pemahaman karena terbatasnya waktu karena harus mengurus anak. (*Sumber: Laporan hasil kegiatan P2WKSS KPPPA Kab. Malang*)

Sedangkan mengenai kegiatan Fasilitasi Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan yang bentuk kegiatannya berupa sosialisasi peraturan daerah tentang KDRT dan *trafiking*. Dalam pelaksanaan kegiatan ini juga tidak lepas dari masalah yang menghambat. Kendala budaya masyarakat setempat mengenai anggapan bahwa masalah keburukan keluarga merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan dengan orang lain. Sehingga apabila perempuan tersebut mengalami tindak

KDRT maupun menjadi korban *trafficking* sangat sulit sekali untuk dimintai keterangannya. Seperti keterangan yang disampaikan oleh ibu Aminin, SH. sebagai berikut:

“Ketika kami ingin menjembatani dan membantu korban KDRT yang menjadi kendala biasanya sulit sekali meminta keterangan dari para korban untuk menjelaskan secara terperinci seperti apa permasalahannya yang sebenarnya sampai terjadinya tindak KDRT terhadap dirinya. Biasanya ketika kami mintai keterangan banyak hal yang ditutupi sehingga kami tidak bisa maksimal dalam membantu. Faktor budaya masyarakat yang beranggapan bahwa aib keluarga harus ditutup-tutupi inilah yang menghambat, karena apabila menceritakan aib keluarga itu sama saja dengan membuka aib keluarganya sendirinya. Selain itu faktor ancaman kepada mereka dari suami ataupun pihak lain juga mempengaruhi mereka untuk takut melaporkan kejadian tindak KDRT tersebut kepada pihak kepolisian”. (*Hasil wawancara pada tanggal 8 Juli 2009*).

## **B. Pembahasan**

### **1. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berwawasan Gender Oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang**

Pada bab II halaman 36 telah dibahas mengenai model pendekatan perempuan dalam pembangunan. Untuk dapat menciptakan pembangunan sumber daya manusia yang berwawasan gender diperlukan sebuah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender didalam aspek kehidupan. Beberapa model pendekatan perempuan dalam pembangunan ini merupakan komponen penting untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. Mengingat bahwa hasil pembangunan menunjukkan, dalam hampir semua bidang kehidupan pencapaian perempuan masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Model pendekatan perempuan dalam pembangunan tersebut, antara lain yaitu: WID (*women in development*), WAD (*women and development*), GAD (*gender and development*).

WID (*women in development*), dalam strategi ini perempuan masih dipandang menjadi masalah, karena kurang mampu bersaing dengan potensi kaum laki-laki. Oleh karena itu, pendidikan ataupun pelatihan

merupakan program utama bagi perempuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar mampu bersaing dalam pembangunan. Namun hasilnya, kemampuan tersebut justru di manfaatkan untuk menghemat biaya pembangunan, karena posisi perempuan masih subordinat. Dalam strategi ini perempuan memang dilibatkan dalam proses pembangunan, tetapi otonomi perempuan sama sekali diabaikan.

WAD (*women and development*), strategi ini menyelesaikan masalah dengan meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan, dengan menitikberatkan pada pengembangan peningkatan pendapatan tanpa memperhatikan unsur waktu yang digunakan oleh perempuan. Ini berarti kaum perempuan justru telah mendukung eksistensi struktur masyarakat yang timpang atau secara tidak sadar perempuan telah mendukung penindasan terhadap kaumnya sendiri. Sedangkan, strategi GAD (*gender and development*) berupaya menyelesaikan masalah dengan mengubah paradigma dari wawasan patriarkhis ke wawasan gender, sehingga perempuan mempunyai akses kontrol di semua bidang pembangunan. GAD tidak hanya memperhatikan kaum perempuan saja, tetapi lebih memperhatikan perempuan dalam konstruksi sosial gender yang memberi peran tertentu pada perempuan dan laki-laki. GAD juga melihat kaum laki-laki untuk menaruh perhatian terhadap perempuan, sehingga dapat berperan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Dari ketiga strategi pendekatan perempuan dalam pembangunan diatas, dapat dikatakan bahwa strategi yang seharusnya dilaksanakan dalam setiap upaya untuk menghapuskan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yaitu strategi GAD (*gender and development*).

Melihat dari semua upaya kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam usaha untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender masih belum menyentuh pada pelaksanaan strategi GAD (*gender and development*). Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang masih menggunakan pendekatan WID (*women in development*) disetiap kegiatan yang dilaksanakan. Ini seperti yang terlihat

disetiap kegiatan yang dilaksanakan oleh mereka, misalnya pada poin (a) melaksanakan pelatihan kepemimpinan, kepribadian dan PUG bagi istri camat dan istri kepala desa/kelurahan se Kabupaten Malang, poin (b) melaksanakan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga (P2W-KSS), serta poin (c) menyelenggarakan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (P3EL), poin (d) menyelenggarakan fasilitasi perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. Disini semua bisa terlihat bahwa para peserta yang diikuti sertakan pada kegiatan diatas semuanya adalah para perempuan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih saja berputar-putar dalam WID (*women in development*). Pandangan ini dilatarbelakangi karena masih banyaknya anggapan bahwa perempuan merupakan sebuah masalah, karena tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja laki-laki. Sehingga dianggap perlu untuk untuk dididik baik dalam waktu jangka panjang maupun jangka pendek supaya memiliki kemampuan yang setara dnegan laki-laki. Meskipun kegiatan yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk lebih bisa memberdayakan perempuan, namun tetap saja ini akan memberikan pemahaman terhadap kaum perempuan saja. Sedangkan yang diharapkan dengan tidak adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan tidak ada.

Pada poin (a) dalam melaksanakan pelatihan diperlukan beberapa komponen-komponen yang diperlukan dalam pelatihan dan pengembangan yang ditujukan untuk peningkatan peran perempuan, antara lain yaitu:

- e. Tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan harus jelas dan tepat sasaran
- f. Para pelatih harus ahli di dalam bidangnya (profesional)
- g. Materi yang diberikan harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai
- h. Metode pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan para sumber daya manusia yang menjadi peserta

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dapat dikatakan sudah melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan, kepribadian dan PUG bagi istri camat dan istri kepala desa/kelurahan se Kabupaten Malang ini sesuai dengan komponen pelatihan dan pengembangan yang sudah dijelaskan diatas. Mulai dari tujuan dan sasaran pelatihan, para pelatih, materi yang disampaikan, serta metode pelatihan dan pengembangannya dengan tujuan sebagai upaya untuk mencapai proses penyelenggaraan pelatihan bagi kader pemberdayaan perempuan kedepannya. Meskipun demikian pelaksanaan pelatihan kepemimpinan, kepribadian dan PUG bagi istri camat dan istri kepala desa/kelurahan ini masih tetap berdasarkan pada metode *women in development*.

Pada poin (b), melaksanakan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga (P2W-KSS) ini merupakan salah satu penerapan kebijakan pemberdayaan perempuan yang dilakukan pada masa orde baru. Program integrasi bagi partisipasi perempuan pada pembangunan yang dinamakan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) ini merupakan program kerja yang dilaksanakan melalui organisasi perempuan seperti PKK yang merupakan kelompok utama dalam pergerakan perempuan di Indonesia pada jaman orde baru. PKK ini dikontrol oleh pemerintah melalui Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Para istri gubernur merupakan ketua PKK di setiap provinsi secara otomatis. Demikian pula istri bupati, istri camat, istri lurah adalah ketua PKK pada masing-masing tingkatannya. Selama ini pengurus PKK adalah perempuan dari kelas menengah, seperti guru, petani kaya, serta dipimpin oleh istri pejabat setempat. Mereka mendapatkan kesempatan kekuasaan sosial dan dapat memimpin sesama perempuan di desa. Contohnya saja seperti pelatihan yang dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang diatas, yang dimana pelatihan ini diperuntukkan hanya untuk para istri pejabat setempat saja.

Kegiatan ini memang ditujukan untuk lebih meningkatkan kualitas kaum perempuan, tetapi tujuan tersebut hanyalah tujuan jangka pendek semata. Ketika tujuan untuk meningkatkan kualitas kaum perempuan tersebut tercapai, kemudian tidak ada perubahan paradigma patriarkhis yang sudah melekat di budaya kita kearah paradigma yang berwawasan gender. Maka perempuan sama saja tidak bisa mendapatkan akses dan kontrol yang sama dengan laki-laki di semua bidang pembangunan.

Pada poin (c), menyelenggarakan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (P3EL). Dalam kegiatan ini dapat kita lihat bahwa program ini diperuntukkan hanya untuk kaum perempuan saja. Ini merupakan kegiatan pemberdayaan perempuan yang tujuannya mendorong lebih banyak kaum perempuan untuk berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemampuan yang berkelanjutan dalam kegiatan usaha ekonomi lokal. Tujuan dari Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang untuk melaksanakan kegiatan mungkin cukup bagus, yaitu supaya dengan diberikannya modal dan peralatan untuk membuka usaha, para perempuan dapat membantu perekonomian keluarganya sendiri.

Tetapi melihat dari usaha yang dihasilkan, seperti: menjahit, membuat makanan, mlijo, dll. Ini membuktikan bahwa kemampuan para perempuan untuk meningkatkan kualitasnya hanya sebatas itu, yang pada akhirnya banyak orang mengasumsikan bahwa pada dsarnya perempuan memang hanya bisa mempunyai keterampilan-keterampilan seperti itu saja. Hal ini juga yang di kritik dari pendekatan *women in development*, bahwa pembentukan-pembentukan kegiatan melalui pendekatan WID merupakan kegiatan yang berusaha keras untuk meningkatkan akses perempuan untuk dapat meningkatkan pendapatan saja.

Pada poin (d), menyelenggarakan fasilitasi perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. Bentuk dari kegiatan ini pada nyatanya memang sangat membantu para korban KDRT maupun *trafficking* yang kebanyakan korbannya adalah kaum perempuan. Untuk menghindari dari adanya tindak KDRT maupun *trafficking* ini Kantor Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang juga sudah melaksanakan program sosialisasi Perda tentang tindak pidana KDRT maupun *trafficking* dan sosialisasi tentang keluarga sakinah.

Pelaksanaan dari sosialisasi ini pun menggunakan pendekatan *women in development* (WID), yang masih mengesampingkan keikutsertaan peran laki-laki didalam kegiatan ini. Kegiatan dialog dan diskusi mengenai Perda tentang KDRT dan bagaimana membangun keluarga sakinah tersebut bukan hanya kaum perempuan saja yang berhak diberi pemahaman. Laki-laki juga harus diberi pemahaman supaya antara laki-laki dan perempuan dapat menerapkan secara bersama-sama makna dari keluarga sakinah tersebut pada nantinya. Ini juga merupakan salah satu langkah strategis untuk mengurangi angka tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama ini, khususnya di Kabupaten Malang.

Melihat dari beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan diatas dapat diambil persamaan bahwa Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang masih belum menggunakan metode pendekatan *gender and development* (GAD). Dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan diatas, semuanya masih mengarah ke arah pendekatan *women in development* (WID). Pendekatan yang melanggengkan kaum perempuan itu sendiri kedalam penindasan terhadap dirinya sendiri. Meskipun pembangunan dengan berwawasan gender sudah berdentung, namun pemerintah Indonesia sampai saat ini masih mengandalkan pendekatan WID sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia yang targetnya yaitu untuk memberdayakan kaum perempuan desa yang miskin. Sehingga ini sama saja dengan membentuk secara pribadi ataupun kelompok perempuan hanya sebagai penerima bantuan pembangunan saja, bukan untuk meningkatkan kemampuan perempuan bangsa kita untuk dapat mengorganisasi dirinya sendiri dalam semua bidang pembangunan.

Sebenarnya melalui Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna

terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berwawasan gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2008 juga sudah dijelaskan tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Namun sepanjang pengamatan yang dilakukan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang selama ini hanya melaksanakan program pemberdayaan perempuan tanpa melihat dari segi gender. Yang selama ini dilakukan hanya berusaha untuk menyelesaikan masalah perempuan dengan cara meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan kaum perempuan saja agar mampu bersaing dalam pembangunan, bukannya berusaha untuk menyelesaikan masalah yang mengakibatkan ketidakberdayaan perempuan selama ini yaitu masalah relasi perempuan dan laki-laki yang timpang akibat budaya patriarki yang merugikan kaum perempuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa selama ini dalam melakukan setiap program kerjanya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang masih menggunakan metode pendekatan WID (*women in development*), dan masih belum menggunakan metode pendekatan GAD (*gender and development*) serta masih melihat dari sisi isu perempuan saja bukan melihat dari sisi isu gender.

## **2. Kendala yang dihadapi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang**

Bagi perkembangan bangsa, pembangunan sumber daya manusia perlu untuk diperhatikan tidak hanya dari keberadaannya tetapi juga kualitas perannya. Keberhasilan pembangunan tergantung dari sumber daya manusia yang ada, baik itu laki-laki maupun perempuan yang sebagai pelaksana pembangunan dimasa depan kelak. Oleh karena itu, strategi pembangunan sumber daya manusia pada saat ini memfokuskan kepada upaya pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia yang berwawasan gender. Dalam pelaksanaannya tidak dipungkiri banyak sekali kendala-

kendala yang dihadapi. Demikian halnya dengan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, baik kendala datangnya dari faktor internal maupun eksternal.

Kendala dari faktor internal yang dihadapi oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang salah satunya yaitu mengenai masalah dana. Masalah dana ini memang hampir tidak pernah lepas dijadikan sebagai salah satu kendala di dalam setiap melaksanakan kegiatan. Walaupun jika melihat selama ini dana merupakan bukan suatu kendala yang terlalu menghambat dalam pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, namun hal tersebut masih menjadi sebuah masalah besar ketika DPRD Kabupaten yang selama ini menjadi penyalur dana kegiatan tidak dapat dengan cepat mencairkan dana kegiatan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, menanggapi hal tersebut maka penting sekali adanya tanggung jawab dari para penyalur dana kegiatan untuk dapat mencairkan dengan cepat dana yang dibutuhkan supaya pelaksanaan dari kegiatan yang telah diagendakan dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

Kendala internal Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang tidak hanya pada persoalan dana saja. Ketika persoalan dana teratasi ternyata ada persoalan internal lain, yaitu persoalan adanya ketimpangan jumlah pegawai laki-laki. Bahwa antara jumlah pegawai laki-laki dan perempuan, masih banyak jumlah pegawai perempuan daripada laki-laki di dalam tubuh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Melihat salah satu tujuan dari strategi pelaksanaan kegiatan dari kantor ini yaitu menerapkan strategi pengarusutamaan gender di semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000. Sehingga Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang tidak seharusnya mengesampingkan asas keadilan dan kesetaraan gender didalam struktur

organisasinya. Menanggapi hal tersebut, maka perlu adanya sebuah restrukturisasi organisasi didalam tubuh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang supaya tidak teras adanya bias gender lagi didalam struktur organisasinya. Melalui kelembagaan perempuan ini, kaum laki-laki juga diberi kesempatan untuk menyumbangkan ide-ide untuk kemajuan perkembangan gender yang meletakkan peran sejajar antara laki-laki dan perempuan di segala bidang pembangunan.

Adapun kendala yang bersifat eksternal yang dihadapi oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang terdapat beberapa kendala. Pertama, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan P3EL, yaitu adanya kelompok usaha yang tidak mengembalikan modal yang diberikan. Ini menjadi sebuah kendala karena modal yang diberikan kepada kelompok usaha tersebut merupakan modal bergilir yang pada nantinya modal tersebut akan diberikan kepada kelompok usaha lainnya. Apabila modal tersebut tidak bisa dikembalikan, maka ini akan menghambat kelompok usaha lainnya untuk mendapatkan modal usaha. Kelompok usaha tersebut sampai tidak bisa mengembalikan modal, karena beberapa hal seperti tidak adanya niatan dari para kelompok usaha untuk menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh setelah diberikan modal usaha yang akhirnya mengakibatkan kebangkrutan pada usahanya. Untuk itu Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang untuk kedepannya sebaiknya menyeleksi terlebih dahulu kelompok usaha yang mengajukan permohonan dana untuk usaha. Dengan menyeleksi terlebih dahulu akan lebih mudah bagi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang untuk melihat mana kelompok usaha yang memang sungguh-sungguh ingin memanfaatkan potensi lokal desa mereka untuk dijadikan usaha atau kelompok usaha yang hanya ingin coba-coba saja. Hal ini bisa dilihat dari proposal yang diajukan oleh tiap kelompok usaha kepada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang untuk mendapatkan dana bantuan.

Kedua, kendala tentang kegiatan pelatihan kepemimpinan, kepribadian dan pengarusutamaan gender bagi istri camat dan istri kepala desa/kelurahan se Kabupaten Malang. Kendala yang dialami dalam kegiatan ini yaitu adanya masalah yang timbul mengenai para peserta yang masih memiliki balita. Pelaksanaan pelatihan seharusnya dapat dilaksanakan dengan suasana dan kondisi yang santai tapi serius, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami oleh para peserta. Tetapi kondisi para peserta yang masih memiliki balita menjadi faktor penghambat jalannya proses penyampaian materi kepada para peserta. Meskipun telah membawa pengasuh dan telah disediakan tempat bagi para balita, namun pada kenyataannya fokus para peserta yang membawa balitanya terpecah antara balita mereka dan pelaksanaan pelatihan ini. Komitmen yang tinggi untuk mengikuti pelatihan ini merupakan hal yang penting bagi para peserta. Dengan mengikuti pelatihan secara fokus maka pelatihan ini akan sangat bermanfaat bagi para peserta dalam memahami setiap materi yang disampaikan, kemudian dapat menjadi kader bagi lingkungan sekitarnya.

Ketiga, kendala tentang pelaksanaan kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). Kendala yang terjadi berupa rendahnya daya tangkap para peserta dalam menerima pembinaan program sehingga memperlambat penerapannya. Rendahnya pendidikan dari para peserta yang pada dasarnya adalah para kaum perempuan, merupakan faktor penyebab dari keterlambatan proses pembinaan tersebut. Pendidikan disini berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan potensi manusia yang dimiliki oleh setiap individu. Sehingga pendidikan tidak saja berfungsi untuk mengembangkan kemampuan manusia, tetapi pendidikan dimaknai juga sebagai upaya untuk mencocokkan kecakapan, keterampilan, serta keahlian manusia sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

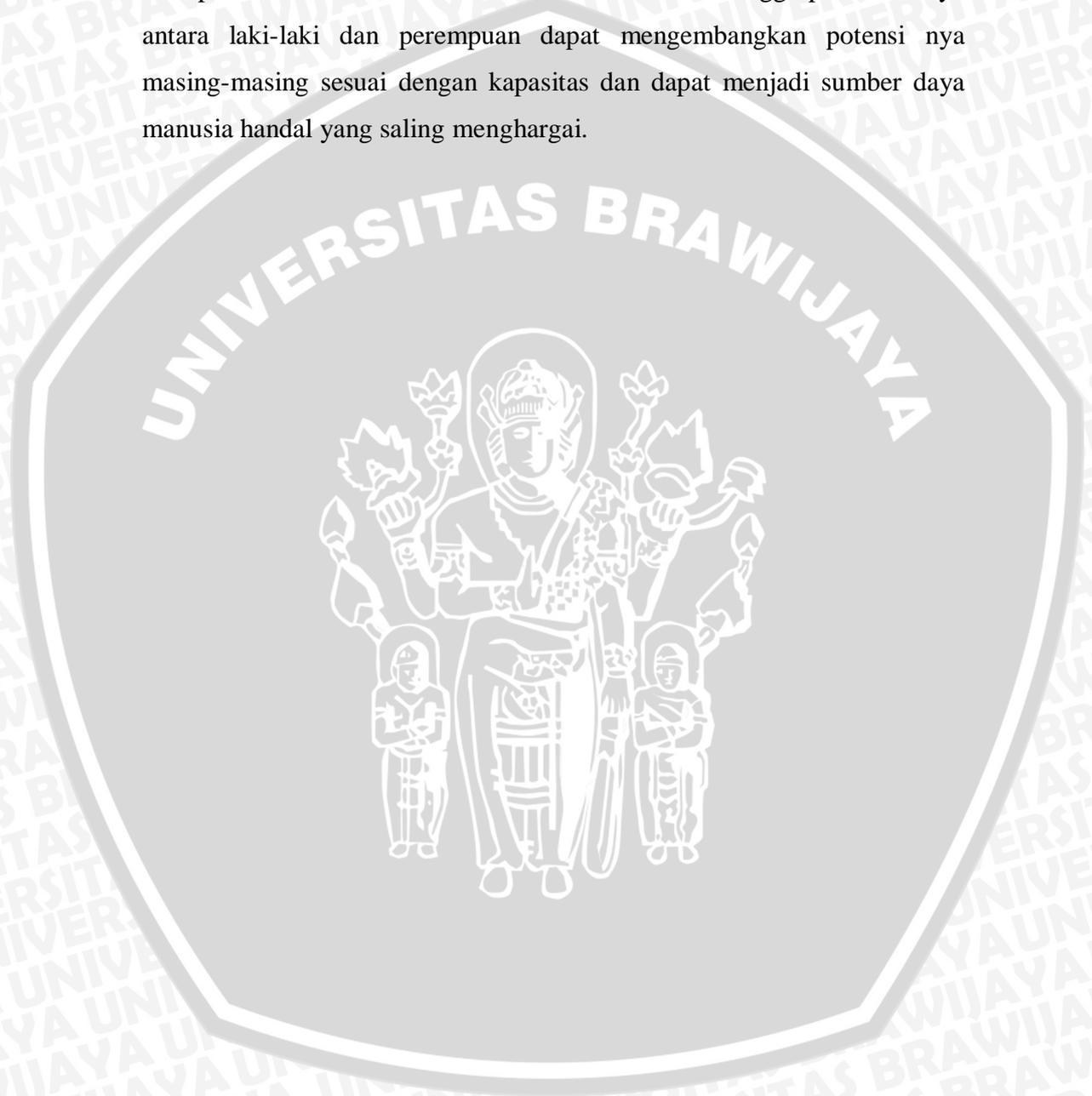
Dengan rendahnya tingkat pendidikan para peserta yang kebanyakan lulusan pendidikan SD/MI ini merupakan bentuk dari adanya ketidakadilan dan kesetaraan gender bagi perempuan. Apalagi mereka pada usia dini sudah dinikahkan, dan dipaksa berkembang sesuai dengan

status mereka bukan sesuai dengan umur mereka. Apalagi untuk memahami pembinaan yang dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang mereka cukup kesulitan karena selain karena faktor pendidikan mereka juga memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti pembinaan tersebut dikarenakan harus mengurus anak mereka.

Dan untuk yang keempat, kendala dalam kegiatan Fasilitasi Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan. Melalui kegiatan sosialisasi, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang melaksanakan kegiatan berupa mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang KDRT dan *trafficking*. Ini bertujuan untuk lebih memberikan pemahaman kepada perempuan bahwa mereka memiliki payung hukum. Sebenarnya tidak hanya untuk kaum perempuan saja sosialisasi ini seharusnya diberikan. Laki-laki juga sangat penting untuk diberi pemahaman tentang PERDA tersebut. Tetapi pada kenyataannya yang diberikan sosialisasi tersebut hanya kaum perempuan saja.

Selain itu, faktor budaya masyarakat Indonesia yang masih menganggap tabu untuk menceritakan masalah keluarga juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam memberikan fasilitasi bagi korban tindak KDRT. Inilah yang menjadi persoalan pada masyarakat kita selama ini, pemikiran seperti itu seharusnya dirubah ketika para korban tindak kekerasan menyadari bahwa apa yang terjadi pada mereka merupakan sebuah pelanggaran hukum yang harus dilaporkan dan ditindak tegas. Bukan hanya karena alasan merupakan persoalan rumah tangga yang harus ditutup-tutupi, maka korban tindak kekerasan berdiam diri saja menerima nasib begitu saja atas kejadian kekerasan yang menimpa dirinya. Tetapi para korban harus bertindak untuk mendapatkan keadilan atas tindak kekerasan yang mereka alami. Selain untuk membuat jera para pelaku tindak kekerasan, ini juga sebagai tindakan untuk meningkatkan derajat kita sebagai perempuan yang juga sebagai manusia yang harus dihargai dan dihormati. Dengan adanya faktor kendala tersebut, diharapkan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Malang terus berupaya meluruskan pemikiran-pemikiran salah mengenai budaya kita yang banyak merugikan kaum perempuan pada khususnya. Terlebih lagi untuk merubah pemikiran korban tindak kekerasan bahwa dengan melaporkan tindak kekerasan yang dialami merupakan bukan suatu tindakan salah dan tabu. Sehingga pada nantinya antara laki-laki dan perempuan dapat mengembangkan potensinya masing-masing sesuai dengan kapasitas dan dapat menjadi sumber daya manusia handal yang saling menghargai.



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran tentang pembangunan sumber daya manusia berwawasan gender yang dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia berwawasan gender ini diterapkan melalui empat program kegiatan, dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### 1. Pelatihan Kepemimpinan, Kepribadian dan PUG

Program kegiatan pelatihan, kepribadian, dan PUG bagi istri camat/istri lurah/dan istri kepala desa ini telah dilaksanakan dengan baik. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang telah melaksanakan program kegiatan ini dengan sasaran peserta yang tepat yaitu para istri-istri pemimpin dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Dengan materi pembekalan yang diberikan berupa ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada para istri camat/lurah/kepala desa, yang bertujuan untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin organisasi perempuan atau gerakan PKK di wilayahnya. Sehingga nantinya para istri-istri ini dapat dijadikan sebagai kader penyebaran ide-ide tentang kesetaraan dan keadilan gender di wilayahnya dan juga sebagai *agent of change* bagi masyarakat di wilayahnya kearah yang lebih baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan, kepribadian, dan PUG bagi istri camat/istri lurah/dan istri kepala desa ini sudah dilaksanakan cukup baik dengan memberikan pembekalan materi yang tepat sasaran.

#### 2. Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga (P2W-KSS)

Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) merupakan salah satu program kegiatan yang dilaksanakan untuk membina perempuan yang memiliki permasalahan ekonomi, kesehatan dan pendidikan rendah di Desa Bringin,

Kecamatan Wajak. Program kegiatan ini mampu dilaksanakan dengan cukup maksimal oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dengan 11 (sebelas) sektor program pembinaan bagi warga binaan. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang telah menunjukkan kontribusi positifnya sebagai pusat pelaksana untuk memberdayakan perempuan supaya memperoleh akses kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan, dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal di dalam semua bidang pembangunan.

3. Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha (P3EL)

Program kegiatan pemberdayaan perempuan pengembang ekonomi lokal (P3EL) yang dilaksanakan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang memberikan hasil yang cukup nyata. Dimana dari kegiatan-kegiatan berupa pemberian bantuan peralatan usaha maupun pemberian bimbingan manajemen usaha ini dapat bermanfaat dan diterapkan oleh para peserta kegiatan. Selain itu juga, kegiatan program ini dapat memberikan keahlian (*Skill*) bagi peserta kegiatan, membantu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, dan dapat menjadikan perempuan sebagai sumber daya manusia yang handal dalam sektor ekonomi. Sehingga kegiatan ini sangat bermanfaat sekali untuk menggali potensi perempuan dalam mengelola usaha.

4. Fasilitasi Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan.

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten telah melaksanakan program kegiatan berupa memberikan fasilitasi perlindungan terhadap tindak kekerasan maupun *trafficking* bagi perempuan dengan sangat baik. Hal ini diwujudkan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, maupun diwujudkan dalam bentuk perlindungan, pelayanan, dan pendampingan bagi korban dari tindak kekerasan. Kemudian, semua ketentuan perundang-undangan

serta bentuk fasilitasi tersebut disosialisasikan kepada peserta agar dapat diimplementasikan oleh seluruh masyarakat, khususnya perempuan yang terkena tindak kekerasan maupun memberikan pemahaman tersebut terhadap kaum perempuan yang belum terkena tindak kekerasan. Jadi, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam memberikan Fasilitasi Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan ini sudah sangat baik. Dimulai dari memberikan payung hukum maupun memberikan perlindungan, pelayanan, dan pendampingan bagi korban dari tindak kekerasan, dan kemudian mensosialisasikannya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang melaksanakannya tepat sesuai dengan sasaran.

5. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sumber daya manusia yang berwawasan gender, tentunya tidak bisa lepas dari kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, baik itu kendala internal maupun kendala eksternal. Ketika kendala dana dan loyalitas para pegawai sudah teratasi, adanya ketimpangan jumlah pegawai perempuan yang lebih banyak dibanding dengan jumlah pegawai laki-laki inilah yang kemudian memunculkan anggapan bahwa dari dalam tubuh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang itu sendiri masih terdapat adanya ketimpangan gender. Selain itu, kendala lain yang ditimbulkan berasal dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang itu sendiri, antara lain yaitu: adanya kendala pengembalian modal dari kelompok usaha pelaksanaan program P3EL; terganggunya konsentrasi para peserta pelatihan kepemimpinan, kepribadian, dan PUG yang memiliki balita; rendahnya tingkat pendidikan para kaum wanita di Desa Bringin yang menghambat pelaksanaan program P2WKSS; dan budaya masyarakat tentang kodrat seorang wanita yang mempengaruhi proses pelaksanaan sosialisasi maupun advokasi bagi korban tindak kekerasan. Namun, dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi baik itu kendala

internal maupun eksternal, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang selalu berusaha untuk tidak memberikan ruang terhadap kendala-kendala yang ada untuk menang. Semua pegawai tidak terkecuali kepala kantor selalu berfikir keras untuk mencari jalan keluar penyelesaian dari setiap kendala yang dihadapi, sehingga apapun kendala yang muncul dapat mereka atasi dengan baik.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat direkomendasikan sehubungan dengan hasil pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan tujuan pembangunan sumber daya manusia yang berwawasan gender, maka disarankan program kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang tidak hanya tertuju pada pemberdayaan kaum perempuan saja yang dimana pesertanya nanti hanya kaum perempuan saja dan tanpa melibatkan kaum laki-laki. Kaum laki-laki juga perlu untuk diberikan pemahaman mengenai implementasi dari keadilan dan kesetaraan gender, sehingga adanya harapan terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender yang sesungguhnya antara laki-laki dan perempuan dapat terwujud.
2. Kendala memang tidak akan terhindarkan karena segala sesuatunya tidak mungkin berjalan lancar seratus persen. Untuk itu Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang diharapkan lebih selektif lagi untuk menentukan kelompok usaha mana yang layak untuk mendapatkan bantuan dalam program P3EL. Sehingga dapat meminimalkan kejadian kelompok usaha yang tidak bisa mengembalikan modal, yang pada nantinya dapat merugikan kelompok usaha lain yang memang benar-benar membutuhkan modal tersebut. Kalau perlu ada petugas yang meneliti langsung, apakah kelompok usaha tersebut ingin menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh atau hanya dijadikan sebagai ajang coba-coba saja.

3. Diupayakan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dapat lebih sering mensosialisasikan dan memberikan pelatihan-pelatihan serta pemahaman-pemahaman mengenai gender yang lebih menekankan pada kemampuan berperan antara laki-laki dan perempuan.
4. Diharapkan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang tetap dipertahankan dan tetap melaksanakan setiap kegiatan secara konsisten dengan menganut pola maksimal. Karena dari tingkat inilah perkembangan tentang pemahaman keadilan dan kesetaraan gender dapat disampaikan ke tingkat desa yang dimana banyak adanya kesenjangan gender yang mengakibatkan adanya perlakuan tidak adil terhadap kaum perempuan.



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

- Anwar, Marzani dan Siti Musdah Mulia. 2001. *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*. Jakarta : Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dessler, Gary. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Jilid I*. Jakarta : PT. Indeks.
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Handayani, Trisakti dan Suguarti. 2008. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang : UMM Press.
- Handyaningrat, Srewarno. 1980. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta Gunung agung.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Personalia dan SDM*. Yogyakarta : BPFE.
- Hasibuan, Malayu SP. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jawad, Haifan A. 2002. *Otentitas Hak-Hak Perempuan : Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru.
- Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Mangkupraja, Sjafrri. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moekijat. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Mandar Maju.
- ..... 1991. *Latihan dan Pengembangan SDM*. Bandung : Mandar Maju.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Muhajir, Nung. 1992. *Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan SDMI*. Yogyakarta : Rake Sarasia.

Murniati, A. Nunuk. P. 2004. *Getar Gender*. Magelang: Indonesiatera.

Nasution, Zulkarnaen. 1988. *Komunikasi Pembangunan*. Jakarta : CV. Rajawali.

Nawawi, Hadari. 2005. *Perencanaan Sumber Daya Manusia Untuk Organisasi Profit yang Kompetitif*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Ndraha, Taliziduhu. 1999. *Pengantar Teori: Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Notoadmodjo, Soekidjo. 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Nugroho, Riant. 2008. *Gender Dan Strategi Pengarus-Utamaannya Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Parawansah, Khofifah Indar. 2006. *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi (Pemikiran Tentang Keserasian Gender)*. Jakarta : Pustaka LP3ES.

Raharjo, Slamet. 1995. *Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas SDM*. Semarang : Depdikbud.

Siagian, P. Sondang. 2005. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D"*. Bandung : Alfabeta.

Sukri, Sri Suhanyati. 2002. *Biasa Jender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta : Gama Media.

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang : UMM Press.

Suryono, Yoyon. 2008. *Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pendekatan Strategis dan Pendidikan)*. Yogyakarta : Gama Media.

Syarif, Hidayat. 2002. *Pembangunan Sumber Daya Manusia Berwawasan IPTEK dan IMTAK*. Jakarta : Logos.

Tjokroamidjodjo, Bintoro. 1988. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Pustaka LP3ES.

**Jurnal:**

*Jurnal Perempuan*. Edisi 50. 2006. Pengarusutamaan Gender. Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta.

**Internet:**

..... . 2009. "Sumber Daya Manusia", diakses pada tanggal 17 Maret 2009 dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_daya\\_manusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia).

Dr. Siti Musdah Mulia, MA, APU. 2008. "Pendidikan Berwawasan Keadilan Gender", diakses pada tanggal 17 Maret 2009 dari <http://www.icrp-online.org/wmprint.php?ArtID=525>.

ikhwan Kunto Alfarisi. 2009. "Peranan Pendidikan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia", diakses pada tanggal 12 Februari 2009 dari <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=13054>.

Inpres No. 9 Tahun 2000. 2009. "Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender", diakses pada tanggal 3 Januari 2009 dari [http://www.Inpres\\_no\\_9\\_th\\_2000.go.id/i/pdf](http://www.Inpres_no_9_th_2000.go.id/i/pdf).

..... 2009. "Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak", diakses pada tanggal 1 Mei 2009 dari <http://www.kpppamalangkab.go.id>.



## PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan pegawai Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.

1. Apa tujuan dari pelaksanaan pelatihan kepemimpinan, kepribadian, dan PUG bagi istri amat dan istri kepala desa/Lurah?
2. Upaya apa yang dilakukan KPPPA dalam memaksimalkan pelaksanaan program P2WKSS?
3. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kelompok peserta P3EL untuk memperoleh bantuan?
4. Siapa saja sasaran yang menjadi peserta dalam kegiatan sosialisasi tentang KDRT dan *trafiking*?
5. Apa saja yang menjadi kendala internal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sumber daya manusia berwawasan gender?
6. Apa saja yang menjadi kendala eksternal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sumber daya manusia berwawasan gender?

B. Wawancara dengan peserta kegiatan

1. Menurut anda apa yang menyebabkan sebuah usaha dapat bankrut dan tidak dapat mengembalikan modal usaha kepada KPPPA sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan P3EL?
2. Bagaimana kualitas penyerapan materi dalam pelatihan kepemimpinan, kepribadian, dan PUG yang anda ikuti dengan adanya kendala balita anda?

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Dwi Kurniawati  
Tempat Tanggal Lahir : Mojokerto, 24 April 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Pattimura 241 Rt.13 Rw.06 Kletek-Taman-Sidoarjo  
Status : Belum Menikah  
Email : mon\_ndutz@yahoo.com  
Pendidikan Formal : 1. MI Darun Najah Kletek, lulus tahun 1999  
2. SMP 3 Taman, lulus tahun 2002  
3. SMA Bhayangkari 1 Surabaya, lulus tahun 2005  
4. FIA Universitas Brawijaya Malang, masuk tahun 2005  
Pengalaman Kerja : Magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu

